

Laporan Kinerja Kab. Belitong Timur

LKj Tahun 2025

2026



Our Website
www.beltim.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

INSPEKTORAT DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU MANGGARAWAN
Jalan Raya Manggar – Gantung 33511, Telp/Fax (0719) 92200
e-mail: inspektorat@belitungtimurkab.go.id dan inspektorat.belim@gmail.com

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitong Timur untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Belitong Timur.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Manggar, 30 Maret 2026

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

HARYANTO, SE, M. Ec. Dev
NIP. 19780901 200212 1 004

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check List
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP.	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja.	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai.	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.	X
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	√
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai.	X
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj.	X
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya.	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait.	√
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	√
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis.	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja.	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama.	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.	
		10. IKU dan IK telah SMART.	X

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan kinerja ini dengan baik.

Laporan kinerja disusun sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas kinerja tahun 2025 dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip sesuai amanat dalam Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini melaporkan secara transparan dan akuntabel atas pencapaian target kinerja pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Belitung Timur yaitu Belitung Timur Nyaman dan Berkemajuan serta merupakan laporan pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Pada penulisan Laporan ini terdapat beberapa indikator yang belum dapat tercapai sesuai dengan target, namun kami berupaya untuk menjadikan laporan ini sebagai sarana evaluasi dan bahan masukan untuk penyempurnaan manajemen kinerja serta diharapkan dapat mewujudkan Kabupaten Belitung Timur yang lebih cerah, berkeadilan, dan berdaya saing tinggi pada tingkat regional maupun nasional serta dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam penyampaian Laporan ini masih terdapat beberapa kekurangan, untuk itu diharapkan masukan dan saran yang sifatnya membangun serta ucapan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama dalam dalam pencapaian kinerja.

Manggar, 16 Maret 2026
BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

IKTISAR EKSEKUTIF

Tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan refleksi dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikelola dengan baik. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur selaku penyelenggara pemerintahan bercita-cita menyejahterakan masyarakat serta berupaya dengan berbagai kebijakan dan program yang secara operasional bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 masuk dalam kategori “BAIK”, dengan capaian rata-rata sebesar 86,04%. Mayoritas indikator telah tercapai dengan baik, walaupun masih ada indikator yang perlu ditingkatkan. Indikator-indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan dan Indeks Pembangunan Pemuda menggunakan data capaian yang dilaksanakan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena perhitungan capaian tahun 2025 belum selesai dilaksanakan, Namun demikian Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tetap melaksanakan kegiatan yang menjadi indikator pada dimensi penilaian indeks tersebut. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2025 merupakan capaian pertama (pada masa transisi) dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029.

Sebagai langkah awal pada tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga telah menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 untuk meningkatkan capaian kinerja Kabupaten Belitung Timur menjadi lebih baik lagi pada masa yang akan datang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-5
1.3. Ruang Lingkup	I-6
1.4. Gambaran Umum	I-7
1.4.1. Wilayah Administratif	I-7
1.4.2. Kependudukan	I-8
1.4.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Timur	I-14
1.4.4. Indeks Pembangunan Manusia	I-16
1.4.5. Struktur Organisasi	I-20
1.4.6. Kondisi Kepegawaian Daerah	I-23
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Ringkasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029.....	II-27
2.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Belitung Timur	II-28
2.1.2. Tujuan dan Sasaran	II-33
2.2. Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.....	II-38
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Indikator Utama Tahun 2025	III-46
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Indikator Utama Tahun 2025	III-50
3.3. Akuntabilitas Keuangan dan Anggaran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tahun 2025.....	III-250
3.4. Penghargaan yang diterima Pemerintah kabupaten Belitung Timur	III-253
 BAB IV PENUTUP	 IV-261
 LAMPIRAN :	
1. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025	
2. Perjanjian Kinerja tahun 2025	
3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
4. Rincian Program dan Kegiatan Pada Setiap Sasaran	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Ruang Lingkup

1.4 Gambaran Umum



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang berkeadilan, demokratis, serta dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Amanat tersebut menegaskan bahwa upaya memajukan kesejahteraan umum harus didukung oleh perencanaan pembangunan yang berkualitas, terarah, dan berorientasi pada hasil.

Dalam konteks tersebut, perencanaan pembangunan memegang peranan strategis sebagai instrumen untuk memastikan agar seluruh program dan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, serta tepat sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ada. Perencanaan yang baik juga menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan guna menjawab kebutuhan masyarakat serta menghadapi dinamika dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah diwajibkan untuk menyelenggarakan

pemerintahan secara akuntabel. Hal ini ditegaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya melalui penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, termasuk sumber daya keuangan, guna menghasilkan kinerja yang optimal. Dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, laporan tersebut disusun secara periodik untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen pelaporan kinerja tahunan yang disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. LAKIP disusun berdasarkan capaian kinerja tahunan yang mengacu pada dokumen perencanaan strategis dan menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memiliki tanggung jawab yang besar dalam menggerakkan seluruh potensi pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan, serta responsif terhadap perubahan lingkungan strategis. Perencanaan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah guna mewujudkan visi, misi, dan program strategis kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur.

LAKIP Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 juga merupakan laporan realisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa transisi dari Bupati Belitung Timur Periode Tahun 2021- 2026 dan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–

2029 Bupati terpilih. Penyusunan laporan ini dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 95);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 (Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Belitung Timur Nomor 140);
 15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 40);

16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 42);

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, laporan ini disusun sebagai media pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah kepada pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan LAKIP Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Menyediakan dasar pengukuran kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menjadi bahan evaluasi dan umpan balik bagi peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah di masa mendatang.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan pengelolaan sumber daya organisasi.
5. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintahan.

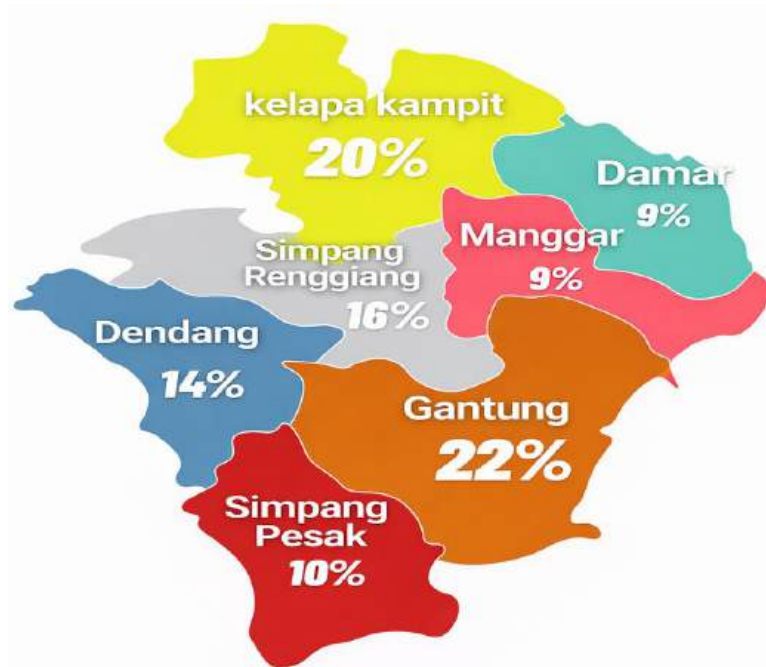
1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 mencakup seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. Secara lebih rinci, ruang lingkup laporan ini meliputi:

1. Uraian singkat mengenai gambaran umum kondisi Kabupaten Belitung Timur, termasuk kondisi geografis, demografis, perekonomian daerah, pembangunan manusia, struktur organisasi perangkat daerah, serta kondisi kepegawaian daerah;
2. Rencana strategis, sasaran strategis, serta target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah dan perjanjian kinerja;
3. Pengukuran dan pelaporan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berdasarkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja pendukung;
4. Evaluasi dan analisis kinerja atas pencapaian sasaran strategis, program, dan kegiatan, termasuk analisis efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya;
5. Identifikasi permasalahan, kendala, serta upaya perbaikan yang dilakukan dan direncanakan sebagai dasar peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada periode selanjutnya.

1.4 Gambaran Umum Daerah

1.4.1 Wilayah administratif



Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Belitung Timur 2025

Secara geografis, Kabupaten Belitung Timur terletak pada koordinat 107°45' sampai dengan 108°18' Bujur Timur dan 02°30' sampai dengan 03°15' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Belitung Timur berada di Pulau Belitung, tepatnya di bagian timur Pulau Belitung, dan merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Belitung Timur memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- di sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
- di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Belitung; dan
- di sebelah timur berbatasan dengan Selat Karimata.

Luas wilayah Kabupaten Belitung Timur yang berupa daratan mencapai ±2.506,91 km². Secara administratif, wilayah tersebut terbagi ke dalam tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Dendang, Kecamatan Simpang

Pesak, Kecamatan Simpang Renggang, Kecamatan Gantung, Kecamatan Damar, Kecamatan Manggar, dan Kecamatan Kelapa Kampit, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) desa.

Pusat pemerintahan Kabupaten Belitung Timur berlokasi di Kecamatan Manggar dengan luas wilayah sekitar 229 km², yang berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan, pelayanan publik, serta kegiatan sosial dan ekonomi daerah.

1.4.2 Kependudukan

Kondisi kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan ketersediaan sumber daya manusia serta kebutuhan pelayanan publik. Dinamika jumlah, struktur, dan distribusi penduduk akan memengaruhi arah kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

1.4.2.1 Jumlah dan Sebaran/Distribusi Penduduk

Berdasarkan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2024 tercatat sebanyak 132.495 jiwa yang menempati wilayah daratan seluas 2.506,91 km². Dengan kondisi tersebut, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Belitung Timur mencapai sekitar 417,98 jiwa per km².

Sebaran penduduk di Kabupaten Belitung Timur tidak merata dan cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu. Kecamatan Manggar sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar dibandingkan kecamatan lainnya. Sementara itu, kecamatan dengan wilayah yang relatif luas seperti Gantung, Simpang

Renggiang dan Dendang memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan karakteristik wilayah yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Untuk data detail dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

NO.	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km ²)	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ km ²)
1	Manggar	229,00	40,839	177,34
2	Gantung	546,30	31,248	57,19
3	Dendang	362,20	11,148	30,78
4	Kelapa Kampit	498,50	19,650	39,42
5	Damar	236,90	13,970	58,97
6	Simpang Renggiang	390,70	7.770	19,89
7	Simpang Pesak	243,30	8,818	36,24
Jumlah		2.506,9	133,443	419,83

Sumber : Database Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 Semester II

1.4.2.2 Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia

Struktur penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2025 didominasi oleh penduduk usia produktif (15–64 tahun). Kelompok usia produktif memiliki proporsi sebesar 67,46 persen dari total jumlah penduduk, disusul oleh penduduk usia muda (0–14 tahun) sebesar 23,17 persen, serta penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) sebesar 7,09 persen.

Komposisi penduduk yang didominasi oleh usia produktif tersebut menunjukkan adanya potensi bonus demografi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan produktivitas, serta penguatan daya

saing sumber daya manusia. Namun demikian, kondisi ini juga menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan lapangan kerja, layanan pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan yang memadai.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok
Umur dan Jenis Kelamin

No.	Kelompok Umur	Laki – Laki 2025	Perempuan 2025	Jumlah 2025
1	0 - 4	4.288	4.096	8.384
2	5 – 9	5.288	4.956	10.244
3	10 – 14	5.960	5.542	11.502
4	15 - 19	5.520	5.156	10.676
5	20 - 24	5.613	5.383	10.996
6	25 - 29	5.288	4.839	10.127
7	30 - 34	4.904	4.568	9.472
8	35 – 39	4.890	4.632	9.522
9	40 - 44	5.622	5.204	10.826
10	45 - 49	5.785	5.191	10.976
11	50 - 54	4.620	4.054	8.674
12	55 -59	3.614	3.185	6.799
13	60 -64	2.643	2.548	5.191
14	65 -69	1.981	2.192	4.173
15	70 – 74	1.331	1.523	2.854
16	75 +	1.232	1.795	3.027
TOTAL		68.579	64.854	133.443

Sumber : PDAK - Kementerian Dalam Negeri RI

1.4.2.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Di Kabupaten Belitung Timur, komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan terakhir pada Tahun 2024 masih didominasi oleh penduduk dengan pendidikan dasar, khususnya tamat SD/ sederajat. Kondisi ini sejalan dengan struktur umur penduduk yang relatif besar pada kelompok usia sekolah.

Meskipun demikian, terdapat kecenderungan peningkatan jumlah penduduk dengan pendidikan menengah dan tinggi, yang tercermin dari adanya penduduk lulusan SLTA/ sederajat hingga pendidikan tinggi (Diploma dan Strata). Hal ini menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tabel 1.3

Rekapitulasi Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Pendidikan Terakhir	Laki – Laki 2025	Perempuan 2025	Jumlah Penduduk 2025
Tidak/Belum Sekolah	16.787	15.618	32.405
Belum Tamat SD/ Sederajat	10.512	9.619	20.131
Tamat SD/ Sederajat	16.588	16.479	33.067
SLTP/ Sederajat	9.156	8.279	17.435
SLTA/ Sederajat	12.535	10.792	23.327
Diploma I/II	231	490	721

Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	715	1.012	1.727
Diploma IV/Strata I	1.968	2.513	4.481
Strata II	85	60	145
Strata III	2	2	4
TOTAL	68.579	64.854	133.443

Sumber : PDAK - Kementerian Dalam Negeri RI

1.4.2.4 Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk menggambarkan pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu dan memiliki implikasi terhadap dinamika sosial, ekonomi, serta kependudukan daerah. Pada Tahun 2025, Kabupaten Belitung Timur mengalami migrasi neto positif, yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang masuk ke wilayah Kabupaten Belitung Timur lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang keluar. Migrasi neto positif tersebut berkontribusi terhadap bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur dan mencerminkan daya tarik daerah, baik dari sisi peluang ekonomi maupun kualitas lingkungan sosial. Kondisi ini perlu diantisipasi melalui perencanaan pembangunan yang terintegrasi agar pertumbuhan penduduk dapat diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur, layanan publik, dan kesempatan kerja yang memadai.

Berdasarkan perhitungan migrasi neto Tahun 2025, Kabupaten Belitung Timur secara keseluruhan mengalami migrasi neto positif sebesar 28 jiwa. Namun jika dilihat dalam bentuk angka migrasi neto (per 1.000 penduduk), nilainya sebesar 0,21 per 1.000 penduduk, yang menunjukkan bahwa

secara proporsional tingkat perpindahan penduduk bersih relatif kecil.

Secara kewilayahan, Kecamatan Simpang Pesak mencatat angka migrasi neto tertinggi sebesar 2,16 per 1.000 penduduk, diikuti Kecamatan Gantung sebesar 1,76 per 1.000 penduduk, serta Kelapa Kampit sebesar 1,32 per 1.000 penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa kecamatan-kecamatan tersebut relatif lebih menarik sebagai tujuan migrasi.

Sebaliknya, Kecamatan Manggar mengalami angka migrasi neto negatif terbesar yaitu -1,25 per 1.000 penduduk, diikuti Simpang Renggang (-0,77), Dendang (-0,72), dan Damar (-0,50). Migrasi neto negatif ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang keluar lebih besar dibandingkan yang masuk pada wilayah tersebut.

Secara umum, dinamika migrasi antar kecamatan di Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025 menunjukkan mobilitas penduduk yang cukup dinamis, meskipun secara agregat kabupaten masih berada pada kondisi migrasi neto positif dengan tingkat yang relatif rendah.

Tabel 1.4

Jumlah Migrasi Neto Menurut Kecamatan Tahun 2025

WILAYAH	Jumlah Penduduk Tahun 2025	Jumlah Migrasi Masuk	Jumlah Migrasi Keluar	Selisih Migrasi	Angka Migrasi Netto
Manggar	40,839	445	496	-51	-1,25
Gantung	31,248	458	403	55	1,76
Dendang	11,148	113	121	-8	-0,72

Kelapa Kampit	19,650	233	207	26	1,32
Damar	13,970	125	132	-7	-0,50
Simpang Renggiang	7.770	72	78	-6	-0,77
Simpang Pesak	8,818	82	63	19	2,16
Kab. Belitung Timur	133.443	1528	1500	28	0,21

1.4.3 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang strategis dalam menilai kinerja pembangunan daerah, karena mencerminkan kapasitas perekonomian dalam menghasilkan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dinamika pertumbuhan ekonomi tidak hanya menggambarkan peningkatan output, tetapi juga menunjukkan struktur ekonomi daerah serta tingkat ketahanan terhadap berbagai tekanan eksternal.

Perkembangan struktur dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur sangat dipengaruhi oleh kontribusi masing-masing lapangan usaha yang menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, struktur perekonomian daerah pada periode perencanaan RPJMD 2025–2029 masih ditopang oleh tiga sektor utama, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; serta Pertambangan dan Penggalan. Ketiga sektor tersebut secara konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB dan menjadi fondasi utama struktur ekonomi daerah.

Berdasarkan perbandingan tahun 2024 dan 2025, ketiga sektor tersebut menunjukkan peningkatan nilai tambah yang mencerminkan

dinamika pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan meningkat dari Rp2.995,77 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp3.301,47 miliar pada tahun 2025, dengan kontribusi naik dari 27,30 persen menjadi 27,56 persen. Kondisi ini menegaskan peran sektor primer sebagai penopang utama perekonomian daerah sekaligus penyedia lapangan kerja yang signifikan.

Sektor Pertambangan dan Penggalan juga mengalami peningkatan dari Rp1.282,73 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp1.490,56 miliar pada tahun 2025, dengan kontribusi meningkat dari 11,69 persen menjadi 12,44 persen. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja sektor ekstraktif yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, meskipun tetap memiliki karakteristik fluktuatif dan bergantung pada dinamika harga komoditas.

Sementara itu, sektor Industri Pengolahan meningkat dari Rp2.286,23 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp2.510,99 miliar pada tahun 2025, dengan kontribusi relatif stabil dari 20,84 persen menjadi 20,96 persen. Stabilitas ini menunjukkan adanya konsistensi dalam penciptaan nilai tambah terhadap komoditas primer daerah, sekaligus menjadi indikator awal transformasi struktural menuju ekonomi berbasis hilirisasi.

Berdasarkan capaian dan dinamika tersebut, diperlukan penguatan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Perkembangan PDRB tahun 2025 menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Belitong Timur masih bertumpu pada sektor primer dan ekstraktif, meskipun sektor industri pengolahan mulai menunjukkan penguatan nilai tambah. Kondisi ini relevan dengan arah misi pembangunan daerah yang menekankan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, peningkatan daya saing daerah, serta pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, capaian PDRB tahun 2025 tidak hanya merefleksikan pertumbuhan ekonomi secara nominal, tetapi juga menjadi dasar evaluasi strategis

dalam mengarahkan kebijakan pembangunan menuju struktur ekonomi yang lebih inklusif, resilien, dan berkelanjutan sesuai dengan target RPJMD dan perjanjian kinerja kepala daerah.

1.4.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia melalui tiga dimensi dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPM digunakan sebagai alat untuk menilai kualitas pembangunan suatu daerah sekaligus mengklasifikasikan tingkat pembangunan manusia, apakah termasuk kategori maju, berkembang, atau tertinggal. Selain itu, IPM juga berfungsi untuk mengukur dampak kebijakan pembangunan, khususnya kebijakan ekonomi dan sosial, terhadap kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan manusia pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Pilihan yang paling mendasar meliputi kesempatan untuk hidup sehat dan berumur panjang, memperoleh pendidikan dan pengetahuan, serta memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Di samping itu, pilihan lain yang tidak kalah penting mencakup kebebasan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, jaminan hak asasi manusia, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan individu, tetapi juga pada pemanfaatan kemampuan tersebut dalam kehidupan yang produktif dan bermakna.

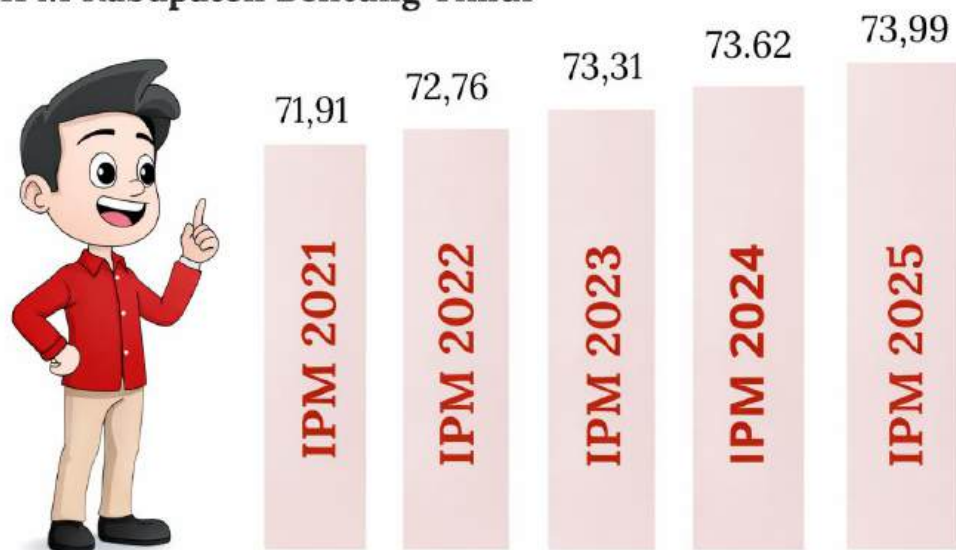
Agar konsep pembangunan manusia yang bersifat luas dan menyeluruh tersebut dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan pembangunan yang terukur, diperlukan suatu indikator yang mampu memantau dan mengevaluasi perkembangannya secara kuantitatif.

Dalam hal ini, IPM menjadi instrumen utama untuk mengukur capaian pembangunan manusia di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2025 tercatat sebesar 73,99 poin, yang termasuk dalam kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 73,62 poin, IPM Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,50% dibandingkan dengan capaian Tahun 2024. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Belitung Timur menjadi salah satu dari lima kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada pada kategori IPM tinggi, bersama Kota Pangkalpinang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Tengah.

klasifikasi	Capaian IPM
Sangat Tinggi	$\text{IPM} \geq 80$
Tinggi	$70 \leq \text{IPM} < 80$
Sedang Rendah	$60 \leq \text{IPM} < 70$
Rendah	$\text{IPM} < 60$

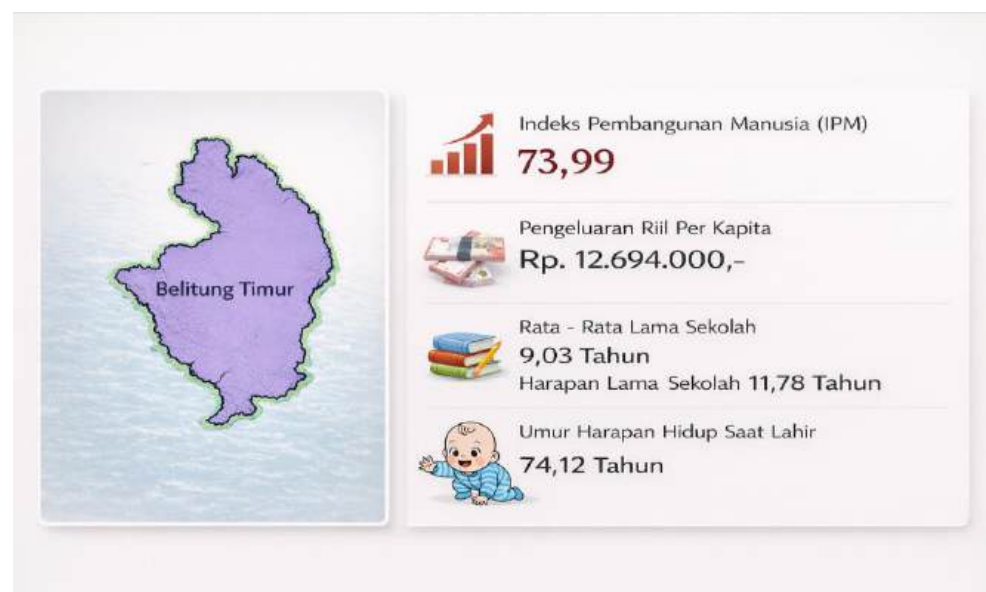
IPM Kabupaten Belitung Timur



Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

Unsur pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas tiga dimensi utama, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi standar hidup layak. Dimensi kesehatan diukur melalui indikator Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Pada Tahun 2025, UHH Kabupaten Belitang Timur tercatat sebesar 74,12 tahun, yang menunjukkan bahwa bayi yang lahir pada tahun tersebut memiliki harapan hidup hingga usia rata-rata 74,12 tahun. Capaian ini mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat yang relatif baik serta efektivitas pelayanan kesehatan yang terus ditingkatkan oleh pemerintah daerah.

Dimensi pendidikan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pada Tahun 2025, HLS Kabupaten Belitang Timur tercatat sebesar 11,78 tahun, yang menunjukkan bahwa anak-anak usia sekolah (7 tahun) memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga jenjang sekolah menengah atas atau sederajat. Sementara itu, RLS tercatat sebesar 9,03 tahun, yang mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hingga tingkat sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat.



Selanjutnya, dimensi standar hidup layak diukur melalui indikator pengeluaran per kapita. Pada Tahun 2025, pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Belitong Timur tercatat sebesar Rp12.694.000,- per tahun, meningkat dibandingkan dengan Tahun 2024 yang sebesar Rp12.610.000 per tahun. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan daya beli masyarakat serta kondisi kesejahteraan yang cenderung membaik.

Tabel 1.5

Rata - rata lama sekolah Kabupaten Belitong Timur

No.	Tahun	Rata – Rata Lama Sekolah
1	2010	6,96
2	2011	7,24
3	2012	7,51
4	2013	7,83
5	2014	7,89
6	2015	7,91
7	2016	7,95
8	2017	8,00
9	2018	8,14
10	2019	8,15
11	2020	8,22
12	2021	8,47
13	2022	8,67
14	2023	8,90
15	2024	8.99
16	2025	9,03

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025

1.4.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur disusun sebagai perangkat kelembagaan daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan dan penataan organisasi perangkat daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, serta kebutuhan daerah.

Secara umum, struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terdiri atas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan Daerah, Dinas Daerah, serta Kecamatan sebagai perangkat wilayah. Masing-masing perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Sekretariat Daerah berperan dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Inspektorat Daerah menjalankan fungsi pengawasan internal guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dinas dan Badan Daerah melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, sedangkan kecamatan berperan sebagai ujung tombak pelayanan publik di wilayah.

Penataan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pemerintah daerah secara optimal. Dengan struktur organisasi yang jelas dan proporsional, diharapkan koordinasi antarperangkat daerah dapat berjalan efektif sehingga pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan daerah dapat terlaksana secara sinergis dan berorientasi pada hasil.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tidak mengalami perubahan jumlah perangkat daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang berlaku tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021.

Penataan perangkat daerah dilakukan melalui pemisahan, penggabungan, dan penyesuaian nomenklatur urusan pemerintahan guna mewujudkan organisasi yang lebih efektif dan sesuai dengan kewenangan daerah. Pemisahan urusan dilakukan antara lain pada urusan penanaman modal, perindustrian, dan perdagangan; urusan kesehatan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; serta urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Selain itu, dilakukan penggabungan perangkat daerah pada urusan pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, dan perumahan kawasan permukiman, serta penguatan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Penyesuaian nomenklatur juga dilakukan untuk mengakomodasi urusan pemerintahan yang diampu, antara lain pada Dinas Perpustakaan menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian. Selain itu, pada Tahun 2025 terdapat perubahan nomenklatur pada salah satu perangkat daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Inovasi Daerah yang berubah nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) berdasarkan Peraturan Bupati Belitung

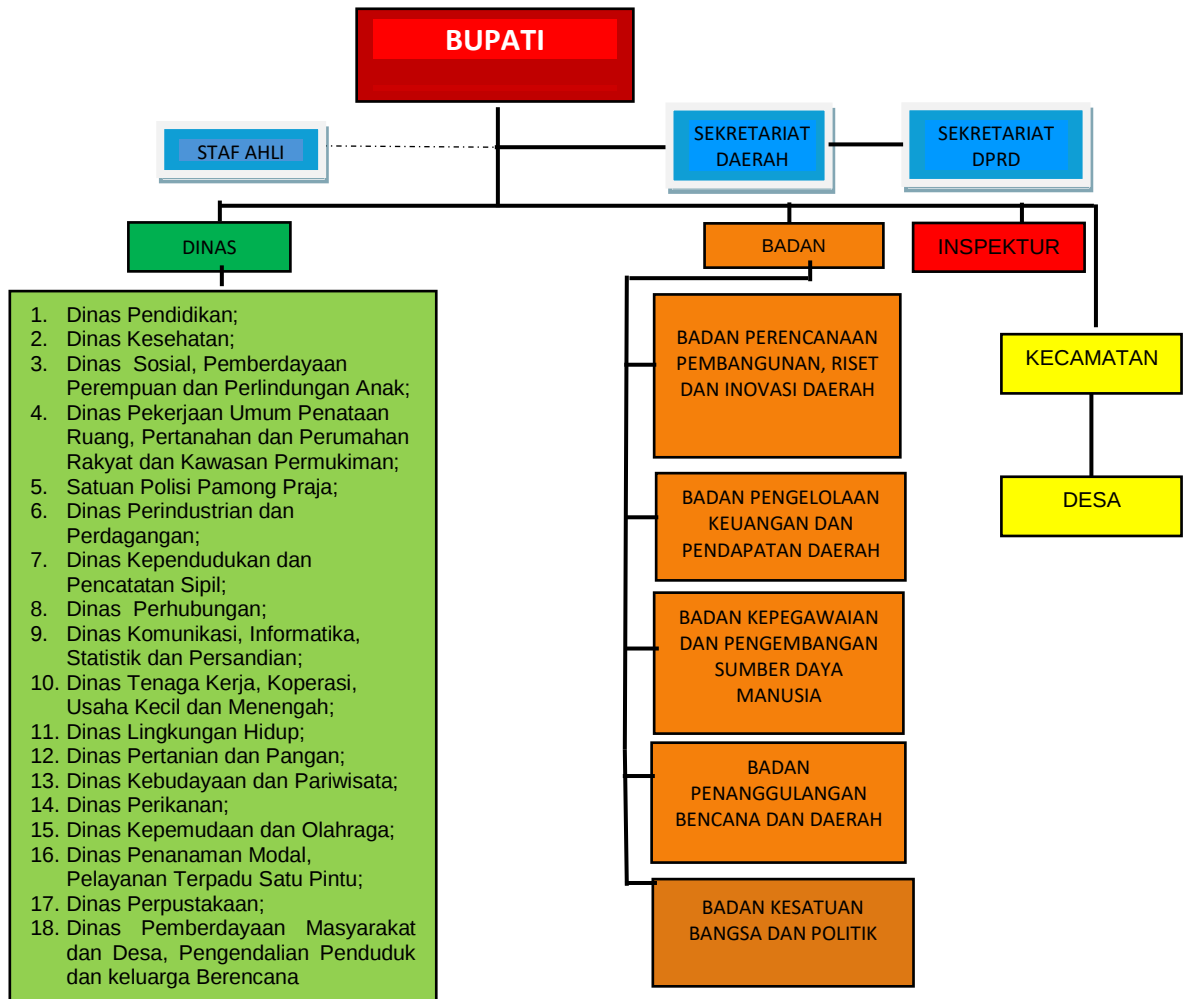
Timur Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah. Perubahan nomenklatur tersebut dilakukan sebagai penyesuaian terhadap kebijakan nasional terkait penguatan fungsi riset dan inovasi daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan yang lebih berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi daerah.

Dengan penyesuaian tersebut, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Belitung Timur diharapkan semakin adaptif terhadap dinamika kebijakan pembangunan serta mampu memperkuat integrasi antara perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Selain itu, penataan struktur organisasi perangkat daerah juga diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Struktur organisasi yang adaptif dan selaras dengan pembagian urusan pemerintahan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan berjalan secara terintegrasi. Dengan demikian, keberadaan perangkat daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan daerah.

Tabel 1.6

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Belitang Timur



1.4.6 Kondisi Kepegawaian Daerah

Kondisi kepegawaian daerah merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi dan transformasi tata kelola pemerintahan. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penggerak utama organisasi pemerintahan dituntut untuk memiliki kompetensi, integritas, serta orientasi kinerja yang selaras dengan agenda pembangunan daerah dan nasional.

Dalam kerangka reformasi birokrasi, pengelolaan kepegawaian tidak lagi berfokus semata pada aspek administratif, tetapi diarahkan pada penerapan sistem merit, penguatan manajemen talenta, serta penilaian kinerja yang terukur dan akuntabel. Penataan kelembagaan dan distribusi pegawai dilakukan secara lebih rasional dan berbasis analisis beban kerja guna memastikan efektivitas organisasi.

Sejalan dengan percepatan digitalisasi pemerintahan, transformasi manajemen kepegawaian juga didorong melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan kebutuhan ASN, pengembangan kompetensi, pengelolaan kinerja, hingga layanan administrasi kepegawaian. Digitalisasi ini bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kualitas pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based policy).

Dengan demikian, kondisi kepegawaian daerah tidak hanya diukur dari jumlah dan struktur pegawai, tetapi juga dari tingkat kesiapan sumber daya manusia aparatur dalam menghadapi era pemerintahan digital, memperkuat budaya kerja yang adaptif dan kolaboratif, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada hasil.

Tabel 1.7
Jumlah Pegawai PNS dan PPPK Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025

No.	Nama OPD	PNS Berdasarkan Jenis Kelamin		PPPK Berdasarkan Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	
1	Sekretariat Daerah	49	45	37	37	168
2	Sekretariat DPRD	16	10	20	13	59
3	Inspektorat	28	26	4	5	63
4	Badan Kepegawaian dan SDM	17	10	13	7	47
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	14	16	7	8	45

6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	31	17	21	5	74
7	Dinas Pendidikan	318	708	136	469	1631
8	Dinas Kesehatan	16	38	17	9	80
9	Dinas Perikanan	17	11	17	7	52
10	Dinas Lingkungan Hidup	18	11	92	15	136
11	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	10	13	18	10	51
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14	7	10	15	46
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16	9	6	14	45
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	17	4	24	12	57
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	22	17	16	7	62
16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11	10	6	14	41
17	Dinas Pertanian dan Pangan	32	27	19	14	92
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	7	14	17	47
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman	36	13	48	18	115
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10	11	14	5	40
21	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	7	13	14	40
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	18	15	12	9	54
23	Dinas Perhubungan	15	8	25	14	62
24	Satuan Polisi Pamong Praja	30	1	90	20	141
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13	4	6	3	26
26	Kecamatan Manggar	6	8	7	7	28
27	Kecamatan Gantung	11	2	7	4	24
28	Kecamatan Dendang	9	2	8	7	26

29	Kecamatan kelapa kampit	11	5	6	9	31
30	Kecamatan Damar	10	4	4	4	22
31	Kecamatan Simpang Renggang	9	1	4	5	19
32	Kecamatan Simpang Pesak	3	7	7	5	22
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	3	11	9	27
34	UPT Puskesmas Manggar	8	48	7	26	89
35	UPT Puskesmas Gantung	16	51	7	17	91
35	UPT Puskesmas Dendang	17	23	5	13	58
37	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	10	58	12	16	96
38	UPT Puskesmas Mengkubang	10	44	8	14	76
39	UPT Puskesmas Renggang	7	33	11	22	73
40	UPT Puskesmas Simpang Pesak	20	31	11	10	72
41	UOBK RSUD Muhammd Zein	83	176	62	107	428
JUMLAH TOTAL ASN Pria dan Wanita		1017	1541	862	1036	4456
JUMLAH TOTAL PEGAWAI (PNS + PPPK)		2558		1898		4456

Sumber : BKPSDM Kab. Belitong Timur Akhir Semester Tahun 2025





ASN
BerAKHLAK

bangga
melayani
bangsa

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Ringkasan RPJMD
Kab. Belitong Timur

2.2 Perjanjian Kinerja



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Ringkasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 – 2029

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses strategis yang dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Proses ini bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan, prioritas program, serta alokasi sumber daya secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Perencanaan tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, serta penguatan daya saing daerah. Dengan demikian, dokumen perencanaan memiliki peran strategis sebagai pedoman

dalam mengarahkan pembangunan agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan daerah.

Pembangunan Kabupaten Belitung Timur merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Arah kebijakan nasional tersebut menitikberatkan pada pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, penguatan kemandirian pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur periode 2025–2029 menjadi momentum strategis dalam merumuskan kembali arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. RPJMD Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, sekaligus sebagai instrumen pengendali dan pengarah pembangunan yang adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis, tantangan global, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah, sekaligus menjadi acuan dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah secara terstruktur dan terukur.

2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Belitung Timur

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan strategis yang memberikan arah kebijakan dan pedoman

pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, maupun mitra pembangunan lainnya. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen konsolidasi untuk membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, konsisten, dan berkelanjutan.

RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran operasional dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur terpilih, yang diterjemahkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Melalui dokumen ini, visi kepala daerah tidak hanya menjadi pernyataan normatif, tetapi dikonkretkan dalam kerangka pembangunan yang terukur dan berorientasi pada hasil (outcome).

Secara strategis, RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 juga memiliki posisi penting sebagai tahapan pembangunan periode transisi menuju akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2045. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan RPJMD periode ini akan sangat menentukan pencapaian target pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJPD. Dengan kata lain, RPJMD 2025–2029 menjadi fondasi penguatan capaian pembangunan sekaligus akselerator dalam memastikan keberlanjutan transformasi daerah.

Adapun visi pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 yang menjadi arah utama pembangunan daerah adalah:

“BELTIM NYAMAN DAN BERKEMAJUAN”

Visi “Belitim Nyaman dan Berkemajuan” bukan sekadar slogan pembangunan, melainkan representasi arah transformasi daerah yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Setiap frasa dalam visi tersebut mengandung dimensi strategis yang menjadi landasan dalam perumusan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja pembangunan

daerah. Oleh karena itu, pemaknaan atas konsep “Nyaman” dan “Berkemajuan” perlu dipahami secara komprehensif agar menjadi pijakan yang konsisten dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan selama periode RPJMD 2025–2029.

Konsep “**Nyaman**” mengandung makna terwujudnya kondisi sosial yang aman, tertib, harmonis, dan inklusif, di mana masyarakat merasakan kepastian, ketenangan, serta kualitas pelayanan publik yang responsif. Dimensi ini menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, transparan, dan akuntabel, dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Kenyamanan daerah juga ditopang oleh stabilitas sosial, efektivitas pelayanan publik, serta optimalisasi potensi lokal berbasis inovasi dan daya saing.

Sementara itu, konsep “**Berkemajuan**” mencerminkan transformasi pembangunan yang berorientasi pada hasil (outcome), ditandai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan infrastruktur, peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Kemajuan dalam konteks ini tidak semata diukur dari aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Secara strategis, visi tersebut menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 diarahkan pada dua pilar utama, yaitu penguatan fondasi sosial-institusional dan percepatan transformasi ekonomi daerah. Penguatan fondasi sosial-institusional dilakukan melalui reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, peningkatan integritas aparatur, serta penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Adapun percepatan transformasi ekonomi diarahkan pada pengembangan potensi unggulan daerah, peningkatan investasi, penguatan UMKM, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Dengan demikian, visi “Belitim Nyaman dan Berkemajuan” menjadi landasan integratif yang memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian sasaran strategis RPJMD 2025–2029, serta mendukung tercapainya target pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang lebih tinggi.

Misi pembangunan daerah merupakan penjabaran operasional dari visi yang memuat rumusan umum mengenai langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi ideal sebagaimana digariskan dalam visi pembangunan. Misi berfungsi sebagai kerangka arah sekaligus batasan strategis dalam proses pencapaian tujuan pembangunan daerah, sehingga setiap kebijakan, strategi, dan program yang dirumuskan tetap berada dalam koridor pencapaian visi secara konsisten dan terukur.

Secara konseptual, misi menjembatani visi dengan tujuan dan sasaran pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan yang implementatif. Dengan demikian, misi tidak hanya menjadi pernyataan normatif, tetapi menjadi pedoman strategis dalam penyusunan perencanaan pembangunan, penganggaran, serta pengukuran kinerja pemerintah daerah.

Adapun rumusan misi pembangunan Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dan Misi pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran strategis dari visi “*Belitim Nyaman dan Berkemajuan*” yang memuat arah kebijakan dan langkah transformasi daerah selama lima tahun ke depan. Rumusan misi disusun untuk memastikan keterkaitan yang jelas antara visi, tujuan, sasaran, strategi, serta program pembangunan daerah, sehingga seluruh kebijakan yang dilaksanakan memiliki orientasi hasil (outcome), terukur, dan berkelanjutan. Melalui misi inilah prioritas pembangunan difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan infrastruktur, serta

pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Adapun ringkasan misi RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif.

Penguatan reformasi birokrasi dilakukan melalui penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, digitalisasi sistem pemerintahan, serta peningkatan profesionalisme aparatur. Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi kelembagaan, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam menciptakan pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif.

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, berbudaya, dan bahagia.

Peningkatan kualitas SDM diarahkan pada pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, serta penguatan nilai sosial budaya. Pembangunan manusia dilaksanakan secara inklusif dan berkeadilan guna menciptakan masyarakat yang produktif, berdaya saing, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

3. Mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan.

Transformasi ekonomi daerah difokuskan pada penguatan sektor unggulan berbasis potensi lokal, peningkatan nilai tambah produk, pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sinergi antar pemangku kepentingan. Pengembangan ekonomi perdesaan dan optimalisasi potensi desa menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas dan memadai untuk pemerataan kesejahteraan.

Penyediaan infrastruktur yang andal dan merata diarahkan untuk mendukung konektivitas wilayah, memperlancar aktivitas ekonomi, serta memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Pelaksanaannya tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

5. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian. Pendekatan pembangunan berkelanjutan menjadi landasan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup serta memastikan kebermanfaatannya bagi generasi kini dan mendatang.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan penjabaran operasional dari visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025–2029. Keduanya disusun secara sistematis sebagai instrumen pengarah dalam memastikan keterkaitan yang logis antara arah pembangunan jangka menengah dengan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Tujuan pembangunan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi, dengan mempertimbangkan isu strategis serta permasalahan pembangunan daerah. Perumusan tujuan dilakukan secara terarah dan berorientasi pada hasil (outcome), sehingga mampu mencerminkan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan.

Sementara itu, sasaran pembangunan merupakan penjabaran lebih spesifik dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran dirumuskan secara terukur dan dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai dasar evaluasi capaian pembangunan daerah. Dengan demikian, sasaran menjadi penghubung antara kebijakan strategis dengan implementasi program, sekaligus menjadi dasar dalam pengendalian dan penilaian kinerja pemerintah daerah.

Secara hierarkis, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur periode 2025–2029 dijabarkan ke dalam rumusan tujuan dan sasaran sebagai dasar operasional dalam penyusunan strategi, arah kebijakan, program, serta indikator kinerja utama. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah serta mencerminkan tingkat efektivitas pelaksanaan RPJMD secara keseluruhan.

Dalam rangka memastikan keterukuran dan akuntabilitas pencapaian pembangunan, setiap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dijabarkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang spesifik, terukur, relevan, dan terbatas waktu. IKU tersebut menjadi instrumen utama dalam memantau capaian kinerja pemerintah daerah serta sebagai dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dengan perangkat daerah. Melalui mekanisme cascading kinerja, target pembangunan diturunkan secara sistematis hingga ke level organisasi dan individu, sehingga tercipta keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan pendekatan ini, pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tidak hanya diukur dari realisasi program, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat sebagai hasil dari penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih merupakan penjabaran dari misi pertama yang diarahkan pada pembenahan manajemen penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Pencapaiannya dilakukan melalui:

- Penguatan sistem perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan, guna memastikan proses pembangunan berjalan efektif dan terukur.
- Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan fungsi pengawasan, sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
- Peningkatan kinerja serta koordinasi antar pemangku kepentingan, dalam rangka mendukung efektivitas pembenahan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.

Tujuan 2: Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat

Peningkatan kualitas hidup masyarakat difokuskan pada perbaikan kondisi lingkungan permukiman dan akses pelayanan dasar yang masih menjadi tantangan di Kabupaten Belitung Timur. Upaya yang dilakukan meliputi:

- Peningkatan akses terhadap sanitasi dan air minum yang aman dan layak sebagai bagian dari pemenuhan standar pelayanan dasar.
- Penguatan pelayanan persampahan dan peningkatan aksesibilitas wilayah, guna mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan produktif.
- Penanganan isu dan permasalahan lingkungan hidup secara terintegrasi, sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan

Tujuan 3: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi daerah diarahkan pada penguatan perekonomian lokal yang berdampak luas terhadap stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Pencapaiannya dilakukan melalui:

- Pengembangan sektor-sektor prioritas daerah, sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
- Optimalisasi potensi daerah, termasuk pengembangan sektor berbasis ekonomi biru, guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing daerah.
- Penguatan struktur ekonomi lokal secara berkelanjutan, untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berdaya tahan.

Tujuan 4: Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Merata

Pembangunan infrastruktur diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana yang layak, terjangkau, dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar. Upaya tersebut meliputi:

- Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur wilayah, guna mendukung konektivitas dan produktivitas masyarakat.
- Penyediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi dan pelayanan publik, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan.
- Pengembangan infrastruktur digital, termasuk akses internet di wilayah perdesaan, sebagai bagian dari upaya pemberdayaan desa dan transformasi pembangunan berbasis teknologi.

Tujuan 5: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada penanganan permasalahan pencemaran, termasuk dampak aktivitas penambangan timah, serta penguatan pembangunan berkelanjutan. Pencapaiannya dilakukan melalui:

- Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) sebagai bagian dari komitmen pembangunan rendah karbon.
- Penerapan tata kelola sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan, termasuk pengembangan ekonomi hijau.
- Pengendalian pencemaran, pengelolaan persampahan, perbaikan kualitas air, serta penegakan regulasi lingkungan, guna menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup.

Sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari tercapainya suatu tujuan. Rumusan sasaran dari Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 – 2029 berdasarkan misi dan tujuan adalah sebagai berikut :

Tujuan I : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran – sasaran yang perlu diwujudkan yaitu :

- Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan ;
- Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah ;

Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat

- Meningkatnya kualitas layanan pendidikan;
- Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi
- Meningkatnya kesejahteraan sosial dan budaya

Tujuan 3 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
- Meningkatnya pertumbuhan investasi
- Meningkatnya kesempatan kerja

Tujuan 4 : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Merata

- Meningkatnya konektivitas antar wilayah ; dan
- Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah

Tujuan 5 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

- Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

2.2 Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah serta kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu yang dilaksanakan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan, serta sumber daya yang tersedia. Dokumen ini menjadi instrumen strategis dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah berorientasi pada hasil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kinerja yang diperjanjikan tidak hanya terbatas pada capaian kegiatan dalam tahun berjalan, tetapi juga mencerminkan outcome yang seharusnya terwujud sebagai akumulasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam Perjanjian Kinerja termuat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil prioritas serta kondisi yang ingin dicapai, tanpa mengesampingkan indikator relevan lainnya sebagai pendukung pencapaian sasaran strategis daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi kepemimpinan di Kabupaten Belitung Timur yang berdampak langsung pada dinamika penyusunan Perjanjian Kinerja. Pada awal tahun, Perjanjian Kinerja masih mengacu pada arah kebijakan dan misi pembangunan masa jabatan 2021–2025 sebagai bagian dari penyelesaian target RPJMD Tahun 2021-2026 atau periode sebelumnya. Namun seiring dengan pelantikan Bupati terpilih masa jabatan 2025–2029, dilakukan penyesuaian melalui Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mencerminkan visi, misi, serta prioritas pembangunan yang baru.

Perubahan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif. Bupati terpilih menetapkan jumlah misi pembangunan yang lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya, yang menunjukkan adanya perluasan cakupan agenda pembangunan serta penajaman prioritas strategis daerah. Konsekuensinya, terjadi penyesuaian terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja utama, termasuk peningkatan target capaian pada sejumlah indikator prioritas.

Menariknya, peningkatan target tersebut berlangsung dalam kondisi keterbatasan fiskal daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Hal ini menuntut pengelolaan kinerja yang lebih efektif, efisien, dan inovatif agar target yang lebih ambisius tetap dapat dicapai dengan dukungan sumber daya yang relatif terbatas.

Dengan demikian, dalam satu tahun anggaran terdapat dua dokumen Perjanjian Kinerja yang berada dalam kerangka kebijakan berbeda namun tetap terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Kondisi ini mencerminkan adaptivitas manajemen kinerja pemerintah daerah dalam merespons transisi kepemimpinan secara konstitusional tanpa mengganggu kesinambungan pembangunan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang berlaku, antara lain RPJMD Tahun 2021–2026, dokumen Indikator Kinerja Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2021 sedangkan untuk Perjanjian Kinerja Perubahan mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029, dokumen IKU yang diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor : 42 tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berjalan, dengan penyesuaian terhadap perubahan arah kebijakan dan target kinerja pada masa jabatan baru. Tabel formulir Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada dokumen ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Tabel 2.1
Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Misi 1 : Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Pemerintah kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik			

Tujuan 1.1	Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	63,00	Nilai
1.1.1	Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	92,00 Sangat Tinggi (ST)	Persen Status
1.1.2	Meningkatkan kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70	Nilai
1.1.3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	BB	Nilai
Tujuan 1.2	Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien	Indeks Pelayanan Publik	3,80	Nilai Indeks
1.2.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	94,50	Nilai Kepatuhan
1.2.2	Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,60	Angka Indeks
Tujuan 1.3	Terwujudnya kelembagaan dan manajemen sumber daya aparatur yang efisien	Indeks Merit System	163	Nilai 100-400
1.3.1	Meningkatnya efektifitas kelembagaan Pemerintah Daerah	Indeks Kelembagaan	78,00	Persen
1.3.2	Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur	Indeks Profesionalisme ASN	72, 00	Skor 1-100
Misi 2 : Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahwan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja.				
Tujuan 2.1	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	72,60	Persen
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,35	Persen
2.1.1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	2,90	Persen
		Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun	0,14	Persen

2.1.2	Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi tahunan nasional (PMA/PMDN) berskala	402,814	Juta Rupiah
Tujuan 2.2	Meningkatnya perekonomian lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,50	Persen
		PDRB per kapita	68,29	Juta Rupiah
2.2.1	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi sektor unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	3,70	Persen
		Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	5,00	Persen
		Laju pertumbuhan PRDB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	11,90	Persen
2.2.2	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,00	Nilai 1-5
Misi 3 : Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitong Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan				
Tujuan 3.1	Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	73,33	Nilai Indeks
3.1.1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka harapan Lama Sekolah	11,70	Tahun
		Rara-Rata Lama Sekolah	8,95	Tahun
3.1.2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Kabupaten Sehat	Wistara	Predikat
Tujuan 3.2	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana	Indeks Infrastruktur wilayah	95.00	Nilai 1-100
		Daya Dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup	0,40	Nilai
3.2.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	98,78	Persen
		Indeks Infrastruktur pekerjaan umum	74.02	Nilai
		Indeks Infra struktur perumahan dan permukiman	76.52	Nilai
3.2.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,40	Nilai 1-100

		Indeks Resiko Bencana	168,40	Angka
Tujuan 3.3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Angka kemiskinan	5,88	Persen
		Indeks Gini	0,260	Nilai
3.3.1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Indeks kedalaman Kemiskinan	0,48	Angka
		Indeks Keparahan Kemiskinan	0,13	Angka
3.3.2	Terwujudnya Pemerataan Perlindungan dan jaminan sosial	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	97,50	Persen
		Proporsi peserta jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	85,00	Persen
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100	Persen

Tabel 2.2

**Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	
Misi 1: Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif				
1.1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	82,58	Nilai
1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	Nilai Sakip	70,01	Nilai
		Indeks SPBE	3,5	Nilai
		Indeks Profesionalisme ASN	80	Nilai
		Indeks Pelayanan Publik	4,05	Nilai
		Maturitas SPIP	3	Level
1.1.2	Meningkatkan kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	Predikat
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	83,71	Nilai
Misi 2: Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas produktif, Berakhlak, berbudaya dan bahagia.				
2.1	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	73,99	Nilai

2.1.1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Harapan Lama sekolah	11,79	Tahun
		Rata – rata lama sekolah	9,13	Tahun
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	85	Angka
2.1.2	Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi	Usia harapan hidup	73,04	Tahun
		Prevalansi stunting pada Balita	16,34	Persen
		Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of Undernourishment)	10,32	Persen
2.1.3	Meningkatnya kesejahteraan sosial dan budaya	Angka Kemiskinan	6,2	Angka
		Indeks pembangunan Kebudayaan	59,68	Nilai
		Indeks pembangunan gender	87,83	Nilai
		Indeks perlindungan anak	68,86	Nilai
		Indeks pembangunan pemuda	54,34	Nilai

Misi 3: Mempercepat Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan pariwisata, perikanan, kelautan, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan

3.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Indeks pertumbuhan ekonomi (LPE)	3,05	persen
		Produk domestik regional bruto perkapita	83.940,00	Ribu Rupiah
		Indonesia Blue economy index (IBEI)	26,49	Nilai
		Rasio gini	0,225	Nilai
3.1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	3.168.130	Juta rupiah
		PDRB penyediaan akomodasi makan minum	191.390	Juta rupiah
		PDRB industri pengolahan	1.146.850	Juta rupiah
		Tingkat inflasi	3±1	Persen
3.1.2	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	450.000	Juta rupiah
3.1.3	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	2.60	Persen

Misi 4: Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas dan memadai untuk pemerataan kesejahteraan

4.1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata	Indeks pembangunan infrastruktur wilayah	73,925	Nilai
4.1.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio konektivitas antar wilayah	75,83	Angka

4.1.2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Indeks infrastruktur wilayah	72.02	Nilai
Misi 5: Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan				
5.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Penurunan intensitas Emisi GRK	17,67	Persen
5.1.1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,34	Nilai
		Indeks Risiko Bencana	152,06	Angka





BAB III

3.1 Capaian Kinerja Pemerintah
Kab. Belitong Timur
Tahun 2025

3.2 Analisis Capaian Kinerja
Pemerintah Kabupaten
Belitong Timur

3.3 Akuntabilitas Keuangan
Pemerintah Kabupaten
Belitong Timur

3.4 Penghargaan yang diterima



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian laporan kinerja Kabupaten Belitung Timur dilakukan dengan perbandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target yang telah diperjanjikan awal tahun anggaran pada setiap tahunnya.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dasar yang dipergunakan sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% $\leq$ 100%	Sangat tinggi	
2	76 % $\leq$ 90%	Tinggi	
3	66 % $\leq$ 75%	Sedang	
4	51 % $\leq$ 65%	Rendah	
5	$\leq$ 50 %	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri No 86 Tahun 2017

3.1 Capaian Kinerja Indikator Utama Tahun 2025.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran terlaksananya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Kabupaten Belitung Timur dan memuat pengukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Dengan demikian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian sasaran diperoleh melalui kerangka pengukuran kinerja dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 menetapkan 11 (sebelas) sasaran dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja, yang diperjanjikan pada tahun 2025 adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) indikator. Pencapaian indikator sasaran kinerja untuk masing-masing misi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur adalah:

Tabel 3.1-1
Capaian Kinerja

Misi	Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Satuan	Target 2025	Capaian Kinerja 2025 (Per Indikator)	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Capaian Kinerja (Per Sasaran)
1) Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif.	[1.1] Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	82,58	81,99	99,29	99,29
	[1.1.1]Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	1	Nilai SAKIP	Nilai	70,01 (BB)	68,95	98,49	102,05
		2	Indeks SPBE	Nilai	3,5	4,16	118,86	
		3	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	80	81,56	101,95	
		4	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,05	4,51	111,36	
		5	Maturitas SPIP	Level	3	2,468	79,61	
	[1.1.2]Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	6	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100	93
		7	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	83,71	71,49	86	
2) Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas produktif, berakhlak, berbudaya, dan bahagia.	[2.1] Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,98	73,99	100	100
	[2.1.1] Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	8	Harapan Sekolah Lama	Tahun	11,79	11,78	99,92	74,78
		8	Rata-Rata Sekolah Lama	Tahun	9,13	9,03	98,90	
		10	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	85	21,7	25,53	
		11	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,04	74,12	101,48	

	2.1.2] Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi	12	Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	16,34	16,34 (th 2024)	100	97,69	
		13	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	10,32	9,37	91,59		
	[2.1.3] Meningkatkan kesejahteraan sosial dan budaya	14	Angka Kemiskinan	Angka	6,20	6,69	92,10	100,80	
		15	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	59,68	60,74	101,77		
		16	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	87,83	88,58	100,86		
		17	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	68,86	72,57	105,39		
		18	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	54,34	58,17	103,87		
	3) Mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan , pariwisata, perikanan, kelautan, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan	[3.1] Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	3,05	4,30	140,98	107,25
			2	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	Ribu Rupiah	83.940,00	82.608,71	98,41	
			3	Indonesia Blue Economy (IBEI)	Nilai	26,49	26,49	100	
4			Rasio Gini	Nilai	0,225	0,251	89,64		
[3.1.1] Meningkatkan pertumbuhan ekonomi		19	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Juta Rupiah	3.168.130	1.666,81	52,61	90,49	
		20	PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	Juta Rupiah	191.390	196,15	102,48		
		21	PDRB Industri Pengolahan	Juta Rupiah	1.146.850	1.107,42	96,56		
		22	Tingkat Inflasi	Persen	3±1	2,69	110,34		
[3.1.2] Meningkatkan pertumbuhan investasi		23	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Juta Rupiah	450.000	1.073.894,75	238,64	238,64	
[3.1.3] Meningkatkan kesempatan kerja		24	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.60	3.05	82,70	82,70	
4) Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas dan memadai untuk pemerataan kesejahteraan	[4.1] Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata	1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Nilai	73,925	71,17	96,27	96,27	
	[4.1.1] Meningkatkan konektivitas antar wilayah	25	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Angka	75,83	74,8	98,6	98,6	
	[4.1.2] Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah	26	Indeks Infrastruktur Wilayah	Nilai	72,02	67.55	93,79	93,79	
5) Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang	[5.1] Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	17,67	N/A	N/A	N/A	

bijaksana dan berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	[5.1.1] Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	76,34	76,27	99,91	117,62
		28	Indeks Risiko Bencana	Angka	152,06	112,36	135,33	

Tabel 3.1-2
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Kinerja

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
Misi 1 (7 Indikator Kinerja)			
1	Sangat Tinggi	4	14,28
2	Tinggi	2	7,14
3	Sedang	-	-
Misi 2 (11 Indikator Kinerja)			
1	Sangat Tinggi	11	39,28
2	Tinggi	-	-
3	Sedang	-	-
4	Sangat Rendah	1	3,58
5	Tidak ada data	-	-
Misi 3 (6 Indikator Kinerja)			
1	Sangat Tinggi	4	14,28
2	Tinggi	1	3,58
3	Sedang	-	-
4	Rendah	1	3,58
Misi 4 (2 Indikator Kinerja)			
1	Sangat Tinggi	2	7,14
2	Tinggi	-	-
3	Sedang	-	-
4	Tidak ada data	-	-
Misi 5 (2 Indikator Kinerja)			
1	Sangat Tinggi	2	7,14
2	Tinggi	-	-
3	Sedang	-	-

Berdasarkan tabel persentase capaian indikator di atas, sebanyak 28 indikator termasuk kategori sangat tinggi dalam pencapaian target kinerja, terbanyak pada misi 2, yaitu sejumlah 9 indikator, antara lain :

1. (2.1.1) Meningkatnya kualitas layanan pendidikan:
 - 1) Harapan Lama Sekolah.
 - 2) Rata-Rata Lama Sekolah.
2. (2.1.2) Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi:
 - 1) Usia Harapan Hidup.
 - 2) Prevalensi Stunting pada Balita

- 3) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)
- 3. (2.1.3) Meningkatkan kesejahteraan sosial dan budaya
 - 1) Angka Kemiskinan.
 - 2) Indeks Pembangunan Gender
 - 3) Indeks Perlindungan Anak
 - 4) Indeks Pembangunan Pemuda.
- 4. (3.1.1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
 - 1) PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum
 - 2) PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum
 - 3) PDRB Industri Pengolahan
 - 4) Tingkat Inflasi.
- 5. (3.1.2) Meningkatnya pertumbuhan investasi
 - 1) Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)
- 6. (4.1.1) Meningkatnya konektivitas antar wilayah
 - 1) Rasio Konektivitas Antar Wilayah
 - (4.1.2) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah
 - 1) Indeks Infrastruktur Wilayah
- 7. (5.1.1) Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
 - 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
 - 2) Indeks Risiko Bencana

Selain sasaran dan indikator dengan capaian target kinerja sangat baik di atas, terdapat beberapa indikator yang belum optimal dalam pencapaian target kinerja. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Indikator Utama Tahun 2025:

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kegiatan, seberapa jauh efektifitas penggunaan anggaran untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, serta seberapa jauh tingkat efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang ada. Pengukuran

kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua macam:

- Indikator bermakna positif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek. Indikator ini diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

- Indikator bermakna negatif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi berarti semakin baik kinerjanya. Indikator ini diukur dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

Pengukuran dilakukan terhadap akuntabilitas kinerja dan keuangan. Pengukuran akuntabilitas keuangan dapat dilihat pada Lampiran II. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut:

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dilakukan terhadap akuntabilitas kinerja dan keuangan berdasarkan Perjanjian Kinerja Bupati Belitung Timur Tahun 2025. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif.

Tujuan 1: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Tujuan 1.1 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

Ketercapaian Sasaran:

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian target dan realisasi sasaran dengan Indikator Reformasi Birokrasi disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2-1
Pengukuran Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas
tata kelola pemerintahan

Indikator		Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024(%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)			
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	61	82,58	136	82,58	81,99	99,29	99,29	85	96,46
Jumlah					138			99,29			96,46

Catatan: Realsasi tahun 2025 merupakan hasil penilaian sementara.

Reformasi Birokrasi**a. Penjelasan:**

Tahun 2025 merupakan periode transisi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Nasional untuk itu sebagai pedoman dalam melaksanakan Refomasi Birokrasi telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025.

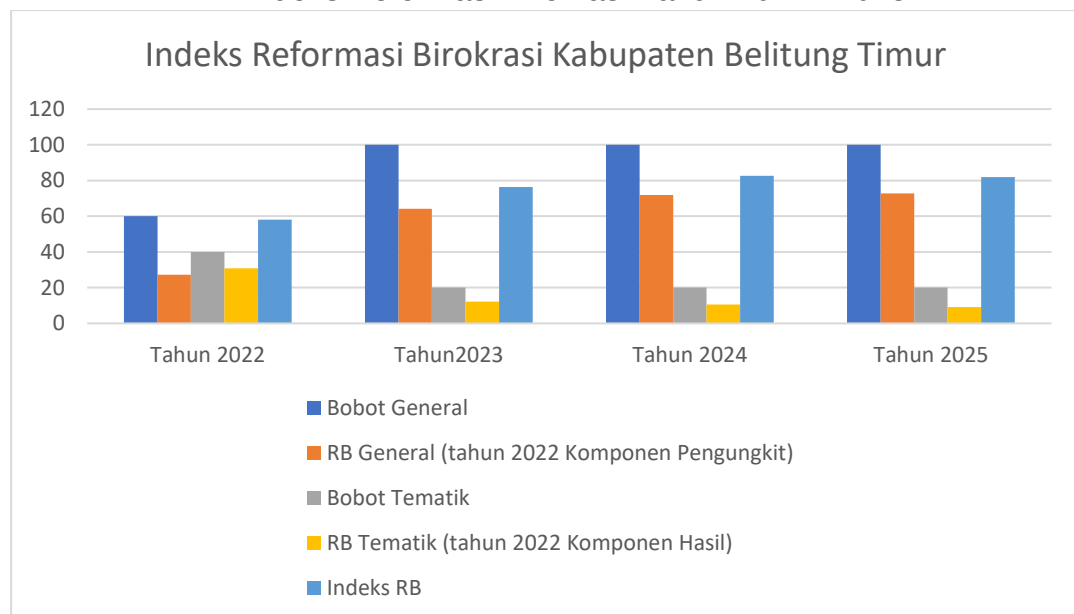
Reformasi Birokrasi merupakan salah satu prioritas nasional yang tercantum dalam dokumen Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Dalam mewujudkan birokrasi kompetitif yang berkelas dunia untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 telah ditetapkan konsep transformasi tata kelola pemerintahan digital yang menjadi sebuah langkah strategis dan prioritas dalam proses pembangunan nasional jangka menengah.

Terkait dengan hal diatas, pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi sebagai langkah untuk mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan RB dapat berjalan selaras dengan arah kebijakan pada program dan kegiatan RPJMD Kabupaten Belitung Timur.

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja:

Pencapaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 adalah 82,58 dengan kategori “A-“ dan penilaian sementara pada tahun 2025 adalah 81,99 atau turun 0,59 dari Tahun sebelumnya. Hasil evaluasi atau penilaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.2-1
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022 - 2025



Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025 adalah 81,99 dengan predikat A- hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2026, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2-2
Hasil Evaluasi
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2023 – 2025

Penilaian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 (sementara)
RB General Awal	64,20	71,91	72,83
RB General	64,20	71,91	72,83
Total Bobot RB General	100	100	100
Bobot RB General Penyesuaian	100	100	100
RB General Penyesuaian	64,2	71,91	72,83
RB Tematik	12,24	10,67	9,16
Indeks RB	76,44	82,58	81,99

Analisis terhadap penurunan capaian hasil evaluasi indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 terjadi karena adanya penurunan capaian Maturitas SPIP dari level 3 (3.021) menjadi level 2 (2,468) atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 2 (Berkembang). Selain itu juga Pemerintah kabupaten Belitung Timur belum melakukan penyusunan arsitektur SPBE sesuai standar.

c. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan) :

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terus melakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur, dengan melakukan:
 - Melakukan pendampingan untuk peningkatan kompetensi SDM dengan narasumber dari Instansi Pembina masing-masing;
 - Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan
 - Asistensi terkait dengan penyusunan SAKIP,
 - Asistensi terkait dengan Zona Integritas,
 - Mengikuti seminar dan sosialisasi yang dilaksanakan melalui daring (menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah).
2. Penguatan regulasi kebijakan, dengan melakukan:

Pada tahun 2025, hasil evaluasi Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berada di 83,17 dengan kategori Baik, hal ini menggambarkan bahwa komitmen kuat dalam pengembangan kebijakan yang lebih baik, inklusif, dan berpihak pada masyarakat. Selain itu terdapat beberapa kebijakan yang langsung dilakukan pada kegiatan

- Penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2025 dan ditetapkan dengan Surat Pernyataan Keabsahan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.
 - Menyusun kebijakan yang mengatur pelaksanaan program dan kegiatan (contoh: Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pengendalian Kecurangan).
3. Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi:
- Melakukan pengawasan terhadap jalannya reformasi birokrasi dengan melaporkan capaian pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi secara berkala.
 - Melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait dengan pengisian kertas kerja dan data dukung dalam rangka persiapan pengusulan Zona Integritas.

Adapun program yang mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdapat di seluruh Perangkat Daerah (Pengampu RB General dan RB Tematik), namun fasilitasi dan koordinasi kebijakan serta monitoring terdapat di Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah yaitu melalui program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penataan Organisasi, Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan kegiatan:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal , dengan sub kegiatan:

1) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan kegiatan:

- a. Kegiatan Pendampingan dan asistensi, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.

Sasaran 1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan

Tabel 3.2-3
Pengukuran Sasaran Strategis “Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan”

Indikator		Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun	Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024(%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2025			
1	Nilai SAKIP	Nilai	70,01 (BB)	66,37	93,40	70,01	68,95	98,49	98,49	75,50	91,33
2.	Indeks SPBE	Nilai	3,56	4,16	116,85	3,5	4,16	118,86	118,86	4	104
3	Indeks Profesional ASN	Nilai	71,53	79,03	110,49	80	81,56 (Tinggi)	101,95	101,95	81	100,69
4	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,65	4,01	110	4,05	4,51	111,36	111,36	4,30	104,89
5	Maturitas SPIP	Level	2	3,10	100	3,10	2,468	79,61	79,61	3	82,26
Jumlah					106,14			102,05			96,63

1. Nilai SAKIP

a. Penjelasan:

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data pengklarifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Analisis Peningkatan/ penurunan kinerja:

Implementasi akuntabilitas kinerja Pemerintah kabupaten Belitung Timur sudah menunjukkan kinerja yang “Baik” namun masih perlu perbaikan. Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sudah melakukan upaya perbaikan diantaranya:

1. Menyusun pohon kinerja berdasarkan RPJMD 2025-2029;
2. Melakukan identifikasi crosscutting kinerja berdasarkan sasaran daerah;
3. Melakukan identifikasi crosscutting kinerja perangkat Daerah;
4. Melakukan input data capaian kinerja per tri wulan pada aplikasi E-Monev;
5. Memanfaatkan data kinerja dalam pengambilan keputusan penentuan skala prioritas program, refocusing anggaran dan penyusunan kebijakan umum anggaran di tahun berikutnya;
6. Melakukan orientasi perencanaan tahun $n+2$ di akhir tahun berjalan, agar perangkat daerah segera menyiapkan laporan kinerja tahunan sebagai dasar penyusunan perencanaan tahun $n+2$ dan perubahan rencana di tahun $n+1$;
7. Menyusun laporan hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah dengan melakukan revidi berjenjang, pembahas internal tim dan antar tim;
8. Memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang memperoleh penilaian SAKIP tertinggi sebagai bentuk implementasi reward and punishment sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara.

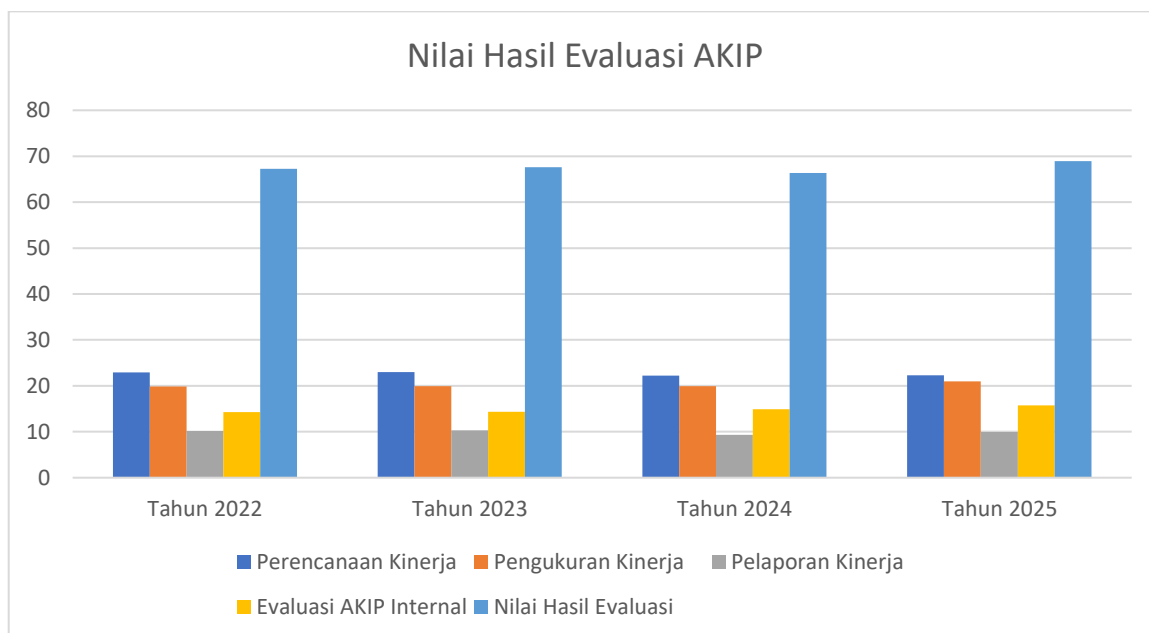
Hal diatas merupakan sebagian kecil dari tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terhadap

rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2025. Jika dilihat dari hasil evaluasi pada tahun 2025 dengan nilai 68,95, terdapat kenaikan sebanyak 2,58 point dari tahun sebelumnya yaitu dengan nilai 66,37. Rincian hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja tahun 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2-4
Komposisi Penilaian SAKIP

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
		2024	2025
a. Perencanaan Kinerja	30	22,24	22,32
b. Pengukuran Kinerja	30	19,91	20,95
c. Pelaporan Kinerja	15	9,32	9,96
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,90	15,72
Nilai Hasil Evaluasi	100	66,37	68,95
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Grafik 3.2-2
Hasil Penilaian Akuntabilitas dari Tahun 2022 -2025



Tidak tercapainya target pada indikator nilai SAKIP dikarenakan Terdapat indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART

(specific, measurable, achievable, relevant and time-bound) dan belum berorientasi hasil, serta belum optimalnya penggunaan aplikasi e monev (perlu penambahan fitur - fitur yang mampu mendorong pemanfaatan aplikasi dalam pengukuran kinerja). Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Belitong Timur belum memberikan reward and punishment (penghargaan dan sanksi) kepada perangkat daerah yang didasarkan atas kinerja.

c. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan):

Terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti pada tahun 2026 ini, diantaranya:

1. Akan menyusun identifikasi potensi adanya crosscutting secara spesifik dan bentuk kolaborasi antar PD dan pihak-pihak terkait dalam mencapai kinerja organisasi;
2. Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan yang belum SMART dan belum berorientasi hasil;

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan SAKIP, yaitu:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah:
 - Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.
 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan.
 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang.
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah:
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan.
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya).
2. Program Penataan Organisasi:
 - Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
3. Program Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan:

- Kegiatan Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan.

2. Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat.

a. Penjelasan:

Pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Metode penilaian menggunakan pengukuran tingkat kematangan melalui evaluasi mandiri dan eksternal (meliputi telaah dokumen, wawancara, dan observasi), yang kemudian divalidasi oleh Kementerian PANRB.

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Kabupaten Belitong Timur meraih Indeks SPBE sebesar 4,16 dengan predikat Sangat Baik. Mengingat Kabupaten Belitong Timur tidak menjadi lokus pemantauan dan evaluasi pada tahun 2025, maka capaian kinerja tahun ini tetap mengacu pada hasil tahun 2024. Dengan target indeks tahun 2025 sebesar 3,50, realisasi kinerja tercapai sebesar 118,86%. Rincian kategori predikat Indeks SPBE adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2-5
Predikat Indeks SPBE

No.	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Domain dan aspek serta bobot penilaian Indeks SPBE terdiri dari :

- a. Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE (13,00%)
 - Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata kelola SPBE (13,00%)
- b. Domain 2 – Tata Kelola SPBE (25,00%)
 - Aspek 2 – Perencanaan Strategis (10,00%)
 - Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi (10,00%)
 - Aspek 4 – Penyelenggara SPBE (5,00%)
- c. Domain 3 - Manajemen SPBE (16,50%)
 - Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE (12,00%)
 - Aspek 6 – Pelaksanaan Audit SPBE (4,50%)
- d. Domain 4 – Layanan SPBE (45,50%)
 - Aspek 6 – Layanan Adm.Pemerintahan Berbasis Elektronik (27,50%)
 - Aspek 7 – Layanan Publik Berbasis Elektronik (18,00%)

Dari proporsi penilaian tersebut dapat dilihat bahwa setiap domain memiliki persentase nilai dan yang terbesar terdapat pada Domain Layanan SPBE. Hal ini sejalan dengan indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dimana harus meningkatkan layanan berbasis elektronik di Kabupaten Belitong Timur baik administrasi pemerintahan maupun publik.

Adapun nilai indeks SPBE tahun 2024 hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB berdasarkan domain dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2.6**Hasil Evaluasi Berdasarkan Domain**

Domain Kebijakan SPBE	4.00
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	4.00
Domain Tata Kelola SPBE	4.20
Perencanaan Strategis SPBE	3.25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	5.00
Penyelenggara SPBE	4.50
Domain Manajemen SPBE	3.09
Penerapan Manajemen SPBE	3.25
Audit TIK	2.67
Domain Layanan SPBE	4.57
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4.40
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4.83
INDEKS SPBE 2024	4.16

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja:

Capaian kinerja tahun 2025 telah berhasil melampaui target yang ditetapkan. Mengingat tahun ini tidak dilakukan evaluasi ulang, maka capaian Indeks SPBE tahun 2025 tetap mengacu pada peningkatan signifikan yang telah diraih pada evaluasi tahun 2024 dengan predikat Sangat Baik. Perbandingan hasil penilaian tahun 2024 dan 2025 berdasarkan domain disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2-7**Perbandingan Nilai Indeks SPBE**

Domain SPBE	Indeks Tahun 2024	Indeks Tahun 2025
Kebijakan	4,0	4,0
Tata Kelola	4,20	4,20
Manajemen	3,09	3,09
Layanan	4,57	4,57
Indeks SPBE	4,16	4,16

Berdasarkan perbandingan tersebut, terlihat bahwa capaian nilai pada setiap domain berhasil dipertahankan secara konsisten dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kontribusi nilai yang dominan pada domain

Tata Kelola dan Layanan SPBE. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan kebijakan, tata kelola, dan manajemen SPBE telah berjalan stabil dan efektif.

Meskipun predikat 'Sangat Baik' telah diraih, evaluasi mendalam menunjukkan masih terdapat ruang strategis untuk optimalisasi menuju predikat 'Memuaskan'. Beberapa faktor kunci dan langkah strategis yang perlu disiapkan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang antara lain:

1. Penguatan Tata Kelola SPBE: Perlunya reviu mendalam terhadap Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, serta melakukan inovasi proses bisnis agar lebih terintegrasi.
2. Optimalisasi Manajemen SPBE: Fokus perbaikan pada aspek manajemen keamanan informasi, manajemen perubahan, dan peningkatan kompetensi SDM, serta pelaksanaan audit keamanan SPBE yang lebih komprehensif.
3. Pemanfaatan Tools Arsitektur: Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIA-SPBE untuk penyusunan Arsitektur SPBE yang lebih berkualitas.
4. Ekstensifikasi Layanan: Memaksimalkan cakupan dan kualitas pelaksanaan layanan SPBE, khususnya pada layanan publik berbasis elektronik agar lebih berdampak bagi masyarakat.
5. Peningkatan Kapabilitas SDM: Mengatasi keterbatasan jumlah ASN yang memiliki kompetensi teknis TIK melalui pelatihan intensif dan sertifikasi.

c. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan):

Guna mengakselerasi pencapaian target kinerja serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE di tahun mendatang, telah dirumuskan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Kolaborasi Ekosistem SPBE: Mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pelaksanaan SPBE, khususnya dalam proses reviu Arsitektur SPBE dan pemutakhiran Peta Rencana SPBE agar lebih terintegrasi.

2. Optimalisasi Tata Kelola dan Manajemen: Melakukan perbaikan berkelanjutan pada aspek tata kelola dan manajemen SPBE yang teridentifikasi belum optimal, guna memastikan standar operasional prosedur berjalan efektif.
3. Peningkatan Kualitas Layanan & Kompetensi SDM: Meningkatkan kualitas Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik melalui percepatan digitalisasi proses bisnis. Upaya ini dibarengi dengan pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis TIK yang intensif.
4. Pengembangan Infrastruktur TIK: Meningkatkan kapasitas dan jangkauan infrastruktur SPBE untuk menjamin keandalan serta kemudahan akses layanan digital bagi masyarakat.
5. Penguatan Koordinasi dan Pengawasan: Mengintensifkan fungsi koordinasi internal Tim Koordinasi SPBE serta memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi penerapan SPBE secara berkala.

Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2-8
Analisis Capaian Indikator Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan
Realisasi Akumulasi Tahun 2025 dibandingkan Target RPJMD 2029

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Indeks SPBE	Nilai	4,16	3,75	110,94

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Indeks SPBE secara akumulatif sampai dengan tahun 2025 sebesar 4,16 telah berhasil melampaui target akhir Renstra tahun 2026 yang

ditetapkan sebesar 3,00. Dengan persentase capaian sebesar 138,67%, indikator ini menunjukkan akselerasi kinerja yang sangat positif karena target jangka menengah telah tercapai dua tahun lebih cepat.

Meskipun target akhir telah terlampaui, upaya strategis dan inovatif tetap diperlukan untuk mempertahankan konsistensi kinerja maupun meningkatkan kualitas capaian. Ke depannya, perlu dilakukan evaluasi terhadap penetapan target kinerja, dengan fokus mempertahankan predikat Sangat Baik atau berupaya meningkatkannya menuju predikat Memuaskan.

Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Belitong Timur, khususnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian eksternal Kementerian PANRB. Langkah ini krusial untuk memastikan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik terus berkembang dan memberikan dampak nyata bagi kualitas pelayanan publik.

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang menunjang capaian Sasaran 1.1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan adalah :

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik.

Melalui kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

2. Program Aplikasi dan Informatika.

Melalui kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Melalui kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Melalui kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Indeks Profesional ASN

a. Penjelasan:

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan yang ditetapkan secara nasional oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Nilai indeks ini menggambarkan sejauh mana ASN;

- bekerja sesuai kompetensi jabatan,
- memiliki kualifikasi pendidikan yang relevan,
- menunjukkan kinerja yang terukur, dan
- menaati nilai dasar, kode etik, serta disiplin ASN.

Perhitungan Indeks Profesionalisme ASN didasarkan pada 4 (empat) dimensi utama, masing-masing memiliki bobot nilai tertentu:

Tabel 3.2-9

Tabel Perhitungan Indeks Profesionalisme ASN

Dimensi	Bobot (5)	Komponen yang dinilai
Kualifikasi	25	Tingkat Pendidikan ASN sesuai syarat jabatan
Kompetensi	30	Sertifikasi, diklat teknis, fungsional, dan manajerial yang relevan
Kinerja	40	Capaian sasaran kinerja pegawai (SKP) dan perilaku kerja
Disiplin	5	Ketepatan waktu, kepatuhan terhadap peraturan, dan tidak adanya hukuman disiplin

Rumus penghitungan:

$$\text{Nilai IP ASN} = \left(\sum_{i=1}^4 (\text{Nilai Dimensi}_i \times \text{Bobot Dimensi}_i) \right)$$

Keterangan:

- Satuan: Nilai.

Nilai IP ASN (Skor 0-100) angka yang menunjukkan ngkat profesionalitas ASN.

- Nilai Dimensi adalah skor yang diperoleh dari hasil penilaian BKN untuk masing-masing dimensi (Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Kedisiplinan).
- Bobot Dimensi adalah persentase bobot yang ditetapkan oleh BKN.
- Nilai akhir IP ASN dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.2-10

Tabel Rentang Nilai IP ASN

Kategori Nilai	Rentang Nilai	Keterangan
Sangat Tinggi	91-100	ASN professional secara menyeluruh
Tinggi	81-90	ASN memenuhi sebagian besar unsur profesionalitas
Sedang	71-80	ASN perlu peningkatan kompetensi dan disiplin
Rendah	61-70	ASN perlu peningkatan kompetensi dan disiplin
Sangat rendah	≤ 60	ASN belum memenuhi standar profesionalitas

Perbandingan target dan realisasi:

Pada tahun 2024, target sebesar 72 tercapai dengan realisasi 79,03 (109,76%). Pada tahun 2025, target disesuaikan menjadi 80 dan berhasil dicapai 101,95%. Dengan nilai 81,56. BKPSDM Kabupaten Belitong Timur berada pada kategori Tinggi secara nasional. Dengan capaian 81,56 pada tahun 2025, Indeks Profesionalisme ASN di Kabupaten Belitong Timur berada pada kategori Tinggi, yang menunjukkan bahwa ngkat profesionalitas ASN telah memenuhi standar yang baik dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja:

Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, nilai Indeks Profesionalisme ASN mengalami peningkatan dari 79,03 menjadi 81,56 atau meningkat sebesar 2,53 poin. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Peningkatan pengembangan kompetensi ASN, baik melalui pendidikan dan pelatihan teknis, manajerial, maupun fungsional;
- Perbaikan sistem penilaian kinerja ASN, melalui implementasi manajemen kinerja yang lebih terukur dan terintegrasi dengan sasaran organisasi;
- Peningkatan kedisiplinan ASN, yang tercermin dari menurunnya pelanggaran disiplin ASN; dan
- Peningkatan kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan jabatan, melalui pengelolaan karier ASN yang lebih terarah.

Selain itu, implementasi sistem merit dalam manajemen ASN juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan profesionalitas ASN secara keseluruhan.

c. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan):

Untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai Indeks Profesionalisme ASN pada tahun-tahun berikutnya, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain:

- Peningkatan program pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan organisasi.
- Penguatan implementasi manajemen talenta, sebagai bagian dari penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.
- Optimalisasi manajemen kinerja ASN, dengan menyelaraskan kinerja individu dengan kinerja organisasi.
- Peningkatan pembinaan disiplin ASN, guna menjaga profesionalitas dan integritas aparatur.
- Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian secara terintegrasi, untuk meningkatkan akurasi data ASN serta mendukung pengambilan keputusan dalam manajemen ASN.

Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan Indeks Profesionalisme ASN Kabupaten Belitung Timur dapat terus meningkat pada periode mendatang dan mendukung terwujudnya ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4. Indeks Pelayanan Publik

a. Penjelasan:

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat IPP adalah hasil pengukuran yang diperoleh dari PEKPPP.

PEKPPP adalah upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks pelayanan publik.

Tujuan PEKPPP adalah:

- a. Memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan;
- b. Mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik;
- c. Melakukan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik secara berkala; dan
- d. Memberikan penghargaan kepada Pembina, Penyelenggara, dan/atau Unit Lokus yang berprestasi.

Aspek Evaluasi meliputi:

1. Kebijakan Pelayanan, yaitu: Standar Pelayanan, Forum Konsultasi Publik, Maklumat Pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat.
2. Profesionalisme SDM, yaitu : Waktu Pelayanan, Kode Etik, Motivasi, Penghargaan, Budaya Pelayanan.
3. Sarana Prasarana, yaitu : Parkir, Ruang Tunggu, Toilet, Sarpras Khusus dan Penunjang, serta Front Office.
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik, yaitu : ketersediaan berbagai media informasi, berkualitas dan keberlanjutan pemutakhiran data, dan
5. Konsultasi Pengaduan, yaitu : ketersediaan sarana prasarana pengaduan, akuntabilitas dan tindaklanjut penanganan pengaduan.
6. Inovasi, yaitu : Penciptaan kelembagaan, Sumber Daya dan strategi keberlanjutan.

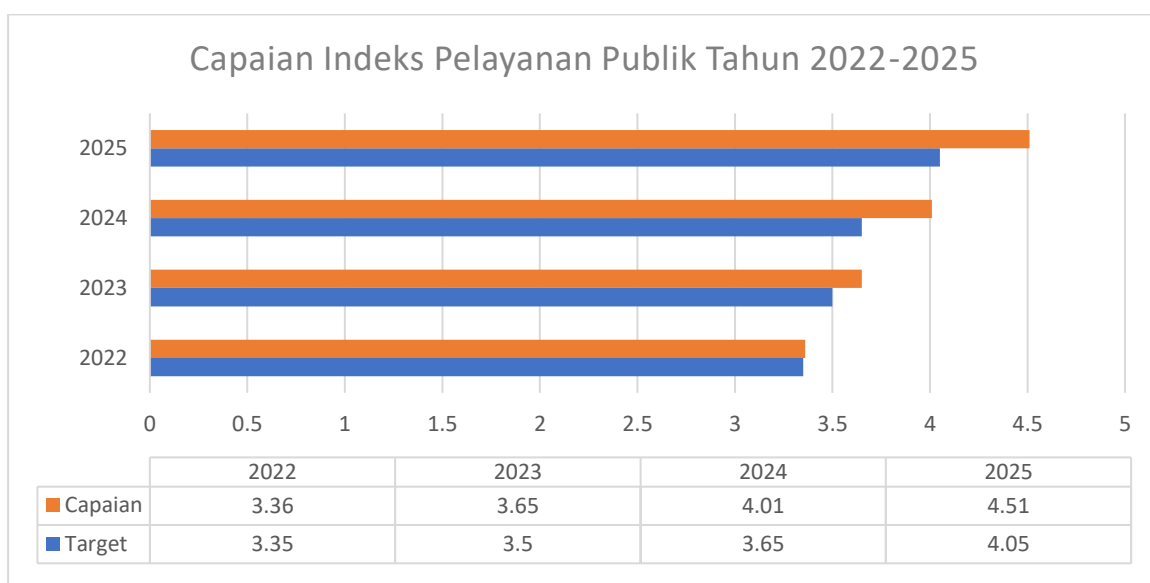
Locus Evaluasi PEKPPP KEMENPANRB tahun 2025 antara lain :

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
- Dinas Pendidikan.

Berdasarkan Kepmenpan RB Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Daerah Tahun 2025. Kabupaten Belitung Timur dengan Nilai sebesar **4,51** dengan Kategori **A** berada pada urutan nomor 55 dari 415 Kabupaten yang dievaluasi. Peringkat pertama diraih oleh Kabupaten Sumedang dengan Nilai IPP Kabupaten 4,72 Kategori A.

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja:

Grafik perbandingan perolehan capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Belitung Timur dari tahun 2022-2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 3.1 Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022-2025

Berdasarkan data capaian dan target Indeks Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2022–2025, terdapat tren peningkatan yang konsisten baik pada aspek target maupun realisasi. Hal ini menunjukkan adanya komitmen berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara kuantitatif, capaian IPP mengalami kenaikan dari 3,36 pada tahun 2022 menjadi 4,51 pada tahun 2025. Peningkatan ini bersifat progresif dengan laju pertumbuhan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Pada

periode 2022–2023 kenaikan sebesar 0,29 poin, periode 2023–2024 sebesar 0,36 poin, dan periode 2024–2025 meningkat sebesar 0,50 poin. Pola ini menunjukkan adanya akselerasi perbaikan kinerja, bukan sekadar peningkatan linear.

Dari sisi pencapaian terhadap target, realisasi IPP selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Selisih capaian terhadap target pada tahun 2022 sebesar +0,01 poin, meningkat menjadi +0,15 pada tahun 2023, +0,36 pada tahun 2024, dan +0,46 pada tahun 2025. Tren selisih yang semakin besar mengindikasikan bahwa kinerja pelayanan publik tidak hanya memenuhi ekspektasi perencanaan, tetapi juga melampauinya secara signifikan.

c. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan):

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cara :

1. Melakukan fasilitasi dan pendampingan penyusunan serta review dokumen wajib pelayanan publik berupa: Standar Pelayanan, Forum Konsultasi Publik, Dokumen Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur dan Survei Kepuasan Masyarakat;
2. Mendorong penciptaan integrasi layanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Penguatan fungsi layanan kepada kelompok rentan dan inklusi;
4. Mendorong pengembangan dan pelembagaan inovasi pelayanan publik;
5. Melakukan pembinaan dan penguatan penanganan pengaduan pelayanan publik;
6. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang berhasil meningkatkan pelayanannya; dan
7. Terus melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN RB, Ombudsman Republik Indonesia dan Instansi lainnya dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pemenuhan kewajiban pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan peraturan turunannya.

Pada tahun 2025 selain dilakukan PEKPPP KEMENPANRB juga dilakukan pengukuran secara Mandiri. Hal ini sesuai dengan Ketentuan lebih lanjut mengenai PEKPPP diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Tabel 3.2-11

Lokus PEKPPP Mandiri Tahun 2025 antara lain

No	Nama Perangkat Daerah / Unit Pelaksana Teknis
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
3.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur
4.	Kecamatan Manggar
5.	UPT RSUD Muhammad Zein
6.	UPT Puskesmas Gantung
7.	UPT Puskesmas Kelapa Kampit
8.	UPT Puskesmas Manggar
9.	UPT Puskesmas Mengkubang

Berdasarkan verifikasi dan hasil evaluasi melalui <https://evaluasi.menpan.go.id>, Hasil Penilaian PEKPPP Mandiri Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2-12

Tabel Indeks Perangkat Daerah Kab. Belitung Timur

No	Nama Lokus	Indeks Pelayanan Publik	Kategori
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	3,24	B-
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	4	A-
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	4,38	A
4	Kecamatan Manggar	3,92	A-
5	UPT RSUD Muhammad Zein	3,95	A-

6	UPT Puskesmas Gantung	2,57	C
7	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	4,53	A
8	UPT Puskesmas Manggar	4,71	A
9	UPT Puskesmas Mengkubang	4,75	A
	NILAI KABUPATEN BELITUNG TIMUR	4,01	A-

Kategori Penilaian

INDEKS	KATEGORI
4,51-5,00	A
4,01-4,50	A-
3,51-4,00	B
3,01-3,50	B-
2,51-3,00	C
2,00-2,51	C-
1,51-2,00	D
1,01-1,50	E
0,10-1,00	F

5. Maturitas SPIP

a. Penjelasan:

Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penilaian atas Maturitas SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan atau kedewasaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Komponen yang dinilai meliputi penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan SPIP (termasuk manajemen risiko dan kapabilitas APIP). SPIP dirancang untuk memberikan *“reasonable assurance”* atau keyakinan memadai, bukan jaminan mutlak artinya dengan adanya SPIP yang

berfungsi dengan baik, instansi diharapkan mampu mengendalikan risiko dan menekan potensi penyimpangan dalam batas wajar. Tingkat Maturitas SPIP adalah sebagai berikut:

- A. Level 1 (Rintis/Rintisan)
- B. Level 2 (Terbentuk)
- C. Level 3 (Terdefinisi)
- D. Level 4 (Terkelola)
- E. Level 5 (Optimisasi)

Hasil Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada tahun 2025 dengan target Level 3 (3,10) belum tercapai dan mengalami penurunan dari Level 3 menjadi Level 2 dengan nilai 2,468.

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja:

Pada indikator sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yaitu Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan formulasi mengambil data dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Penilaian SPIP Terintegrasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan melalui proses penilaian di panel BPKP Pusat. Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Belitung Timur belum memberikan keyakinan memadai dalam mendukung pencapaian tujuan sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 yang berarti organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya belum relevan dan terintegrasi serta pengendalian yang dilaksanakan masih sebatas pemenuhan.

Dari data laporan hasil evaluasi (LHE) penurunan kinerja diantaranya disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah belum mampu Menyusun strategi pencapaian kinerja;
2. Dalam proses perencanaan yaitu Perumusan kinerja serta indikator dan target dalam penyusunan strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan belum optimal;
3. Penyusunan kebijakan; implementasi manajemen risiko dan pembinaan manajemen risiko belum optimal;
4. Masih terdapat temuan berulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan

BPK;

5. Naiknya standar penilaian maturitas dari BPKP dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berdasarkan data Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dikeluarkan pada tanggal 24 Desember 2025 mengalami penurunan yang sebelumnya berada di level 3 menjadi level 2 dengan skor 2,468, dengan target Level 3 (3,10) atau tidak tercapai. Penetapan hasil evaluasi penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 yang mencapai karakteristik terdefinisi di Indonesia pada tahun 2025 hanya ada 2 Kota yaitu Kota Surabaya dan Kota Denpasar. Terdefinisi yang dimaksud adalah mensyaratkan SPIP, MRI, dan IEPK masing-masing minimal level 3. Tingkat Provinsi nilai SPIP paling tinggi adalah Posisi 1 Provinsi Jawa Timur nilai 3.490, Posisi 2 Provinsi Kalimantan Timur nilai 3.288 dan Posisi 3 Provinsi Lampung nilai 3.200. Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai level 3 dengan nilai 3.063.

Sebagian besar Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan dari level 3 ke level 2 seperti Belitung Timur, Belitung, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka. Dari 7 (Tujuh) Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk hasil SPIP Tahun 2025 6 (Enam) Kabupaten berada di Level 2 dan 1 Kabupaten N/A. Untuk Kabupaten/Kota yang memiliki nilai SPIP Paling Tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Posisi 1 Kabupaten Bangka Tengah nilai 2.898, Posisi 2 Kabupaten Bangka nilai 2.856 dan Posisi 3 Kota Pangkalpinang nilai 2.678.

Khusus untuk Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang telah melalui proses penilaian pada tahap akhir yaitu melalui panel di BPKP Pusat. Sedangkan kabupaten/ kota yang lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penilaiannya masih di BPKP Perwakilan dan belum dilakukan penilaian secara panel oleh BPKP Pusat.

c. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan):

Beberapa hal yang harus dievaluasi dan ditingkatkan berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi penilaian agar nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan adalah sebagai berikut :

- Memperbaiki perencanaan dengan memperhatikan *cascading* sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi *outcome*, memenuhi kriteria SMART dan didukung target yang tepat;
- Menerapkan dan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh Perangkat Daerah dengan memperhatikan :
 - a. Melengkapi kebijakan Manajemen Risiko dengan menambahkan substansi terkait pembangunan budaya risiko, penetapan *risk appetite*, strategi anti *fraud* dan pelaksanaan evaluasi atas desain dan implementasi manajemen risiko;
 - b. Melakukan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama internal dan eksternal;
 - c. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan pemahaman SDM terkait manajemen risiko;
 - d. Melakukan monitoring pelaksanaan RTP dan efektivitasnya pada masing-masing UPR;
- Meningkatkan pengendalian korupsi dengan cara :
 - a. Melaksanakan survei persepsi terhadap efektifitas pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. Mengoptimalkan penggunaan saluran pengaduan dengan memastikan perlindungan terhadap pelapor dan ditindaklanjutinya pengaduan.

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran Maturitas SPIP, adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal , dengan sub kegiatan:

- Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja

Sasaran : 1.1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel Tabel 3.2-13
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Indikator		Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024(%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)			
1	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	100	WTP	100
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	83,45	71,49	85,67	83,71	71,49	86,00	86	84,74	84,36
Jumlah					92,83			93			92,18

Catatan: untuk sementara capaian IPKD Menggunakan hasil tahun 2025

Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, sebagai berikut:

1. Opini BPK

a. Penjelasan:

Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penilaian atas Maturitas SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan atau kedewasaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Komponen yang dinilai meliputi penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan SPIP (termasuk

manajemen risiko dan kapabilitas APIP). SPIP dirancang untuk memberikan “*reasonable assurance*” atau keyakinan memadai, bukan jaminan mutlak artinya dengan adanya SPIP yang berfungsi dengan baik, instansi diharapkan mampu mengendalikan risiko dan menekan potensi penyimpangan dalam batas wajar. Tingkat Maturitas SPIP adalah sebagai berikut:

- A. Level 1 (Rintis/Rintisan)
- B. Level 2 (Terbentuk)
- C. Level 3 (Terdefinisi)
- D. Level 4 (Terkelola)
- E. Level 5 (Optimisasi)

Hasil Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada tahun 2025 dengan target Level 3 (3,10) belum tercapai dan mengalami penurunan dari Level 3 menjadi Level 2 dengan nilai 2,468.

b. Analisis Peningkatan/Penurunan kinerja:

Pada indikator sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yaitu Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan formulasi mengambil data dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Penilaian SPIP Terintegrasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan melalui proses penilaian di panel BPKP Pusat. Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Belitung Timur belum memberikan keyakinan memadai dalam mendukung pencapaian tujuan sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 yang berarti organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya belum relevan dan terintegrasi serta pengendalian yang dilaksanakan masih sebatas pemenuhan.

Dari data laporan hasil evaluasi (LHE) penurunan kinerja diantaranya disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah belum mampu Menyusun strategi pencapaian kinerja;
2. Dalam proses perencanaan yaitu Perumusan kinerja serta indikator dan target dalam penyusunan strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan belum optimal;
3. Penyusunan kebijakan; implementasi manajemen risiko dan pembinaan manajemen risiko belum optimal;

4. Masih terdapat temuan berulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;
5. Naiknya standar penilaian maturitas dari BPKP dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berdasarkan data Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dikeluarkan pada tanggal 24 Desember 2025 mengalami penurunan yang sebelumnya berada di level 3 menjadi level 2 dengan skor 2,468, dengan target Level 3 (3,10) atau tidak tercapai. Penetapan hasil evaluasi penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 yang mencapai karakteristik terdefinisi di Indonesia pada tahun 2025 hanya ada 2 Kota yaitu Kota Surabaya dan Kota Denpasar. Terdefinisi yang dimaksud adalah mensyaratkan SPIP, MRI, dan IEPK masing-masing minimal level 3. Tingkat Provinsi nilai SPIP paling tinggi adalah Posisi 1 Provinsi Jawa Timur nilai 3.490, Posisi 2 Provinsi Kalimantan Timur nilai 3.288 dan Posisi 3 Provinsi Lampung nilai 3.200. Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai level 3 dengan nilai 3.063.

Sebagian besar Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan dari level 3 ke level 2 seperti Belitung Timur, Belitung, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka. Dari 7 (Tujuh) Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk hasil SPIP Tahun 2025 6 (Enam) Kabupaten berada di Level 2 dan 1 Kabupaten N/A. Untuk Kabupaten/Kota yang memiliki nilai SPIP Paling Tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Posisi 1 Kabupaten Bangka Tengah nilai 2.898, Posisi 2 Kabupaten Bangka nilai 2.856 dan Posisi 3 Kota Pangkalpinang nilai 2.678.

Khusus untuk Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang telah melalui proses penilaian pada tahap akhir yaitu melalui panel di BPKP Pusat. Sedangkan kabupaten/ kota yang lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penilaiannya masih di BPKP Perwakilan dan belum dilakukan penilaian secara panel oleh BPKP Pusat.

c. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan):

Beberapa hal yang harus dievaluasi dan ditingkatkan berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi penilaian agar nilai Maturitas Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan adalah sebagai berikut :

- Memperbaiki perencanaan dengan memperhatikan *cascading* sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi *outcome*, memenuhi kriteria SMART dan didukung target yang tepat;
- Menerapkan dan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh Perangkat Daerah dengan memperhatikan :
 - a. Melengkapi kebijakan Manajemen Risiko dengan menambahkan substansi terkait pembangunan budaya risiko, penetapan *risk appetite*, strategi anti *fraud* dan pelaksanaan evaluasi atas desain dan implementasi manajemen risiko;
 - b. Melakukan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama internal dan eksternal;
 - c. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan pemahaman SDM terkait manajemen risiko;
 - d. Melakukan monitoring pelaksanaan RTP dan efektivitasnya pada masing-masing UPR;
- Meningkatkan pengendalian korupsi dengan cara :
 - a. Melaksanakan survei persepsi terhadap efektifitas pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. Mengoptimalkan penggunaan saluran pengaduan dengan memastikan perlindungan terhadap pelapor dan ditindaklanjutinya pengaduan.

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran Maturitas SPIP, adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal , dengan sub kegiatan:
 - Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja

2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

a. Penjelasan:

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah dilakukan pengukuran terhadap Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Daerah.

Salah satu yang diatur dalam Permendagri tersebut terkait dengan alat ukur yang digunakan. Dalam regulasi itu dijelaskan, ada enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur. Enam dimensi itu yakni (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) Pengalokasian anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) Penyerapan anggaran, (5) Kondisi keuangan daerah, (6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh pada proses pengelolaan keuangan daerah. Sebab dimensi tersebut mengukur proses perencanaan pembangunan di daerah sampai dengan proses pelaporan keuangan. Berbagai dokumen yang ditinjau yakni dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD, LKPD sampai dengan opini BPK atas LKPD

Tujuan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu;
2. Memacu dan memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah;
3. Melakukan publikasi atas hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota;

4. Memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki indeks pengelolaan keuangan daerah yang terbaik; dan
5. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam mewujudkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan pengukuran IPKD, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah wajib dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, antara lain:

1. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Analisis Peningkatan/ Penurunan Kinerja:

Penginputan data untuk pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) menggunakan sumber data yang relevan dan valid mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020. Sumber data tersebut berasal dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Belitung Timur:
 - a) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD);
 - b) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - c) Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitong Timur:
 - a) Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS)
 - b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 - c) Realisasi Anggaran;
 - d) DPA semua Perangkat Daerah
 - e) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
3. Inspektorat Kabupaten Belitong Timur
 - a) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitong Timur terkait
 - a) Data keterbukaan informasi publik, termasuk publikasi dokumen pengelolaan keuangan melalui situs resmi pemerintah daerah melalui “lawang Beltim”.
5. Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur:
 - a) Rekapitulasi Data Pengadaan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(SIRUP.)
 - b) Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP).
 - c) Laporan Keuangan BUMD.
 - d) Surat Keputusan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belitong Timur.

Pengukuran dan penilaian IPKD dilakukan melalui 6 (enam) dimensi yang saling terkait Dimana setiap dimensi memiliki indikator-indikator spesifik dengan bobot penilaian sebagai berikut:

1. Perencanaan.
 - a) Kesesuaian nomenklatur program antara RPJMD dan RKPD (6%).
 - b) Kesesuaian nomenklatur program antara RKPD dan KUA-PPAS (6%).
 - c) Kesesuaian nomenklatur program antara KUA-PPAS dan APBD (6%).

- d) Kesesuaian pagu program antara RPJMD dan RKPD (6%).
 - e) Kesesuaian pagu program antara RKPD dan KUA-PPAS (6%).
 - f) Kesesuaian pagu program antara KUA-PPAS dan APBD (6%).
2. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, yaitu:
- a) Alokasi belanja fungsi pendidikan minimal 20%.
 - b) Alokasi belanja urusan kesehatan minimal 10%.
 - c) Alokasi belanja infrastruktur minimal 25% dari Dana Transfer Umum (DTU).
 - d) Alokasi belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
- a) Ketepatan waktu pengunggahan dokumen, maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.
 - b) Keteraksesan dokumen yang dapat diunduh publik selama 2 (dua) tahun anggaran. Salah satu dokumen yang diminta untuk diunggah adalah data pengadaan pada SiRUP.
4. Penyerapan Anggaran, yaitu:
- a) Persentase realisasi anggaran untuk belanja operasional.
 - b) Persentase realisasi anggaran untuk belanja modal.
 - c) Persentase realisasi anggaran untuk belanja transfer.
 - d) Persentase realisasi anggaran untuk belanja tak terduga.
5. Kondisi Keuangan Daerah, yaitu:
- a) Kemandirian keuangan.
 - b) Solvabilitas jangka panjang, pendek, dan layanan.
 - c) Fleksibilitas keuangan.
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu: status opini BPK atas LKPD selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- Berdasarkan Radiogram Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3./4201/BSKDN tentang Jadwal Penginputan IPKD dilakukan pada tanggal 20 -26 Oktober 2025. Masa

sangah 27 – 29 Oktober 2025 dan untuk validasi final 19 -23 November 2025.

Hasil Penginputan :

1. Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

1) Dimensi

1.1 Hasil Pengukuran Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD Pasal 6 -12 Permendagri 19 Tahun 2020, penilaian terhadap kesesuaian program RPJMD dan RKPD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RPJMD dan RKPD. Apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RPJMD, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam RKPD, maka dinilai memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1.

Laporan tahun 2024 sebanyak 139 program Dimana 136 program berstatus sesuai dan 3 program berstatus tidak sesuai. Maka indeks total dari laporan yang dihasilkan adalah 0,98.



2) Dimensi

1.2 Hasil Pengukuran Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dan KUA-PPAS

Penilaian terhadap kesesuaian program RKPD dan KUA-PPAS dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA PPAS. Apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RKPD, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam KUA-PPAS, maka dinilai memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1. Laporan tahun 2024 sebanyak 164 program dimana 162 program berstatus sesuai dan 2 program berstatus tidak sesuai. Maka indeks total dari laporan yang dihasilkan adalah 0,99.



3) Dimensi

1.3 Hasil Pengukuran Kesesuaian Nomenklatur Program KUA-PPAS dan APBD

Pengukuran terhadap kesesuaian program KUA-PPAS dan APBD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD. Apabila nomenklatur program

pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam KUA-PPAS, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam APBD, maka diukur memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1.

Laporan tahun 2024 sebanyak 168 program dimana 165 program berstatus sesuai dan 3 program berstatus tidak sesuai, maka indeks total dari laporan yang dihasilkan adalah 0,98.



4) Dimensi

1.4 Hasil Pengukuran Kesesuaian Pagu RKPD dan KUA-PPAS

- Pengukuran terhadap kesesuaian jumlah pagu per program RKPD dan KUA-PPAS yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS, kemudian dijumlahkan kesesuaiannya setelah dilakukan scoring.
- Apabila jumlah pagu per program antara RKPD dan KUA-PPAS memiliki kesesuaian maka diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila jumlah pagu per program antara RKPD dan KUA-PPAS tidak memiliki kesesuaian atau jumlahnya berbeda, maka diberikan skor 0

Laporan tahun 2024 sebanyak 166 program dimana 107 program berstatus sesuai dan 69 program berstatus tidak sesuai, maka indeks total dari laporan yang dihasilkan adalah 0,64



5) Dimensi

1.5 Hasil Pengukuran Kesesuaian Pagu KUA-PPAS dan APBD.

Pengukuran terhadap kesesuaian jumlah pagu per program KUA- PPAS dan APBD yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD, kemudian dijumlahkan kesesuaiannya setelah dilakukan scoring. Apabila jumlah pagu per program antara KUA-PPAS dan APBD memiliki kesesuaian maka diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila jumlah pagu per program antara KUA-PPAS dan APBD tidak memiliki kesesuaian atau jumlahnya berbeda, maka diberikan skor 0.



Laporan tahun 2024 sebanyak 169 program dimana 100 program berstatus sesuai dan 69 program berstatus tidak sesuai, maka indeks total dari laporan yang dihasilkan adalah 0,59.

12.554

Indeks Total Dimensi 1

Hasil diukur dengan menjumlahkan indeks total dari dimensi 1.1 hingga 1.5 yaitu

$0.978 + 0.988 + 0.982 + 0.645 + 0.592$ Kemudian hasil dari penjumlahan tersebut dibagi dengan **5**

sehingga akan menghasilkan skor rata rata yaitu **0.837**. Terakhir, skor rata rata tersebut akan

dikalikan **15** maka Indeks Total Dimensi 1 yang didapat adalah **12.554**

Indeks total dimensi 1 berdasarkan hasil ukur dengan menjumlahkan indeks total dari dimensi 1.1 hingga 1.5 yaitu $0.98+0.99+0.98+0.64+0.59$ kemudian hasil dari penjumlahan tersebut dibagi dengan 5 sehingga akan menghasilkan skor rata yaitu 0.828. terakhir, skor rata-rata tersebut akan dikalikan 15 maka indeks total Dimensi 1 yang didapat adalah 12.55.

2. Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD

Indikator yang terdapat pada Dimensi ini merupakan Mandatory Spending beberapa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- Belanja Fungsi Pendidikan 20% dari Total Belanja APBD;
- Alokasi Belanja Pegawai Daerah Paling Tinggi 30% dari Total Belanja APBD di Luar Tunjangan Guru Yang Dialokasikan Melalui TKD;
- Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Paling Rendah 40% dari Total Belanja APBD di Luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa;
- Alokasi Belanja Untuk Memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai

dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

2.1 Alokasi dana Pendidikan

Alokasi Dana Pendidikan

Total Skor : 1

Alokasi Dana Pegawai

Total Skor : 0

Total Belanja Daerah	Pengalokasian Belanja Pegawai					Jumlah belanja pegawai di luar tunjangan profesi, tunjangan khusus, tambahan penghasilan guru dan tunjangan lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya	Rasio Anggaran Pegawai
	Jumlah Belanja Pegawai	Tunjangan Profesi Guru	Tunjangan Khusus Guru	Tambahan Penghasilan Guru	Tunjangan Lainnya		
1005.346.407.796	433.239.777.796	35.731.950.000	0	1170.894.500	0	390.337.003.296	0,3883

98.894.823.514

80.840.400.635

3.564.503.939

0

232.400.027.088

26.404.508.845

0

251.804.932.933

0

251.804.932.933

1.005.346.407.796

2.2 Alokasi dana pegawai

Ratio belanja pegawai melebihi 30%, yaitu sekitar 38% dari belanja APBD diluar tunjangan guru.

2.3 Alokasi Belanja Infrastruktur.

Alokasi belanja infrastruktur hanya 19 % seharusnya paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil atau transfer pada daerah / desa.

Alokasi Belanja Infrastruktur

Total Skor : 0

Pengalokasian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik							Total Belanja Daerah	Rasio Anggaran Infrastruktur	
Belanja Bagi Hasil	Bantuan Keuangan	Belanja Modal Pengadaan/Pembangunan Fasilitas Pelayanan Publik	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Publik	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Selain (a-f)			
1005.346.407.796	8.340.181.076	12.176.104.000	127.410.210.477	16.309.136.300	25.022.854.334	1.542.000.000	809.729.321.808	172.294.000.811	0,180227

2.4 Indikator alokasi belanja SPM



3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (C.3)

Dimensi transparansi pengelolaar. keuangan daerah mencakup indikator:

1) ketepatan waktu;

Nilai 1 diberikan jika informasi/dokumen pengelolaan keuangan daerah yang diukur telah tersedia atau disajikan dalam situs jaringan resmi pemerintah daerah atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam waktu paling lama 30 hari setelah ditetapkan dan nilai 0 diberikan untuk kondisi sebaliknya.

2) keteraksesan.

Nilai 1 diberikan jika informasi/dokumen pengelolaan keuangan daerah yang diukur telah tersedia untuk diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui situs jaringan resmi pemerintah daerah atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan nilai 0 diberikan untuk kondisi sebaliknya.

No	Dokumen	BAU	RW	S/TS	Ketepatan	Keteraksesan	Jumlah
1	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	30 Hari	20 Hari	S	1	1	1
2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (R ...	30 Hari	24 Hari	S	1	1	1
3	Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran AP ...	30 Hari	4 Hari	S	1	1	1
4	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS ...	30 Hari	8 Hari	S	1	1	1
5	Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanj ...	30 Hari	29 Hari	S	1	1	1
6	Peraturan Daerah tentang APBD (Batang Tubuh d ...	30 Hari	4 Hari	S	1	1	1
7	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (Bata ...	30 Hari	2 Hari	S	1	1	1
8	Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Pej ...	30 Hari	4 Hari	S	1	1	1
9	Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah	30 Hari	6 Hari	S	1	1	1
10	Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Pemerin ...	30 Hari	14 Hari	S	1	1	1
11	Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban P ...	30 Hari	1 Hari	S	1	1	1
12	Opini BPK	30 Hari	7 Hari	S	1	1	1
13	Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa	30 Hari	1 Hari	S	1	1	1
14	Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD)	30 Hari	0 Hari	TS	0	0	0
15	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	30 Hari	28 Hari	S	1	1	1
16	Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pera ...	30 Hari	0 Hari	TS	0	0	0

13.1250

Indeks Total Dimensi 3

Hasil diukur berdasarkan skor ketepatan waktu **14** dan skor keteraksesan **14** lalu membagi nya dengan **16** atau jumlah dokumen yang telah ditetapkan, setelah itu akan menghasilkan nilai rata rata skor ketepatan waktu **0.8750** dan rata rata skor keteraksesan **0.8750**. Setelah itu untuk mencari seluruh skor rata rata maka dengan menjumlahkan kedua skor yang telah dihasilkan dan membaginya dengan **2** sehingga skor yang didapat adalah **0.8750**. Terakhir, skor tersebut akan dikalikan **15** maka Indeks Total Dimensi 3 yang didapat adalah **13.1250**

4. Dimensi Penyerapan Anggaran

Dimensi penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya. Penentuan skor masing-masing indikator adalah persentase antara anggaran belanja dengan realisasinya :

- 1) Apabila persentase antara anggaran dan realisasinya mencapai sama atau diatas 80 % ($\geq 80\%$) maka skor diberi angka 1.
- 2) Sebaliknya persentase anggaran dan realisasinya mencapai kurang dari 80 % ($< 80\%$), maka skor diberikan angka 0. Penyerapan anggaran dalam APBD adalah skor rata-rata dikali dengan bobot. Data Penyerapan Anggaran diambil dari dokumen LKPD Formulasi indeks dimensi penyerapan anggaran: Indeks D.4= Skor rata-rata x bobot.

Penyerapan Anggaran mencakup indikator yang disesuaikan dengan struktur anggaran belanja dalam APBD sesuai PP No.12 Tahun 2019, meliputi penyerapan:

- Anggaran belanja operasional.
- Anggaran belanja modal.
- Anggaran belanja transfer.

Untuk daerah yang masih menggunakan struktur anggaran belanja sesuai peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya peraturan pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No.12 Tahun 2019), maka dimensi penyerapan anggaran menggunakan indikator yang meliputi penyerapan:

- Anggaran belanja pegawai.
- Anggaran belanja bunga.
- Anggaran belanja subsidi.
- Anggaran belanja hibah.
- Anggaran belanja bantuan sosial.
- Anggaran belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.
- Anggaran barang dan jasa.
- Anggaran belanja modal.

20

Indeks Total Dimensi 4

Hasil diukur dengan menjumlahkan skor dari ke 3 indikator yaitu belanja operasional, modal, dan transfer **1+1+1** lalu membagi nya dengan jumlah dari indikator yang ditetapkan **3**. Terakhir, hasil pembagian tersebut akan dikalikan **20** maka Indeks Total Dimensi 4 yang didapat adalah **20**

5. Dimensi Kondisi Keuangan

Daerah Kondisi keuangan daerah adalah kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga dan untuk mengeksekusi hak keuangan secara efisien dan efektif (6 Indikator). Sumber Informasi: LKPD dan dokumen lainnya dari Kemendagri (misal: Dokumen Kependudukan yang diterbitkan oleh Kemendagri)

Kondisi Keuangan Daerah adalah Kemampuan Keuangan suatu Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga, dan untuk mengeksekusi hak keuangan secara efisien dan efektif. (6 Indikator).

Kemandirian Keuangan:

- Suatu Kondisi Pemda tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendali atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam dan luar negeri.

Fleksibilitas Keuangan:

- Suatu kondisi Pemda dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (debt capacity)

Solvabilitas Operasional

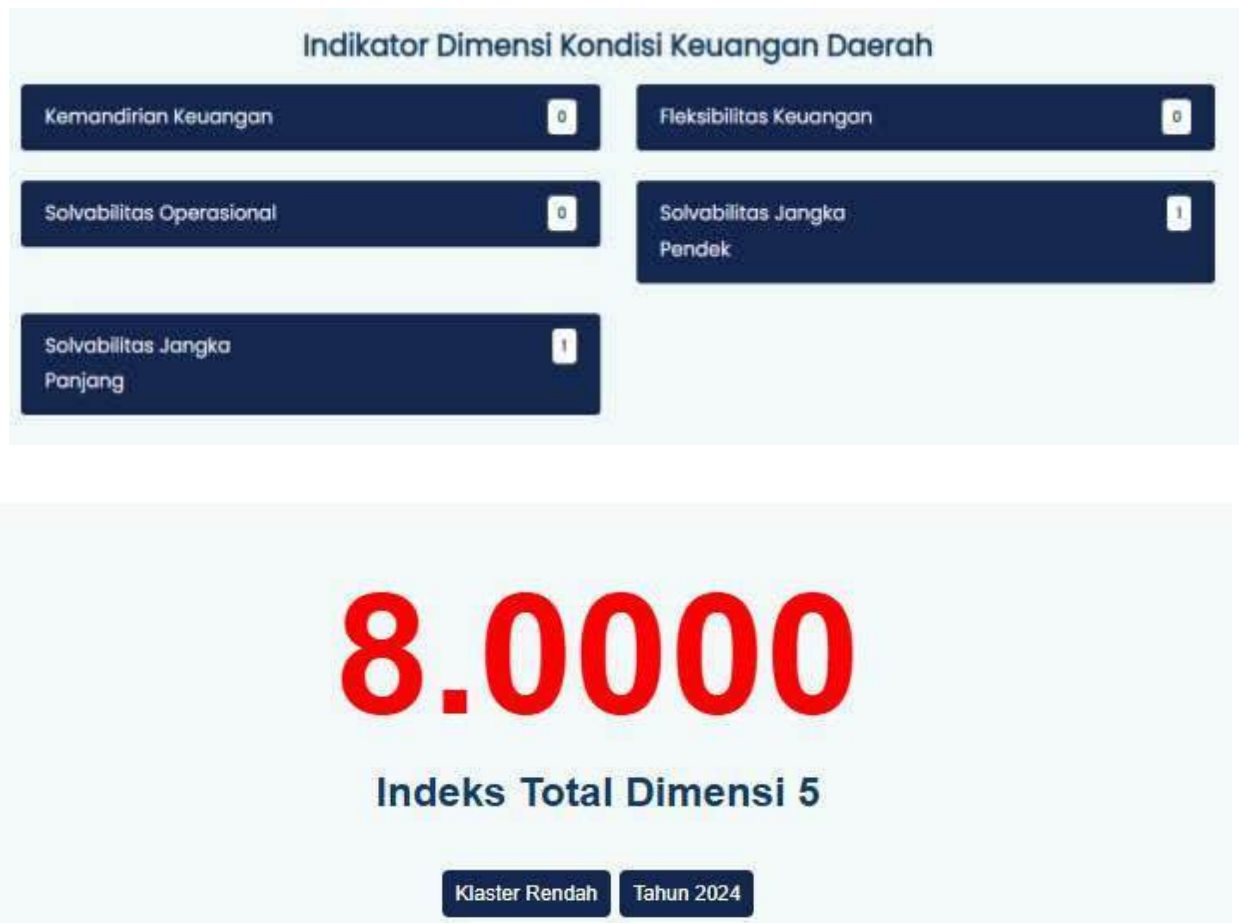
- Kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran

Solvabilitas Jangka Pendek

- Kemampuan Pemda untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan

Solvabilitas Jangka Panjang

- Kemampuan Pemda dalam memenuhi kewajiban jangka panjang



6. Dimensi Opini BPK Atas LKPD

Pemberian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

- 1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara 3 tahun terakhir berturut-turut akan diberikan Skor 1;
- 2) Opini WTP secara 2 tahun dalam masa 3 tahun terakhir berturut-turut akan diberikan skor $\frac{2}{3}$ (0,667);
- 3) Opini WTP secara 1 tahun dalam masa 3 tahun terakhir berturut-turut akan diberikan skor $\frac{1}{3}$ (0,334);
- 4) Opini Disclaimer diberikan skor 0;

5) Bobot dimensi opini BPK adalah 10.

10

Indeks Total Dimensi 6

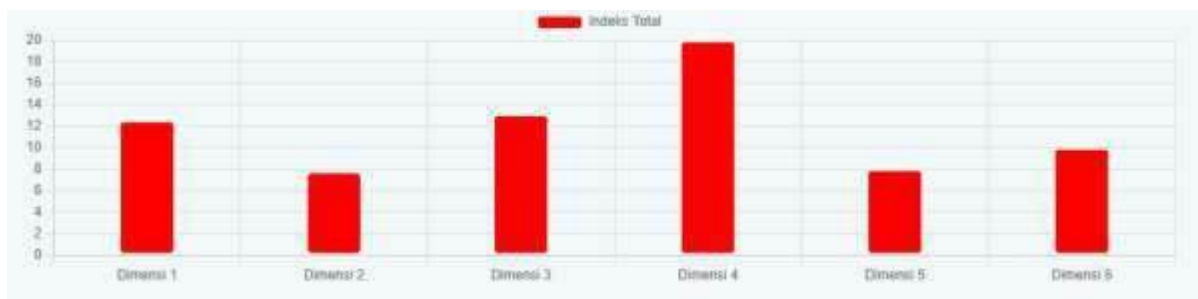
Hasil diukur dengan menjumlahkan skor dari opini BPK **1** lalu dikalikan dengan bobot yang ditetapkan . maka Indeks Total Dimensi 6 yang didapat adalah **10**

[Lihat File Opini BPK](#) [Download File Opini BPK](#)

- a. **Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan) :**
Perhitungan Total Hasil Pengukuran IPKD.

Tabel 3.2-14

No	Dimensi	Indeks
1	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (D.1)	12.553
2	Kualitas Anggaran Belanja Dalam APBD (D.2)	7.8126
3	Transparansi Pengelolaan Keuangan (D.3)	13.125
4	Penyerapan Anggaran (D.4)	4.20
5	Kondisi Keuangan Daerah (D.5)	8
6	Opini BPK (D.6)	10
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		71.4915



Keterangan Pemeringkatan Berdasarkan Hasil Pengukuran IPKD

- Instansi dikategorikan Baik jika nilai indeks total seluruh dimensi lebih besar dari $MEAN + (1 \times \text{standar deviasi})$.

- Instansi dikategorikan Perlu Perbaikan jika nilai indeks total seluruh dimensi Lebih kecil dari $MEAN + (1 \times \text{standar deviasi})$ dan lebih besar dari $MEAN - (1 \times \text{standar deviasi})$.
- Instansi dikategorikan Sangat Perlu Perbaikan jika nilai indeks total seluruh dimensi lebih kecil dari $MEAN - (1 \times \text{standar deviasi})$.

Untuk Kabupaten Belitung Timur dengan nilai IPKD 71.4915 di kategori Perlu Perbaikan.

Tabel 3.2-15

Evaluasi Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Dimensi	Catatan
1	1. Kesesuaian nomenklatur program RKPD dengan KUAPPAS sudah bagus, namun perlu dimaksimalkan 2. Kesesuaian nomenklatur program KUAPPAS dengan APBD sudah bagus, namun perlu dimaksimalkan 3. Keseluruhan pagu sudah bagus, namun belum efisien 4. Perlu perbaikan dan perhatian dalam merumuskan Pagu RKPD dengan KUAPPAS karena 69 program dari 107 program pagu tidak sesuai 5. Perlu perbaikan dan perhatian dalam merumuskan pagu KUAPPAS dengan APBD karena 69 program dari 169 program pagu tidak sesuai.
2	1. Alokasi belanja Bidang Pendidikan sudah bagus 2. Perlu diperhatikan untuk belanja pegawai yang sudah melebihi 30% dari APBD 3. Alokasi untuk Infrastruktur juga perlu perhatian karena penganggaran untuk infrastruktur masih dibawah 40% dari APBD. 4. Alokasi belanja SPM perlu ditinjau ulang karena APBD sudah tersita 38 % untuk belanja pegawai diluar gaji guru
3	Sudah maksimal hanya perlu untuk perbaikan data keteraksesan

	RENJA OPD dan DPA Perangkat Daerah
4	Sudah Maksimal
5	1. Rendah sekali di Indeks Kemandirian Keuangan, artinya masih perlunya untuk meningkatkan PAD. 2. Rendah di Indeks Fleksibilitas Keuangan, artinya masih perlunya untuk mengurangi total kewajiban (utang) dan belanja pegawai. 3. Rendah di Solvabilitas Operasional, artinya masih perlunya untuk mengurangi beban pegawai, beban barang dan jasa serta beban transferanya.
6	Sudah Maksimal

Tabel 3.2-16

Realisasi Akumulasi Tahun 2025 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2029

Sasaran 1.1.2 Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

N o	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	71,49	84,74	84,36

Catatan: IPKD menggunakan capaian tahun 2024.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

Terhadap realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2024 dengan nilai realisasi sebesar 71,49 atas hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang ditetapkan dari target Tahun 2026 sebesar 80 dengan persentase capaian kinerja 89,36% dibandingkan dengan rencana sesuai target RPJMD Tahun 2026 persentase kinerja mencapai 89,64% Program kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;

Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah; dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - 3) Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
 - 4) Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - 6) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - 7) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.
- b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
 - 2) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggran Kas dan SPD;
 - 3) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan EvaluasiPengelolaaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
 - 4) Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - 5) Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait.
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
 - 2) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 4) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;

- 5) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
 - 2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; dan
 - 3) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kegiatan pelaksana program adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyusunan Standar Harga;
 - 2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - 3) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 4) Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - 5) Inventarisasi Barang Milik Daerah;
 - 6) Pengamanan Barang Milik Daerah;

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan pelaksana program adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
 - 2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
 - 3) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
 - 4) Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
 - 5) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
 - 6) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
 - 7) Penagihan Pajak Daerah;
 - 8) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

Misi 2 : Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas produktif, berakhlak, berbudaya, dan bahagia.

Tujuan 2.1 : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Tabel Tabel 3.2-17
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Indikator		Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024(%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)			
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,62	73,62	100	73,98	73,99	100	100,01	75,49	98,01
Jumlah					100			100			98,01

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

Indeks Pembangunan Manusia

a. Penjelasan:

Evaluasi pengukuran capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan bahwa pada Tahun 2024 target IPM sebesar 73,62 telah berhasil dicapai secara optimal dengan realisasi sebesar 73,62, sehingga capaian kinerja mencapai 100,00 persen. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Pada Tahun 2025, target IPM ditetapkan meningkat menjadi 73,98 dan realisasi mencapai 73,99, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 100,01 persen. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik karena realisasi melampaui target yang telah ditetapkan, sekaligus mencerminkan adanya peningkatan kualitas pembangunan manusia secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil evaluasi ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan IPM telah efektif dan konsisten, serta

perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan sinergi lintas sektor pada periode perencanaan berikutnya.

Berikut disampaikan bukti dukung tangkapan layar website resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur yang menggambarkan capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 dan 2025, sebagai berikut :

Tabel 3.2-18

Kabupaten/Kota	IPM		Pertumbuhan IPM		Peringkat IPM	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bangka	74,66	75,38	0,43	0,96	3	2
Belitung	74,96	75,29	0,63	0,44	2	3
Bangka Barat	71,36	72,23	0,32	1,22	6	6
Bangka Tengah	72,54	73,10	0,25	0,77	5	5
Bangka Selatan	70,01	70,83	0,49	1,17	7	7
Belitung Timur	73,62	73,99	0,42	0,50	4	4
Kota Pangkal Pinang	80,90	81,64	0,56	0,91	1	1
Kepulauan Bangka Belitung	74,55	75,26	0,62	0,95		

Tabel 3.2 -19

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup saat Lahir ¹ (tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran Riil per Kapita per tahun yang Disesuaikan (ribu rupiah)	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Bangka	73,24	73,56	13,12	13,13	8,45	8,77	13.205	13.411
Belitung	72,76	73,13	12,09	12,10	9,05	9,11	14.449	14.559
Bangka Barat	72,08	72,35	11,79	11,95	7,48	7,80	13.199	13.380
Bangka Tengah	73,77	74,11	12,15	12,34	7,24	7,33	13.677	13.768
Bangka Selatan	71,74	72,07	11,71	11,78	6,93	7,25	12.718	12.920
Belitung Timur	73,79	74,12	11,69	11,78	8,99	9,03	12.610	12.694
Kota Pangkal Pinang	75,26	75,64	13,30	13,50	10,67	10,90	16.750	16.856
Kepulauan Bangka Belitung	74,12	74,46	12,49	12,50	8,33	8,65	13.667	13.837

b. Analisis kekurangan /Kelemahan:

Analisis peningkatan atau penurunan kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan adanya tren peningkatan kinerja dari Tahun 2024 ke Tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia mengalami perbaikan yang konsisten, seiring dengan meningkatnya

capaian di sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Tidak terdapat penurunan kinerja selama periode evaluasi, karena realisasi tahun berjalan tidak hanya memenuhi tetapi juga melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perencanaan target telah disusun secara realistis dan pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif. Meskipun demikian, peningkatan yang relatif moderat perlu menjadi perhatian agar ke depan dapat didorong lebih optimal melalui inovasi program, peningkatan kualitas layanan dasar, serta penguatan kolaborasi lintas sektor guna menjaga keberlanjutan peningkatan IPM.

b. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan) :

Untuk menjaga dan meningkatkan kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara berkelanjutan, diperlukan penguatan strategi pada komponen utama pembentuk IPM. Pada sektor pendidikan, solusi yang dapat dilakukan antara lain peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah, penguatan program penurunan angka putus sekolah, serta peningkatan akses pendidikan melalui bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Pada sektor kesehatan, perlu dilakukan optimalisasi pelayanan kesehatan primer melalui penguatan fasilitas kesehatan, peningkatan cakupan layanan promotif dan preventif, serta percepatan penurunan prevalensi stunting dan penyakit menular. Sementara itu, pada aspek standar hidup layak, solusi diarahkan pada peningkatan daya beli masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, serta pengendalian inflasi daerah. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, pemanfaatan data yang akurat sebagai dasar perencanaan, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan agar peningkatan IPM dapat dicapai secara lebih signifikan dan merata.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2-20**Realisasi Akumulasi Tahun 2025 dibandingkan Target Akhir
RPJMD Tahun 2029****Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas hidup masyarakat**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,99	75,49	98,01%

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

Evaluasi capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibandingkan dengan target RPJMD menunjukkan bahwa hingga Tahun 2025, realisasi IPM Kabupaten Belitung Timur telah mencapai 73,99. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2029 sebesar 75,49, maka capaian kinerja saat ini berada pada tingkat 98,01 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia berada pada jalur yang positif dan mendekati target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, serta peningkatan standar hidup layak masyarakat.

Meskipun capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang sangat baik, masih terdapat selisih yang perlu dicapai untuk memenuhi target RPJMD secara optimal pada akhir periode perencanaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan upaya pembangunan manusia secara terintegrasi dan berkelanjutan, khususnya pada peningkatan kualitas layanan dasar, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat. Dengan menjaga konsistensi pelaksanaan program dan meningkatkan sinergi lintas sektor, diharapkan target IPM RPJMD Tahun 2029 dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Sasaran 2.1.1 Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan

Tabel Tabel 3.2-21
Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan

Indikator		Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Akumu lasi Capaia n s/d Tahun 2025	Renc ana Sesu ai deng an Targ et RPJ MD Tahu n 2029	Pers entas e Capa ian Kiner ja (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024(%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)			
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,69	11,69	100	11,79	11,78	99,92	99,92	12,14	97,03
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,99	9,13	101,56	9,13	9,03	98,90	98,90	9,61	93,96
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	84,09	84,09	100	86	21,7	25,53	25,53	89	24,38
Jumlah					100,52			74,78			71,79

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Harapan Lama Sekolah

c. Penjelasan:

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat aksesibilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di suatu daerah. Menurut Badan Pusat Statistik Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang dengan asumsi bahwa pola partisipasi pendidikan yang berlaku tetap berjalan sebagaimana kondisi saat ini.. Asumsi harapan lama sekolah

yaitu kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama pada saat ini.

Indikator ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan kebijakan Pendidikan. Angka Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dicapai oleh setiap anak sekaligus menjadi salah satu komponen penting dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia terutama pada aspek pengetahuan.

Peningkatan Angka HLS mencerminkan keberhasilan dalam memperluas akses pendidikan, meningkatkan angka partisipasi sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah di berbagai jenjang. Dalam rencana strategis perencanaan pendidikan, upaya peningkatan AHLS harus difokuskan pada pemerataan akses pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta program intervensi bagi kelompok masyarakat rentan.

Dengan komitmen yang kuat terhadap pembangunan pendidikan, diharapkan Angka HLS dapat terus meningkat, sehingga menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi di masa depan.

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja:

Berdasarkan data tabel diatas Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025 mengalami kenaikan/peningkatan dibanding tahun 2024 yaitu dari 11,69 tahun menjadi 11,78 tahun atau meningkat sebesar 0,09 tahun. Capaian ini mengindikasikan adanya perbaikan akses dan kesempatan penduduk usia sekolah untuk menempuh Pendidikan formal dalam jangka waktu yang lebih Panjang. Peningkatan HLS menjadi sinyal positif dalam Pembangunan SDM dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan IPM Kabupaten Belitung Timur.

Peningkatan Angka HLS tersebut mencerminkan semakin terbukanya akses pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Data BPS menunjukkan bahwa partisipasi sekolah pada kelompok usia wajib belajar mengalami perbaikan, yang didukung oleh kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong keberlanjutan pendidikan serta penguatan program wajib belajar. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Belitung Timur.

Selain faktor kebijakan, peningkatan AHLS juga dipengaruhi oleh berbagai program bantuan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah, seperti BOSP, PIP, bantuan perlengkapan peserta didik bagi keluarga kurang mampu (program andalan kepala daerah). Program-program tersebut berperan dalam menekan angka putus sekolah serta tentunya diharapkan dapat meningkatkan motivasi anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Jika capaian Angka HLS Kabupaten Belitung Timur dibandingkan dengan Angka HLS propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional capaian Kabupaten Belitung Timur masih dibawah propinsi (12,50 tahun) dan juga masih dibawah rata-rata nasional yaitu 13,30 tahun. Namun jika dibandingkan dengan kabupaten / kota di propinsi Kepulauan Bangka Belitung capaian Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 berada pada posisi terakhir sama dengan Kabupaten Bangka Selatan yaitu 11,78 tahun.

Perbandingan realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2025 dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2-22
Perbandingan Realisasi Akumulasi Tahun 2025 Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2029
Sasaran 2.1.1

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Angka harapan Lama Sekolah	Tahun	11,78	12,14	97,03

Berdasarkan tabel perbandingan diatas disimpulkan sebagai berikut :

Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Belitung Timur sampai dengan tahun 2025 telah mencapai 11,78 tahun, hal ini menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun di Kabupaten Belitung Timur memiliki harapan untuk mengenyam pendidikan selama 11,78 tahun atau setara dengan jenjang kelas 11 hingga lulus SMA/K . Angka realisasi capaian sampai dengan tahun 2025 baru mencapai 97,03 persen dari target RPJMD tahun 2029 yaitu 12,24 tahun. Capaian angka harapan lama sekolah di kabupaten Belitung Timur tahun 2025 masih berada dibawah angka HLS propinsi Kep. Babel (12,50 tahun) dan juga masih dibawah angka HLS nasional yaitu 13,30.

c. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan) :

Bila melihat trend Angka HLS Kabupaten Belitung Timur dari tahun ke tahun terus menunjukkan progres positif. Trend ini akan terus meningkat seiring dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Beberapa langkah strategis yang dilakukan yaitu dengan penyediaan/peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pemberian bantuan perlengkapan peserta bagi siswa kurang mampu, dan membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat terutama pendidikan non formal (program paket A,B,dan C) dengan Pendirian SPNF Kabupaten Belitung Timur. Hal ini menjadi komitmen progressif dari pemerintah dalam upaya mendukung perluasan akses Pendidikan bagi masyarakat.

Selain itu juga Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi dari keluarga kurang mampu dengan pola kerjasama Bersama berbagai Universitas di Indonesia. hal ini dilakukan untuk mendorong minat masyarakat yang kurang mampu untuk dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga akan bermuara pada peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Belitung Timur.

2. Rata-Rata Lama Sekolah

a. Penjelasan:

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang mencerminkan tingkat pencapaian pendidikan penduduk dalam suatu wilayah. RLS menunjukkan jumlah tahun rata-rata yang telah ditempuh

oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal. Semakin tinggi angka ini, semakin besar keterlibatan masyarakat dalam sistem pendidikan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan berdasarkan standarisasi dari BPS.

Dalam konteks perencanaan strategis pendidikan, peningkatan RLS menjadi salah satu prioritas utama untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mendapatkan akses ke pendidikan dasar, tetapi juga melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Upaya peningkatan RLS dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti program wajib belajar, peningkatan akses pendidikan ke daerah terpencil, beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, serta program kejar paket bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan akan menjadi modal utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing.

Dengan strategi yang tepat, peningkatan RLS dapat berkontribusi pada pembangunan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas, serta menciptakan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan global. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menjadi salah satu komponen penting dalam menghitung indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yaitu pada dimensi pengetahuan seperti halnya harapan lama sekolah.

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja:

Berdasarkan data tabel diatas angka rata-rata lama sekolah tahun 2025 di Kabupaten Belitong Timur mengalami kenaikan/peningkatan sebesar 0,04 poin dari 8,99 tahun menjadi 9,03 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Belitong Timur usia 25 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 9,03 tahun atau setara dengan kelas 9 pada jenjang SMP/ sederajat.

Peningkatan RLS tersebut mengindikasikan adanya kemajuan dalam capaian pendidikan penduduk, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan kebijakan

pendidikan sebelumnya yang mendorong peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan, sehingga makin banyak penduduk yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi. Perbaikan ini juga mencerminkan menurunnya angka putus sekolah pada tahun sebelumnya.

Selain itu, peningkatan RLS dipengaruhi oleh peran program pemerintah dalam bidang pendidikan seperti perluasan akses pendidikan menengah, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, bantuan operasional sekolah, program Indonesia Pintar. Selain itu juga program kesetaraan pendidikan (paket A,B,C) juga berkontribusi dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Belitung Timur.

Jika dibanding dengan angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung Timur (9,03 tahun) masih berada di atas angka rata-rata lama sekolah provinsi Kep. Bangka Belitung yang baru mencapai 8,65 tahun pada 2025, namun masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 9,07 tahun pada tahun 2025. Posisi RLS Kabupaten Belitung Timur pada tahun ini berada pada peringkat 3 di bawah kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Belitung jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

c. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan) :

“Nyaman Cerdas” merupakan program unggulan Bupati Terpilih yang didesain sebagai upaya untuk menekan angka putus sekolah di Kabupaten Belitung Timur. Program ini bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk kembali bersekolah bagi yang putus sekolah ataupun masyarakat yang belum menuntaskan pendidikannya melalui Pendidikan non formal/kesetaraan (Paket A,B,dan C) dengan pendirian SPNF dan lebih mengintensifkan peranan PKBM yang telah ada di beberapa kecamatan.

Program ini juga bertujuan agar anak-anak yang masih sekolah tetap semangat untuk bersekolah dengan memberikan bantuan perlengkapan sekolah kepada siswa kurang mampu yang rentan putus sekolah, membebaskan uang sekolah bagi siswa kurang mampu melalui dana BOS dan KIP (bantuan pusat).

Selain itu juga melakukan sosialisasi lintas sektor kepada masyarakat dengan melibatkan berbagai stakeholder (Dinas Pendidikan, Sosial dan PPA, Dinas Kesehatan, Kemenag, Satpol PP, sekolah, pemuka agama, pemerintah desa dan masyarakat) untuk memberikan pemahaman dan kesadaran baik kepada siswa maupun masyarakat umum terkait pentingnya pendidikan yang bisa dimulai dari Pendidikan pada level keluarga sebagai kunci pembentukan karakter dan pola pikir hingga peranan dan ajakan partisipasi pada Pendidikan formal maupun non formal yang lebih intensif.

Perbandingan realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2025 dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2 23
Perbandingan Realisasi Akumulasi Tahun 2025 Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2029
Sasaran 2.1.1

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,03	9,61	93,96

Berdasarkan tabel perbandingan diatas disimpulkan sebagai berikut :

Berdasarkan tabel diatas angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Belitong Timur sampai dengan tahun 2025 baru mencapai 9,03 tahun atau setara kelas 9 SMP/ sederajat. Jika dibandingkan target RPJMD tahun 2029 yaitu 9,61 tahun baru tercapai sebesar 93,96 persen. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan angka RLS propinsi Kep. Babel sebesar 8,65 tahun, namun jika dibandingkan dengan angka RLS nasional masih lebih rendah yaitu sebesar 9,07 tahun.

Adapun Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran Indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

a. Pengelolaan Pendidikan SD dengan sub kegiatan sbb:

- Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- Pembangunan Sarana , Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/Kepsek/TU
- Rehabilitasi Sengah/Berat Ruang Kelas
- Rehabilitasi Sengah/Berat Perpustakaan Sekolah
- Rehabilitasi Sengah/Berat Ruang UKS
- Rehabilitasi Sengah/Berat Sarana , Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Pengadaan Mebel Sekolah
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
- Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
- Penyelenggaraan Proses Belajar & Ujian Bagi Peserta Didik
- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang Pendidikan
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
- Penyediaan Pendidik dan Tendik Pada Satuan Pendidikan SD
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tendik pada Satuan Pendidikan SD
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- Pengelolaan dana BOS SD
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD
- Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
- Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Pemberian Layanan Pendamping bagi Satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
- Pembangunan Ruang Kelas Baru

b. Pengelolaan Pendidikan SMP dengan sub kegiatan sbb :

- Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana , Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Pengadaan Mebel Sekolah
 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
 - Penyediaan Pendidik dan Tendik Pada Satuan Pendidikan SMP
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tendik pada Satuan Pendidikan SMP
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - Pengelolaan dana BOS SMP
 - Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS SMP
 - Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan
 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidik
 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Pemberian Layanan Pendamping bagi Satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
 - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
 - Pengadaan Perlengkapan Belajar Peserta Didik
- c. Pengelolaan PAUD dengan sub kegiatan sbb:
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
 - Pengadaan Mebel PAUD
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
 - Penyediaan Pendidik dan Tendik Pada Satuan Pendidikan PAUD

- Pengembangan Karir Pendidik dan Tendik pada Satuan Pendidikan PAUD
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
 - Pengelolaan Dana BOP PAUD
 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang Pendidikan
 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - Pembangunan Ruang Kelas Baru
 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- d. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dengan sub kegiatan sbb:
- Penyediaan Pendidik dan Tendik Pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tendik pada Satuan Pendidikan Non Formal
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Non Formal/Kesetaraan
 - Pengelolaan Data BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang Pendidikan
 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - Pembangunan Ruang Kelas Baru
 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi peserta didik
2. Program Pengembangan Kurikulum
- a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dengan sub kegiatan:
- Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar

- b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal PAUD & PNF dengan subkegiatan:
 - Penyusunan Silabus Mulok & PNF
3. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
 - a. Pembinaan, Pengembangan Bahasa & Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan sbb:
 - Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan:
 - Perhitungan dan Pemerataan Pendidik dan Tendik Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Pemetaan, Pendistribusian Pendidik dan Tendik bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

a. Penjelasan:

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Adalah Indikator dari Perpustnas untuk mengukur Upaya pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mengukur upaya membangun budaya literasi melalui unsur, seperti layanan, koleksi, dan tenaga perpustakaan, yang mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menciptakan masyarakat berpengetahuan. Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional ini dirancang sebagai instrumen yang memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui indikator-indikator yang terukur dan terstandar, guna menilai

seberapa besar kontribusi lembaga perpustakaan terhadap peningkatan literasi masyarakat. Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang dilakukan secara periodik dapat memberikan sinyal performa terhadap efektivitas intervensi literasi yang dilakukan pemerintah, baik melalui lembaga pendidikan formal maupun lembaga nonformal seperti perpustakaan. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat akan menjadi salah satu instrumen kebijakan dalam mengevaluasi ketercapaian sasaran pembangunan literasi masyarakat menuju **Indonesia Emas 2045**. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan suatu ukuran nilai yang menggambarkan capaian kinerja dalam Pembangunan Perpustakaan pada Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Komponen Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat terdiri dari dimensi kepatuhan dan dimensi kinerja. Berikut tabel komponen pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat :

Tabel 3.2-23
Komponen Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Dimensi	Variabel	Indikator	Definisi Operasional
Kepatuhan	Koleksi	Jumlah keseluruhan bahan perpustakaan dalam bentuk fisik yang dimiliki	Jumlah keseluruhan bahan pustaka dalam bentuk fisik yang dimiliki oleh perpustakaan.
		Jumlah keseluruhan bahan perpustakaan dalam bentuk digital yang dimiliki	Jumlah keseluruhan bahan pustaka dalam format digital yang dimiliki dan diperoleh perpustakaan secara resmi (jual beli, hibah, hadiah, atau tukar menukar) serta dapat diakses oleh pemustaka.
		jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dipinjam, dibaca di tempat, atau silang pinjam dalam 1 (satu) tahun terakhir	Jumlah bahan pustaka cetak yang dipinjam, dibaca di tempat, atau silang pinjam koleksi yang digunakan oleh pemustaka dalam satu tahun terakhir
		Jumlah akses atau penggunaan bahan perpustakaan dalam bentuk digital oleh	Jumlah akses atau penggunaan bahan perpustakaan dalam

Dimensi	Variabel	Indikator	Definisi Operasional
		pemustaka dalam 1 (satu) tahun terakhir	bentuk digital oleh pemustaka, misalnya unduhan, kunjungan, atau pencarian dalam basis data elektronik dalam satu tahun terakhir.
		Jumlah koleksi dari bahan perpustakaan tercetak yang ditambahkan ke dalam koleksi perpustakaan dalam 1 (satu) tahun terakhir	Jumlah koleksi dari bahan perpustakaan tercetak yang ditambahkan ke dalam koleksi perpustakaan dalam satu tahun terakhir
		Jumlah koleksi dari bahan perpustakaan digital yang ditambahkan ke dalam koleksi perpustakaan dalam 1 (satu) tahun terakhir	Jumlah koleksi dari bahan perpustakaan digital yang ditambahkan ke dalam koleksi perpustakaan dalam satu tahun terakhir.
		Jumlah anggaran pengembangan bahan perpustakaan bentuk fisik dan digital dalam 1(satu) tahun terakhir	Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait selama satu tahun anggaran untuk membeli, menambah, atau memperbaiki koleksi bahan perpustakaan, baik berupa buku cetak maupun bahan digital (e-book, jurnal elektronik, dan sumber digital lainnya)
	Tenaga	Jumlah tenaga perpustakaan yang memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Diploma (D3) di bidang Ilmu Perpustakaan	Jumlah pustakawan dan tenaga teknis yang memiliki latar belakang pendidikan minimal Diploma (D3) di bidang Ilmu Perpustakaan
		Jumlah tenaga Perpustakaan yang memiliki surat keputusan dari lembaga	Jumlah pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan yang memiliki surat keputusan resmi dari lembaga/yayasan.
		Jumlah tenaga Perpustakaan yang mengikuti kegiatan	Jumlah pustakawan dan tenaga teknis yang mengikuti

Dimensi	Variabel	Indikator	Definisi Operasional
		pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir	kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), seperti pelatihan, seminar, lokakarya, sertifikasi, atau kegiatan sejenis yang mendukung kinerja perpustakaan yang dibuktikan dengan sertifikat yang mencantumkan jam pelatihan dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
		Jumlah Anggaran pengembangan keprofesian (diklat) tenaga perpustakaan dalam 1 tahun terakhir	Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait selama satu tahun anggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, kursus, workshop, atau program peningkatan kompetensi lainnya bagi pustakawan dan tenaga teknis
Kinerja	Pelayanan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan yang bertujuan meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi yang diselenggarakan oleh Perpustakaan dalam 1 (satu) tahun terakhir	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan yang bertujuan meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi yang diselenggarakan oleh Perpustakaan dalam satu tahun terakhir
		Jumlah pemustaka yang menggunakan layanan perpustakaan, baik luring maupun daring dalam 1 (satu) tahun terakhir	Jumlah pemustaka yang menggunakan layanan perpustakaan, baik luring maupun daring dalam satu tahun terakhir
		Jumlah pemustaka yang memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di Perpustakaan dalam	Jumlah pemustaka yang memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di Perpustakaan dalam satu tahun terakhir,

Dimensi	Variabel	Indikator	Definisi Operasional
	Penyelenggaraan dan Pengelolaan	1 (satu) tahun terakhir	misalnya komputer, internet, perangkat lunak edukatif, audio book, atau akses ke basis data digital
		Jumlah program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan untuk meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi pengguna dalam 1 (satu) tahun terakhir	Jumlah program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh perpustakaan untuk meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi pengguna dalam satu tahun terakhir, misalnya lokakarya (workshop) literasi, program membaca, seminar edukasi, kegiatan penjangkauan pemustaka diluar perpustakaan, atau kegiatan literasi digital
		Jumlah kerja sama yang dilakukan perpustakaan dengan pihak eksternal dalam upaya meningkatkan layanan dan pengembangan Perpustakaan dalam 1 (satu) tahun terakhir	Jumlah kerja sama formal atau informal yang dilakukan perpustakaan dengan pihak eksternal, seperti institusi pendidikan, komunitas literasi, penerbit, atau perusahaan, dalam upaya meningkatkan layanan dan pengembangan perpustakaan dalam satu tahun terakhir
		Jumlah berbagai jenis layanan yang tersedia di perpustakaan, baik dalam bentuk fisik maupun digital	Jumlah berbagai jenis layanan yang tersedia di perpustakaan, baik dalam bentuk fisik maupun digital
		Jumlah dokumen kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis yang mengatur penyelenggaraan layanan Perpustakaan	Jumlah dokumen kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis yang mengatur penyelenggaraan layanan perpustakaan, misalnya layanan peminjaman, referensi, ruang baca, pocadi,

Dimensi	Variabel	Indikator	Definisi Operasional
			perpustakaan keliling, e- library, akses database online, katalog digital dan lain-lain
		Jumlah anggaran untuk peningkatan pelayanan dan pengelolaan perpustakaan selama satu tahun terakhir	Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait dalam satu tahun anggaran untuk mendukung kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, serta pengembangan layanan perpustakaan, termasuk sarana prasarana, teknologi informasi, dan program layanan kepada masyarakat

Penentuan Bobot Dimensi IPLM adalah Berikut pembobotan yang digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat :

Tabel 3.2-24

Pembobotan Perhitungan Indeks Literasi Masyarakat

No.	Dimensi	Bobot
1	Kepatuhan	30 %
2	Kinerja	70 %

Rumus Penghitungan Indeks IPLM adalah :

$$\text{IPLM} = ((0.30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0.70 \times \text{Dimensi Kinerja})) \times 100$$

a. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja:

Dalam upaya menyempurnakan pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) sebagai Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Daerah, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia secara nasional telah melakukan analisis dan perubahan rumus dan instrumen yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga dimulai pada tahun 2025 terjadi perubahan tata cara penilaian dan perolehan hasil yang signifikan. Adapun pokok perubahan ditahun 2025 meliputi:

1. Penyesuaian metodologi pengukuran IPLM yang disesuaikan berdasarkan kewenangan daerah.

Tabel 3.2-25

Tabel Metodologi Pengukuran IPLM

Tahun 2024	Tahun 2025
Perpustakaan SD, SMP, SMK/Sederajat, perpustakaan desa, TBM, perpustakaan khusus	Perpustakaan SD, SMP, perpustakaan desa, TBM, perpustakaan khusus

Pada tahun 2025 SMK/Sederajat tidak masuk dalam penginputan data Kabupaten akan tetapi menjadi kewenangan Provinsi.

2. Integrasi Indikator baru, penyesuaian dimensi, variabel yang digunakan dalam perhitungan IPLM.

Tabel 3.2-26

Indikator Baru Perhitungan IPLM

Tahun 2024		Tahun 2025		
Unsur	Indikator	Dimensi	Variabel	Indikator
Pemerataan layanan perpustakaan (UPLM 1)	Jumlah perpustakaan	Kepatuhan	Koleksi	Jumlah koleksi tercetak
Ketercukupan koleksi perpustakaan (UPLM 2)	jumlah koleksi cetak dan digital (Judul)			Jumlah koleksi elektronik
Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM 3)	Jumlah pustakawan dan tenaga teknis			Penambahan koleksi tercetak
Tingkat kunjungan perpustakaan (UPLM 4)	Jumlah kunjungan /hari (online/onsite)			Penambahan koleksi elektronik
Perpustakaan yang dibina sesuai SNP (UPLM 5)	Jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP		SDM	Komitmen anggaran pengembangan koleksi
Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan (UPLM 6)	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi perpustakaan			Pustakawan sesuai kualifikasi
Anggota perpustakaan (UPLM 7)	Jumlah anggota perpustakaan			Tenaga teknis perpustakaan
				Tenaga perpustakaan yang mengikuti PKB



Tahun 2024	Tahun 2025		
	Kinerja	Layanan	Komitmen pengembangan SDM (biaya diklat)
			Koleksi tercetak yang dimanfaatkan
			Koleksi elektronik yang dimanfaatkan
			Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan penguatan baca dan peningkatan literasi
	Kinerja	Pengelolaan	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan secara luring/daring
			Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas TIK
			Jumlah kegiatan Penguatan budaya baca dan literasi
			Jumlah kolaborasi dan kerjasama perpustakaan
			Jumlah variasi dan layanan yang tersedia
			Jumlah dokumen kebijakan dan prosedur layanan
			Komitmen anggaran pengembangan layanan dan pengelolaan

3. Penyesuaian rumus dan bobot dimensi dalam perhitungan IPLM.

Tabel 3.2-27

Tahun 2024	Tahun 2025
Rumus Penghitungan IPLM $\text{IPLM} = \frac{\text{UPLM}}{7} \times 100$	Rumus penghitungan indeks Dimensi Kepatuhan Bobot 30% Dimensi Kinerja Bobot 70% $\text{IPLM} = ((0.30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0.70 \times \text{Dimensi Kinerja})) \times 100$

Perubahan tata cara perhitungan mempengaruhi hasil yang diperoleh, pada tahun 2025 komponen-komponen dimensi, variabel, indikator, lebih detail dan bertambah dari tahun sebelumnya. Perpustakaan yang menjadi sampel pengambilan data mengalami kesulitan dalam memenuhi setiap indikator yang ditentukan dikarenakan masih dalam tahap penyesuaian untuk mencapai setiap indikator-indikator yang ditentukan. Perolehan nilai IPLM pada tahun 2024 dengan target nilai 84 dan realisasi nilai 84,09 mencapai persentase 100% di bandingkan dengan nilai Tahun 2025 dengan target nilai 85 dan realisasi nilai 21,7 mencapai persentase 26%. Berikut rincian perbedaan hasil perhitungan IPLM 2024 dan 2025 dari Perpustakaan:

- **Metode Penghitungan:** IPLM 2025 menggunakan metode statistik yang lebih modern dan akurat, termasuk teknik pembersihan data, transformasi data metode Yeo-Johnson (menormalkan distribusi data), dan normalisasi min-max (skala 0–1).
- **Fokus Instrumen:**
 - **2024:** Lebih menekankan aspek kepatuhan administratif, seperti luas bangunan perpustakaan atau jumlah koleksi buku.
 - **2025:** Fokus pada kinerja dan aktivitas nyata dalam meningkatkan budaya baca, serta menilai ketercapaian sesuai kewenangan Pemda.
- **Tujuan Pengukuran:** IPLM 2025 dirancang untuk mengevaluasi efektivitas intervensi kebijakan literasi yang lebih presisi sebagai instrumen menuju Indonesia Emas 2045.

- **Konteks Skor:** Perubahan instrumen di 2025 bertujuan menghasilkan data yang lebih valid, sahih, dan reliabel untuk menilai pergerakan literasi secara nyata di lapangan.

b. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan) :

Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses/pelaksanaan dalam upaya mencapai nilai Indeks Literasi Masyarakat, diantaranya:

1. Sering terjadi transisi pengelola perpustakaan sekolah/desa sehingga menghambat pengembangan perpustakaan yang sudah berjalan.
2. Jarak perpustakaan yang cukup jauh terutama di wilayah kecamatan-kecamatan.
3. Keterbatasan anggaran perpustakaan.
4. Minimnya sarana prasarana perpustakaan terutama sarana TIK.
5. Keterbatasan koleksi perpustakaan.
6. Minimnya tenaga perpustakaan baik disekolah maupun desa.

Upaya perbaikan yang dilakukan Adalah :

1. Melakukan pembinaan rutin ke perpustakaan binaan.
2. Mendorong perpustakaan binaan untuk melakukan kerjasama.
3. Monitoring laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan.
4. Melakukan sosialisasi terkait instrument perpustakaan yang perlu dicapai.
5. Mendorong pihak sekolah/desa untuk membantu pengembangan perpustakaan.
6. Meningkatkan minat baca masyarakat melalui kegiatan-kegiatan literasi.

Berdasarkan perbandingan capaian realisasi akumulasi tahun 2025 dengan RPJMD Tahun 2029 dapat disimpulkan bahwa nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada tahun 2025 hanya mencapai realisasi dengan nilai 21,7 persentase 26 % dengan target nilai 85. Karena pada saat penetapan targetnya berdasarkan perhitungan rumus tahun 2024. Perkembangan Literasi Masyarakat melalui Indeks Pengembangan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kabupaten Belitong Timur sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Dengan nilai final sebesar 21,70, Kabupaten Belitong Timur berada di posisi ke-5 dalam daftar top 5

wilayah dengan nilai final tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya yang signifikan dalam meningkatkan akses dan kualitas literasi Masyarakat.

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran **2.1.1 Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan** dengan indikator **Indeks Pembangunan Literasi Manusia (IPLM)** adalah:

1. Program **Pembinaan Perpustakaan**, dengan kegiatan:

- Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan :
 1. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 2. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
 3. Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
 4. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan
 5. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
- Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan :
 1. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
 2. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 3. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca

Sasaran 2.1.2 Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi.

Tabel Tabel 3.2-28
Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi

Indikator		Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024(%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)			
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,89	73,79	101,92	73,04	74,12	101,48	101,48	73,66	100,62
2	Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	17,1	17,1	100	16,34	16,34	100	100	12,47	68,97
3	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	10,32	10,32	100	10,32	9,37	91,59	91,59	9,52	98,43
Jumlah					100,64			97,69			89,34

*- Tahun 2025 tidak ada survei (SSGI) terkait penilaian stunting
- capaian stunting (metode eppbgm) tahun 2025 (6,11%) cenderung turun 1,5 % dibanding tahun 2024 (4,61%)

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Usia Harapan Hidup:

a. Penjelasan:

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah indikator penting yang digunakan untuk mengukur kualitas kesehatan masyarakat di suatu wilayah. UHH mencerminkan rata-rata jumlah tahun hidup yang diharapkan oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa kondisi kesehatan saat ini akan terus berlanjut sepanjang hidupnya. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan UHH sebagai salah satu komponen utama dalam mengukur Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), bersama dengan indikator pendidikan dan ekonomi. Tujuan pengukuran UHH adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai tingkat kesehatan masyarakat, serta efektivitas sistem kesehatan dalam memperpanjang harapan hidup penduduk. UHH juga berfungsi sebagai referensi penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang bertujuan meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan.

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja:

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan dokumen perencanaan daerah, UHH Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025 (capaian 74,12 tahun) meningkat 0,33 tahun dibandingkan capaian tahun 2024 (73,79 tahun). Apabila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Kabupaten Belitung Timur periode 2025-2029 (sebesar 73,66 tahun) juga telah melampaui target. Dan apabila dibandingkan dengan capaian UHH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 (71,49 tahun), maka capaian UHH Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025 sudah melampaui capaian provinsi.

c. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan) :

Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat serta efektivitas berbagai program pembangunan di bidang kesehatan dan sosial. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan pada sektor kesehatan, gizi masyarakat, dan akses layanan dasar.

Kenaikan UHH tersebut mencerminkan semakin membaiknya kondisi kesehatan penduduk, yang ditandai dengan menurunnya risiko kematian, meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan, serta membaiknya perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, peningkatan UHH juga mengindikasikan keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dan lingkungan.

2. Prevalensi Stunting pada Balita.

a. Penjelasan:

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), stunting adalah kondisi balita yang memiliki panjang atau tinggi badan menurut umur berada di bawah standar, yaitu kurang dari minus 2 standar

deviasi (< -2 SD) berdasarkan Standar Pertumbuhan Anak WHO, yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan hingga awal kehidupan anak.

Stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga pada perkembangan otak, kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, dan produktivitas di masa dewasa.

Selama tiga tahun terakhir prevalensi stunting di Kabupaten Belitong Timur menunjukkan tren penurunan yang signifikan, yaitu dari 27% pada tahun 2021 menjadi 17,1% pada tahun 2024.

b. Analisis Peningkatan /Penurunan Kinerja:

Untuk tahun 2025 angka prevalensi stunting tidak keluar (Kemenkes tidak melaksanakan SSGI), berdasarkan data terkini tahun 2025, survei stunting tidak lagi menggunakan format SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) melainkan beralih menggunakan survei berbasis data rutin Posyandu/Puskesmas dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang lebih presisi. Hal ini bertujuan untuk intervensi langsung pada balita berisiko, bukan sekadar pelaporan angka sampel.

Selain menggunakan metode Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) penghitungan prevalensi stunting juga menggunakan metode Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPBGM). sebuah aplikasi berbasis web untuk merekam data individu (balita dan ibu hamil) serta hasil penimbangan rutin di Posyandu secara digital, yang kemudian diolah menjadi status gizi untuk mempermudah pemantauan masalah gizi (stunting, gizi buruk, obesitas) dan intervensi cepat oleh tenaga kesehatan dan pemangku kebijakan. Aplikasi ini terintegrasi dengan Sistem Informasi Gizi Terpadu (SIGIZI Terpadu).

Rumus Prevalensi i Stunting (%) =

$$\frac{\text{Jumlah Balita Stunting (Pendek + Sangat Pendek)}}{\text{Total Balita Diukur (yang memiliki data TB/U)}} \times 100\%$$

Cara menghitung prevalensi stunting dalam e-PPBGM (elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dilakukan dengan membagi jumlah balita stunting (≤ -2) SD TB/U dengan total balita yang diukur dalam kurun waktu tertentu, kemudian dikalikan 100%. Data ini

diinput oleh petugas posyandu ke aplikasi Sigizi Terpadu untuk perhitungan otomatis.

Selama tiga tahun terakhir prevalensi stunting di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan tren turun naik. Pada tahun 2023 di angka 5 kemudian turun ke angka 4,61 d tahun 2024 (capaian meningkat). Sedangkan di tahun 2025 naik ke 6,11. (penurunan capaian).

c. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan)

Dalam upaya penurunan stunting sejumlah tantangan masih ditemukan seperti rendahnya akses sanitasi di beberapa desa, rendahnya literasi gizi keluarga, serta belum optimalnya pemutakhiran data keluarga berisiko stunting. Untuk itu, pada tahun 2025 pemerintah daerah akan memperkuat intervensi spesifik dan sensitif, meningkatkan kualitas monitoring by name by address, mendorong peran desa melalui pemanfaatan dana desa, serta memastikan program gizi berlangsung secara berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, diharapkan prevalensi stunting dapat terus ditekan hingga mencapai target nasional.

Tabel 3.2-29
Realisasi Akumulasi Tahun 2025 dibandingkan Target Akhir
RPJMD Tahun 2029
Sasaran: Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan yang
berkualitas dan terintegrasi

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
	Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi				
2.1.2	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,12	73,66	100,62
	Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	N/A	12,47	N/A

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi Usia Harapan Hidup melampaui target akhir periode dengan capaian 100,62%.

2. Untuk realisasi sasaran Prevalensi Stunting pada Balita pada tahun 2025 dengan target akhir periode yaitu 12,47 belum dapat disandingkan (diukur).

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang Sasaran 2.1.2: Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi adalah:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas
 - Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
 - Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
 - b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
- Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas
- Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
- Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- d. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - b. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
 - Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
 - b. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
 - c. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

3. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan, atau Prevalence of Undernourishment (PoU), adalah persentase penduduk di suatu wilayah yang konsumsi energinya di bawah standar kebutuhan minimum (MDER) untuk hidup sehat dan aktif. Data ini merupakan indikator penting dalam mengukur kerawanan pangan dan gizi, di mana tingkat nasional seringkali fluktuatif.

a. Penjelasan:

Menurut FAO, ketidacukupan konsumsi pangan (undernourishment) didefinisikan sebagai “Condition of people who consume, on regular basis, amounts of food that do not provide the dietary energy need to be healthy and active”. Standar minimum yang digunakan untuk perhitungan angka PoU disesuaikan dengan kebutuhan kalori individu menurut jenis kelamin, umur pada tinggi badan dan berat badan tertentu serta aktifitas yang dilakukan.

Data yang digunakan dalam perhitungan PoU bersumber dari Susenas, yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Riset Kesehatan Dasar dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), Kementerian Kesehatan. Data BPS terdiri dari: (1) data populasi penduduk menurut umur dan jenis kelamin; (2) data konsumsi kalori yang didekati dengan menggunakan data konsumsi kalori per kapita; (3) data pendapatan yang didekati dengan data pengeluaran. Data Balitbangkes, Kementerian Kesehatan berupa data tinggi dan berat badan per individu yang didekati dengan data median tinggi dan berat badan menurut umur dan jenis kelamin.

Menghitung Konsumsi Kalori Per Kapita Sehari terdiri dari:

1. Menghitung jumlah konsumsi menurut komoditi selama seminggu terakhir dari setiap rumah tangga. Data yang diperlukan adalah data konsumsi makanan rumah tangga (bahan makanan) dan konsumsi

anggota rumah tangga (makanan dan minuman jadi) serta data jumlah anggota rumah tangga. Data konsumsi makanan anggota rumah tangga diagregasikan terlebih dahulu sesuai dengan komoditi makanannya untuk selanjutnya digabungkan ke dalam data konsumsi makanan rumah tangga.

2. Menghitung jumlah konsumsi kalori menurut komoditi setiap rumah tangga, yaitu dengan mengalikan banyaknya konsumsi dengan konversi kalori masing-masing komoditi.
3. Menghitung total konsumsi kalori rumah tangga dengan cara menjumlahkan konsumsi kalori dari seluruh komoditi yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Hasil yang diperoleh merupakan jumlah konsumsi kalori rumah tangga selama seminggu.
4. Menghitung konsumsi kalori per kapita sehari dengan cara membagi total konsumsi kalori rumah tangga selama seminggu dengan jumlah anggota rumah tangga dan dibagi 7 (tujuh) hari.

Perhitungan kalori pada makanan dan minuman jadi (yang dikonsumsi di luar rumah) dilakukan dengan menggunakan informasi konsumsi kalori dan harga dari seluruh komoditas yang dikonsumsi di luar rumah.

Prosedur perhitungan kalori dengan menggunakan harga per unit kalori adalah sebagai berikut:

1. Menghitung harga per kalori, yaitu menjumlahkan seluruh pengeluaran dan konsumsi kalori per rumah tangga. Selanjutnya, harga per kalori diperoleh dengan membagi total pengeluaran dengan total kalori.
2. Menghitung konsumsi kalori makanan dan minuman jadi. Setelah diperoleh kalori makanan dan minuman jadi setiap rumah tangga, nilai kalori per kapita sehari dihitung dengan membagi hasil tersebut dengan jumlah anggota rumah tangga dibagi 7 (tujuh) hari.
3. Melakukan koreksi nilai pencilan dengan menggunakan model regresi.

Menghitung Angka PoU :

1. Membuat komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

2. Menghitung Minimum Dietary Energy Requirement (MDER) dan Coefficient of Variation (CV). Prosedur perhitungan MDER, yaitu: (1) menentukan komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin berdasarkan data Susenas; (2) menghitung kebutuhan energi minimum untuk setiap kelompok umur dan jenis kelamin yang bersesuaian; (3) Menambahkan kebutuhan kalori untuk ibu hamil, sebesar 210 Kkal dikalikan dengan angka kelahiran.

Menghitung angka PoU, yaitu dengan membandingkan antara konsumsi kalori per kapita dan MDER. Angka PoU merupakan proporsi penduduk yang konsumsi kalornya di bawah MDER terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Rumus perhitungan angka PoU adalah sebagai berikut:

$$PoU = \int f(x)d(x)$$

$$CV(x) = \sqrt{CV^2(x/v) + CV^2(x/r)}$$

$$PoU = \int_{x < MDER} f(x)d(x)$$
 merupakan distribusi konsumsi kalori

$$CV(x) = \sqrt{CV^2(x/v) + CV^2(x/r)}$$

Sumber: Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (2018)

Keterangan:

$f(x)$ = fungsi densitas

$CV(x)$ = total simpangan baku

$CV(x/v)$ = simpangan baku konsumsi kalori per kapita C

$V(x/r)$ = komponen tetap, bernilai 0,179

b. Analisis Peningkatan/ Penurunan kinerja:

Angka Prevalence of Undernourishment (PoU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2025 sebesar 10,00 persen. Pada tingkat kabupaten/kota, Kota Pangkal Pinang menunjukkan angka PoU terendah (8,75 persen), diikuti oleh Kabupaten Belitung Timur (9,37 persen) dan Kabupaten Belitung (9,39 persen).

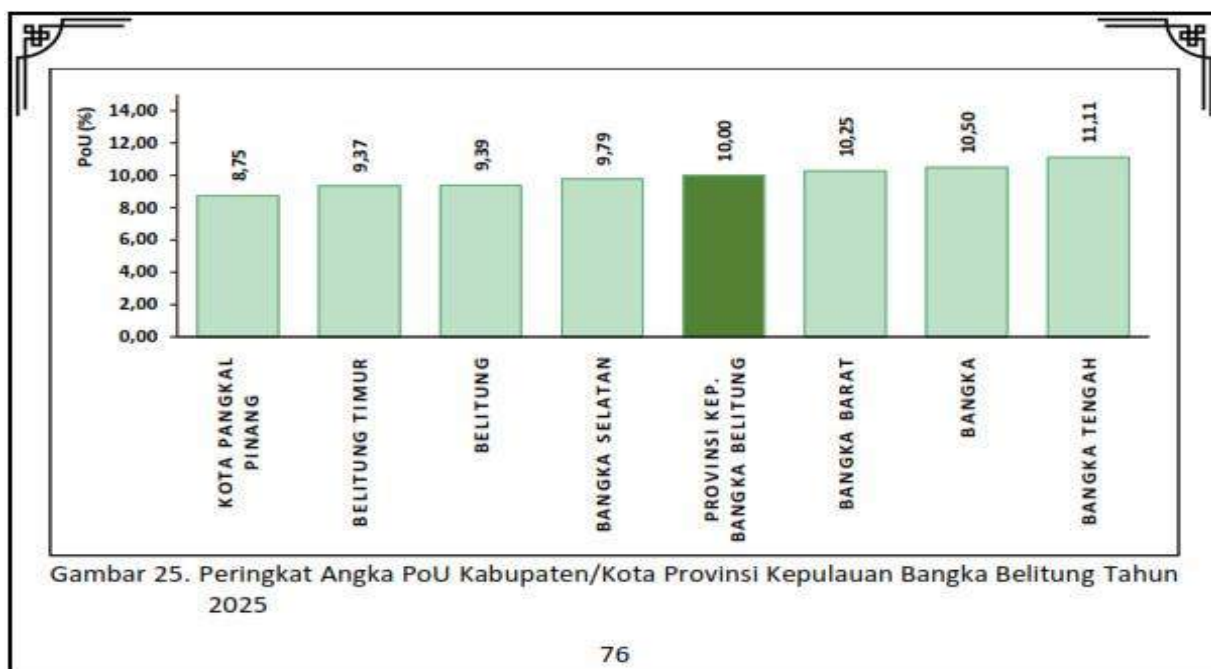
Perhitungan rata-rata perubahan angka PoU selama periode 2021 hingga 2025 kabupaten/kota mengalami kenaikan. Meskipun demikian, beberapa kabupaten/kota mencatatkan perubahan positif karena mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar yaitu Kabupaten Bangka Selatan, diikuti oleh Kabupaten Bangka Barat. Penurunan ini mencerminkan

kecukupan konsumsi pangan yang relatif membaik pada wilayahwilayah tersebut.

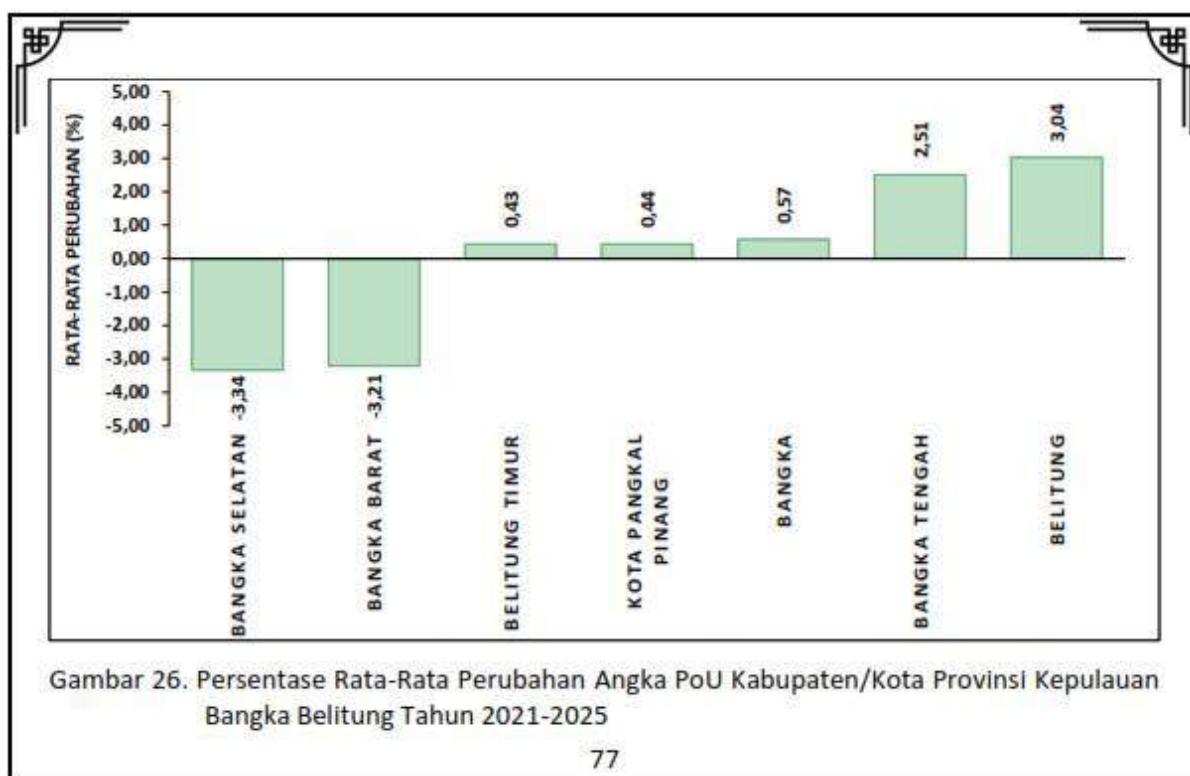
Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan paling sedikit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kabupaten Belitung Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah dengan angka PoU terendah tidak selalu menjadi daerah dengan jumlah penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan paling sedikit.

Angka PoU Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, yaitu dari 10,32% menjadi 9,37%. Penurunan ini sejalan dengan penurunan PoU secara nasional. Hal ini tidak terlepas dari stabilnya harga pangan strategis yang berpengaruh besar terhadap masyarakat berpendapatan menengah kebawah, seperti beras, telur dan minyak goreng. Selain itu, tingkat inflasi di Kabupaten Belitung Timur sampai bulan Desember 2025 sebesar 2,69% serta adanya bantuan pangan pemerintah berupa beras kepada masyarakat kurang mampu turut memperkuat akses pangan dan mendorong kenaikan konsumsi energi penduduk.

Kabupaten Belitung Timur menjadi kabupaten yang mengalami ketidakcukupan konsumen pangan paling sedikit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah dengan angka PoU terendah tidak selalu menjadi daerah dengan jumlah penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan paling sedikit.



76



77

Tabel 19. Persentase Rata-Rata Perubahan Angka PoU Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2025

No.	Kabupaten/Kota	PoU (%)					Rata-Rata Perubahan (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Bangka Selatan	12,10	15,86	13,08	10,95	9,79	-3,34
2	Bangka Barat	12,63	16,42	13,79	10,85	10,25	-3,21
3	Belitung Timur	10,27	14,78	12,24	10,32	9,37	0,43
4	Kota Pangkal Pinang	9,63	12,95	12,74	8,68	8,75	0,44
5	Bangka	11,36	15,78	13,40	10,45	10,50	0,57
6	Bangka Tengah	10,87	14,82	14,51	11,55	11,11	2,51
7	Belitung	9,70	15,21	13,14	11,26	9,39	3,04

78

c. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan):

Upaya yang bisa dilakukan untuk menurunkan angka ketidakcukupan konsumsi pangan adalah menjaga tingkat inflasi serta mengupayakan harga pangan strategis terutama beras, telur ayam ras dan minyak goreng stabil.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2-30
Realisasi Akumulasi Tahun 2025 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2029

Sasaran 3.1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of undernourishment)	Persen	9,37	9,52	98,42

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

Realisasi akumulasi Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of undernourishment*) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 sebesar 9,37% atau telah mendekati target akhir RPJMD Tahun 2029 sebesar 9,52%. Capaian kinerja mencapai 98,42%, menunjukkan bahwa pelaksanaan program penurunan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan telah berjalan cukup optimal sesuai dengan target yang ditetapkan. Disukung oleh sinergi lintas sektor, peningkatan ketersediaan dan akses pangan, serta pelaksanaan intervensi pangan dan gizi secara berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa fluktuasi harga pangan, keterbatasan daya beli Masyarakat rentan, dan belum meratanya distribusi pangan, sehingga diperlukan penguatan kebijakan dan kesinambungan program guna memastikan target RPJMD hingga akhir periode perencanaan dapat tercapai secara optimal.

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi, adalah:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota.
 - 3) Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM).
 - b. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, dengan sub kegiatan:

- a) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per kapita Per tahun.
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.
 - b. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota.
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran 2.1.3 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Budaya

Tabel Tabel 3.2-31
Meningkatnya kesejahteraan sosial dan Budaya

Indikator		Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024(%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)			
1	Angka Kemiskinan	Angka	6,36	6,36	100	6,20	6,69	92,10	92,10	5,59	83,56
2	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	59,28	60,74	102,47	59,68	60,74	101,77	101,77	61,26	99,15

3	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	87,55	87,55	100	87,83	88,58	100,86	100,86	88,73	99,83
4	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	67,66	67,66	100	68,86	72,57	105,39	105,39	73,05	99,34
5	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	52,67	52,67	100	56	58,17 (data tahun 2023)	103,87	103,87	60	96,95
Jumlah					100,50			100,80			95,77

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Angka Kemiskinan.

a. Penjelasan:

Angka Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan Persentase Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan.

Rumus Penghitungan:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana:

$\alpha = 1$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

Sumber Data: Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang

diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja:

Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Pada tahun 2024 Angka Kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur mengalami Peningkatan dari tahun sebelumnya, yang mana pada tahun 2024 sebesar 6,36 sedangkan untuk tahun 2025 sebesar 6,69. Menurut data Badan Pusat Statistik, Belitung Timur kini bukan lagi daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Posisi tersebut kini dipegang oleh Kabupaten Bangka Tengah dengan persentase penduduk miskin sebesar 6,70 persen, sementara Belitung Timur berada di posisi kedua dengan 6,69 persen. Meskipun ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, Belitung Timur termasuk tiga daerah dengan kenaikan terendah di provinsi. Jika dilihat dari indikator garis kemiskinan, kondisi Belitung Timur bahkan lebih baik dibandingkan Kabupaten Belitung. Garis Kemiskinan (GK) Belitung Timur tercatat 925.729,- per kapita per bulan, lebih rendah dari Belitung yang mencapai 937.759,- per kapita per bulan yang menunjukkan bahwa beban

pengeluaran masyarakat miskin di Belitung Timur relatif tidak lebih besar dibandingkan daerah tetangga.

Berikut data Angka Kemiskinan:

Kabupaten		Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belitung Timur (Persen)
		2024
Belitung Timur		6,36

Nama Wilayah		Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)
		2025
KEP. BANGKA BELITUNG		5,00
Belitung		6,44
Belitung Timur		6,69

Source Url: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/Njlxzl=/persentase-penduduk-miskin-p0-menurut-kabupaten-kota.html>

Ada beberapa faktor penyebab kemiskinan:

- **Ketergantungan pada Sektor Tambang:** Meskipun sektor tambang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB daerah, manfaatnya tidak merata. Material tambang diekspor dalam bentuk mentah sehingga nilai tambah tidak dinikmati masyarakat lokal, dan keuntungan lebih banyak didapat oleh perusahaan besar serta investor luar daerah.
- **Degradasi Lingkungan:** Aktivitas tambang merusak ekosistem dan lahan pertanian, mengurangi potensi sektor ekonomi lain seperti perikanan dan pariwisata.
- **Keterbatasan Akses Layanan Dasar:** Di beberapa kecamatan pertambangan dan kawasan bekas tambang, akses terhadap pendidikan dan kesehatan masih terbatas.
- **Tren Kenaikan Nasional/Provinsi:** Peningkatan angka kemiskinan tidak hanya terjadi di Beltim, melainkan juga di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Babel, yang kemungkinan terkait dengan kondisi ekonomi makro dan fluktuasi harga komoditas.

Dalam penurunan Angka Kemiskinan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri menjadi salah satu pendukung indikator tersebut, dimana kegiatan yang dilaksanakan berupa pemenuhan kebutuhan dasar manusia, verifikasi validasi data masyarakat miskin dari desil

1 sampai desil 5 untuk mendapatkan bantuan, baik bersumber dana dari APBD ataupun APBN agar bantuan tepat sasaran. Maka dari itu perlunya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Kemiskinan antara lintas sektor harus berbanding lurus dengan yang berhasil di tanggulangi dan pembentukan tim Kabupaten untuk mengatasi Angka Kemiskinan dikarenakan peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pengelola data yang menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah yang mempunyai program pemberian bantuan ke Masyarakat miskin dan rentan.

Berikut uraian bantuan tahun 2025:

Tabel 3.2.32

Tabel bantuan Tahun 2025

No	Jenis Bantuan	Jumlah PPKS yang menerima bantuan	Sumber Anggaran
1	Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	4.335 KK	APBN
2	Program Keluarga Harapan (PKH)	3.975 KK	APBN
3	Program BLTS Kesra	13.868 KK	APBN
4	Penerima Bantuan Iuran Kesehatan	32.609 Jiwa	APBN
5	Bantuan Hidup senilai 2jt/KK	17 KK	APBDP
6	Bantuan Permakanan (Disabilitas, Lansia, dan Anak Terlantar)	130 Jiwa	APBD
7	Bantuan sandang (Disabilitas, Lansia, dan Anak Terlantar)	120 Jiwa	APBD

Sumber data: Dinsospppa Kab. Belitong Timur

Selanjutnya dituangkan dalam program kegiatan yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu: (1) penyediaan kebutuhan pokok; 2) pengembangan sistem jaminan sosial. Pada dinas Sosial untuk Penyediaan Kebutuhan Pokok masuk kedalam pemenuhan SPM dan bantuan yang bersumber dari dana APBN dan APBD, yang dapat di lihat pada tabel uraian bantuan diatas, untuk Pengembangan sistem Jaminan Sosial telah ada aplikasi SIKS-NG untuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Selain memberikan bantuan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur untuk saat ini sudah menjalankan program pemberian makanan bergizi kepada anak

sekolah sesuai dengan program inisiatif nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan makanan sehat dan bergizi bagi anak sekolah, balita, serta ibu hamil/menyusui. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan, menurunkan angka stunting, dan memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Dampak jangka Panjang dari pemberian MBG ini dapat membantu mengurangi beban ekonomi keluarga miskin dengan memberikan makanan bergizi harian. Pemberian MBG pada tahun 2025 sebanyak 11.924 siswa penerima manfaat dan akan berlanjut di tahun 2026 sebanyak 17.681 siswa penerima manfaat.

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan dari segi ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga terus melakukan peningkatan kualitas tenaga kerja yang berorientasi pada pelatihan berbasis kompetensi dan kebutuhan pasar kerja, serta mendorong sertifikasi keahlian bagi pencari kerja guna meningkatkan daya saing dan peluang penempatan kerja. Selain itu, pengembangan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi, fasilitasi penempatan tenaga kerja, serta penguatan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi menjadi langkah strategis yang perlu didukung oleh peningkatan kualitas dan ketersediaan instruktur serta pemenuhan sarana dan prasarana pelatihan sesuai standar. Upaya tersebut dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi lintas lembaga dan kemitraan dengan sektor swasta agar sumber daya pendukung pelatihan dapat dimanfaatkan secara optimal, efektif, dan berkelanjutan. Kegiatan ini diarahkan pada penguatan sinergi dengan lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, asosiasi profesi, serta dunia usaha dan dunia industri dalam penyediaan instruktur praktisi, optimalisasi pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi yang selaras dengan standar kompetensi kerja dan kebutuhan pasar kerja, serta perluasan dukungan sarana dan prasarana melalui pemanfaatan fasilitas lintas lembaga dan kemitraan swasta.

c. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan).

Dalam mengimplementasikan program kegiatan untuk pencapaian indikator sasaran yang didukung dari DSP3A berupa pemberian bantuan pada masyarakat miskin yang tidak potensial, pemberian bantuan pemberdayaan ekonomi untuk Masyarakat miskin dan rentan yang potensial baik itu melalui

dana APBD maupun APBN. Penguatan data yang akurat dan terpadu agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran, serta memberikan sosialisasi untuk merubah pola pikir masyarakat agar keluar dari ranah kemiskinan dan mendorong mereka untuk berusaha mandiri. Keberlanjutan upaya menurunkan angka kemiskinan oleh pemerintah kabupaten Belitong Timur dapat dilakukan dengan melakukan strategi peningkatan pendapatan, menjamin keberlanjutan usaha mikro kecil dan sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan strategi lintas sektor, lintas program dan lintas pemangku kepentingan kunci dari keberhasilan strategi dimaksud. Kolaborasi antara pemerintah daerah, BPS, dan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, diharapkan mampu mempercepat upaya pengentasan kemiskinan, sehingga ke depan Belitong tidak hanya keluar dari posisi termiskin di Babel, tetapi juga mampu menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran 2.3.1 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Budaya adalah:

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- ❖ Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
- ❖ Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- ❖ Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan

- Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Alat Bantu
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - ❖ Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - Pemberian Layanan Kedaruratan
 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - Pemberian Layanan Rujukan
3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
- ❖ Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
 - ❖ Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
- ❖ Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Makanan
 - ❖ Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

a. Penjelasan:

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat pembangunan kebudayaan suatu wilayah berdasarkan berbagai dimensi dan indikator kebudayaan, IPK menggambarkan sejauh mana kebudayaan berkembang, dilestarikan, dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat identitas dan ketahanan budaya.

IPK terdiri atas beberapa dimensi antara lain:

1. Dimensi ekonomi budaya;

2. Dimensi pendidikan;
3. Dimensi ketahanan sosial budaya;
4. Dimensi warisan budaya;
5. Dimensi ekspresi budaya;
6. Dimensi budaya literasi; dan
7. Dimensi gender.

Penghitungan IPK dilaksanakan secara nasional dengan metodologi yang ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan bersama Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan koordinasi kebijakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Regulasi yang mengatur pengukuran IPK adalah Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 248 Tahun 2024 (Hasil 2023) tentang Hasil Perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan dan Keputusan Menteri Budaya No. 215 Tahun 2025 (Hasil 2024) tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2024.

Nilai IPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 tercatat sebesar 57,99. Selanjutnya pada tahun 2024 nilai IPK meningkat menjadi 60,74, sehingga terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam pembangunan kebudayaan daerah melalui berbagai program perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 61,26, maka capaian IPK tahun 2024 sebesar 60,74 telah mendekati target yang ditetapkan. Dengan demikian masih terdapat selisih sebesar 0,52 poin yang perlu dicapai hingga akhir periode RPJMD.

Peningkatan capaian IPK tersebut didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan, pelestarian kesenian tradisional, pembinaan lembaga adat, penetapan dan pelestarian cagar budaya, serta pengelolaan museum daerah. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, serta Program Pengelolaan Permuseuman.

Untuk meningkatkan capaian IPK pada tahun-tahun mendatang, diperlukan upaya optimal melalui peningkatan kualitas pelaksanaan program kebudayaan, penguatan sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah.

Pada tahun 2023, nilai Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebesar 57,13. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat pembangunan kebudayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada kategori sedang dan masih memiliki ruang untuk terus ditingkatkan melalui penguatan ekosistem kebudayaan daerah. Pengukuran IPK dilakukan melalui tujuh dimensi utama yang menggambarkan kondisi pembangunan kebudayaan secara komprehensif.

Pada tahun 2024, nilai IPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan menjadi 59,98, atau naik sebesar 2,85 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam pembangunan kebudayaan daerah melalui berbagai program perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Berdasarkan dimensi penyusunnya, ketahanan sosial budaya memiliki nilai relatif tinggi yaitu 74,16, yang menunjukkan tingkat toleransi sosial dan interaksi budaya masyarakat yang cukup baik. Dimensi pendidikan memiliki nilai yaitu 59,53, yang mencerminkan keberadaan pendidikan serta pembelajaran nilai-nilai budaya dalam sistem pendidikan. Selain itu, dimensi budaya literasi tercatat sebesar 71,00, yang menunjukkan tingkat aktivitas literasi masyarakat yang cukup berkembang.

Sementara itu, dimensi warisan budaya memiliki nilai 69,30, yang menunjukkan bahwa potensi pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya masih perlu diperkuat melalui upaya perlindungan, pengembangan, serta pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. Dimensi gender tercatat sebesar 59,63, yang menunjukkan bahwa kesetaraan peran dalam

aktivitas kebudayaan masih perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat dapat lebih merata.

Di sisi lain, beberapa dimensi masih menunjukkan capaian yang relatif rendah. Dimensi ekonomi budaya tercatat sebesar 23,70, yang menunjukkan bahwa kontribusi sektor budaya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat masih perlu diperkuat, terutama melalui pengembangan industri budaya dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Selain itu, dimensi ekspresi budaya juga masih menunjukkan capaian yang relatif rendah yaitu sebesar 42,29, yang mengindikasikan bahwa ruang ekspresi, partisipasi, serta aktivitas masyarakat dalam kegiatan seni dan budaya masih perlu terus ditingkatkan melalui penyediaan ruang kreatif, dukungan terhadap komunitas seni, serta penyelenggaraan kegiatan kebudayaan secara berkelanjutan.

b. Analisis Peningkatan /Penurunan kinerja:

Perlu diketahui bahwa angka capaian yang ada pada tabel diatas Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) tingkat provinsi. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki IPK dengan nilai 57,99 pada tahun 2023, sedangkan nilai untuk tahun 2024 belum ada data resmi yang dipublikasikan. Sebagaimana regulasi yang mengatur perihal Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2022 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), Instansi yang menyusun dan menetapkan metodologi IPK ditingkat pusat adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang pada saat ini menjadi wewenang Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dengan koordinasi kebijakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Ditingkat Kabupaten/Kota sebagaimana regulasi yang berlaku bahwa daerah (dalam hal ini Provinsi dan Kabupaten/Kota) hanya berkewajiban menyediakan dan mengumpulkan data daerah sesuai dengan indikator yang ditetapkan nasional untuk dapat dihitung kedalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung dimensi penyusun nilai IPK seperti dimensi ekonomi budaya, dimensi pendidikan, dimensi ketahanan sosial budaya, dimensi warisan budaya, dimensi ekspresi budaya, dimensi budaya literasi dan dimensi gender harus terus ditingkatkan dan diupaya dengan sungguh-sungguh.

Analisa perbandingan naik turunnya nilai IPK tidak dapat dilakukan mengingat nilai IPK untuk tahun 2024 belum ada data resmi yang dipublikasikan oleh instansi yang berwenang.

c. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan) :

Untuk meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dimasa selanjutnya, hal-hal yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut :

1. Seluruh OPD terkait dimensi penyusun nilai IPK melaksanakan semua program dan kegiatan secara baik dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan sinergitas *stakeholder* sektor pendukung dimensi sehingga menghasilkan pola pelaporan data yang terukur.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.33
Realisasi Akumulasi Tahun 2025 dibandingkan
Target Akhir RPJMD Tahun 2029
Sasaran 2.1.3 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Budaya

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Budaya				
	- Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	57,99	61,26	-

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

Realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 adalah 57,99, sedangkan nilai pada tahun 2024 belum dapat ditampilkan karena belum ada publikasi resmi dari instansi yang berwenang.

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran meningkatnya kesejahteraan sosial dan budaya adalah:

1. Program Pengembangan Kebudayaan, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
 - b. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Nasional
 - c. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota
 - Sub kegiatan Penetapan Cagar Budaya
6. Program Pengelolaan Permuseuman, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota
 - Sub kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum.

3. Indeks Pembangunan Gender.

a. Penjelasan:

Indeks Pembangunan Gender merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam suatu masyarakat berdasarkan beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Dengan kata lain, IPG merupakan

indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah.

Rumus Perhitungan:

$$IPG = \frac{IPM_{\text{Perempuan}}}{IPM_{\text{Laki-Laki}}} \times 100$$

Langkah Perhitungan:

1. Hitung IPM terpisah untuk perempuan dan laki-laki: IPM dibentuk oleh tiga dimensi dengan indikator berikut:
 - Umur panjang dan sehat: Angka harapan hidup saat lahir.
 - Pengetahuan: Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
 - Standar hidup layak: Pengeluaran riil per kapita (atau perkiraan pendapatan).
2. Hitung rasio: Bagi nilai IPM perempuan dengan IPM laki-laki, lalu kalikan dengan 100 untuk mendapatkan nilai IPG.

Sumber data: BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja:

Pendataan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Belitong Timur tahun 2025 tercatat sebesar **88,58**, meningkat 0,56 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menandakan semakin mengecilnya kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki di wilayah tersebut, dengan indikator positif pada umur harapan hidup perempuan, angka harapan lama sekolah mencapai 12 tahun, serta kesetaraan rata-rata lama sekolah.

Pendataan ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selaku instansi yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data, menghitung, dan mempublikasikan nilai IPG secara nasional maupun daerah, dengan mengacu pada metodologi yang disepakati. Dan Kementerian PPA sebagai pengguna data IPG untuk merumuskan kebijakan, program, dan strategi pengarusutamaan gender, guna mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Berikut data IPG tahun 2023 dan 2024:

SIGA
KEMENPPPA

Beranda Perempuan Anak Demografi Capaian Program DKRPPA 2022-2024 SIGA Daerah

PEREMPUAN

[3.9.1] - IPM, IPG, IDG, dan IKG (2024)

Tabel Grafik

Export Excel Json

No	Cakupan	Satuan	IPM	IPM Laki-laki	IPM Perempuan	IPG	IDG	IKG
1	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	Indeks	73,19	77,40	67,87	87,69	46,30	0,700

Sumber data: <https://siga.kemenpppa.go.id>

PEREMPUAN

[3.9.1] - IPM, IPG, IDG, dan IKG (2023)

Tabel Grafik

Export Excel Json

No	Cakupan	Satuan	IPM	IPM Laki-laki	IPM Perempuan	IPG	IDG	IKG
1	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	Indeks	72,86	77,08	67,29	87,30	54,92	0,477

Sumber data: <https://siga.kemenpppa.go.id>

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat kabupaten memiliki peran sentral dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan memperkuat Perlindungan Perempuan dan Anak. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertindak sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengarusutamaan gender (PUG) untuk membantu Bupati.

Adapun program kegiatan yang mendukung dalam pengukuran Indeks Pembangunan Gender adalah:

1. Peran Terkait Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator untuk mengukur kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dalam hal kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Peran dinas meliputi:

- **Pengarusutamaan Gender (PUG):** Melaksanakan kebijakan PUG untuk memastikan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan terakomodasi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan;
- **Pemberdayaan Perempuan:** Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan melalui berbagai pelatihan, pemberdayaan ekonomi, dan partisipasi politik;
- **Data Terpilah:** Mengelola data terpilah gender sebagai acuan penyusunan kebijakan yang responsif gender;
- **Penyusunan PPRG:** Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di tingkat OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Penyelenggaraan layanan teknis operasional perlindungan perempuan dan anak, melalui bidang dan UPT PPA pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:

- **Pelayanan Pengaduan:** Menyediakan layanan pengaduan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya;
- **Pendampingan Korban:** Melakukan pendampingan hukum, psikologis, dan rehabilitasi bagi korban kekerasan;
- **Perlindungan Khusus:** Melaksanakan upaya perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
- **Pencegahan Kekerasan:** Sosialisasi dan edukasi ke masyarakat untuk mencegah kekerasan dan tindak diskriminasi.

2. Fungsi Koordinasi dan Kebijakan

- **Koordinasi Lintas Sektor:** Membangun kemitraan dengan instansi terkait, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk pelaksanaan PUG dan PPA;
- **Monitoring dan Evaluasi:** Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan hasil PUG dan perlindungan anak di daerah.

Pada tingkat Kabupaten berupaya untuk memastikan angka IPG meningkat (mengecilkan ketimpangan gender) dan menurunkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (PPA).

c. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan) :

Dalam mengimplementasikan program kegiatan untuk pencapaian indikator sasaran telah dilaksanakan dengan melakukan pelaksanaan kebijakan terkait pengarusutamaan gender mulai dari penyusunan peraturan, koordinasi antar PD terkait PUG, bimbingan teknis terkait perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG), pembinaan keseluruhan sektor terkait pengarusutamaan gender. Ke depannya perlu dioptimalkan koordinasi dan pengawasan terkait implementasi pelaksanaan, perencanaan dan penganggaran responsif gender baik di Perangkat daerah maupun di sektor di luar pemerintah sehingga peran gender bisa merata di seluruh sektor pembangunan.

4. Indeks Perlindungan Anak

a. Penjelasan:

Indeks Perlindungan Anak merupakan ukuran dari segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Indeks Perlindungan Anak (IPA) tahun 2018-2023 disusun dari 27 indikator yang mewakili 5 klaster KHA, setelah dilakukan evaluasi, penghitungan IPA 2024 setelah disusun menjadi 19 indikator mewakili 5 klaster KHA.

Berikut adalah 5 klaster yang melingkupi indikator-indikator tersebut:

- Hak Sipil dan Kebebasan: Kelahiran, identitas, informasi, dan partisipasi;
- Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif: Pencegahan pemisahan anak, anak asuh, dan pengasuhan;
- Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan: Kesehatan bayi, gizi, imunisasi, dan sanitasi;
- Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya: PAUD, wajib belajar, dan fasilitas anak;

- Perlindungan Khusus: Anak dalam situasi darurat, berhadapan dengan hukum, eksploitasi, dan kekerasan.

Rumus Perhitungan:

$$IPA = \sum_{j=1}^5 (W_j \times Indeks K_j)$$

$$Indeks K_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$$

Dimana:

Indeks K_j: nilai indeks Klaster ke-j,

S_{xji}: nilai indikator ke-l pada klaster ke-j yang telah dinormalisasikan,

n_j: banyaknya indikator pada klaster ke-j

Sumber data: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA):

b. Analisis Peningkatan / Penurunan kinerja:

Pendataan Indeks Perlindungan Anak untuk tahun 2025 masih memakai data di tahun 2024 dikarenakan data tersebut baru akan rilis di bulan Desember 2026. Dari data IPA tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 4,91 dari tahun sebelumnya, dimana tahun 2024 sebesar 72,57 sedangkan tahun 2023 sebesar 67,66. Hal ini menunjukkan secara keseluruhan upaya daerah dalam meningkatkan perlindungan anak dari segala aspek berjalan efektif.

Berikut data IPA :

ANAK								
[2.6.1] - Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Dimensi Pembentuknya (2023)								
Tabel								
No	Cakupan	Satuan	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Indeks D5 Perlindungan Khusus	IPA
1	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	Indeks	53,03	75,30	80,68	39,06	86,08	67,66

untuk menjadi pedoman bagi semua sektor dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak yang ada di Kabupaten Belitong Timur.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2-34
Realisasi Akumulasi Tahun 2025 dibandingkan Target Akhir RPJMD
Tahun 2029
Sasaran 2.1.3 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Budaya

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Angka Kemiskinan	Angka	6,69	5,59	83,56
2	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	87,69	88,73	98,83
3	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	72,57	73,05	99,34

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Angka Kemiskinan

Capaian Indikator Angka Kemiskinan sampai dengan target RPJMD Tahun 2029 sebesar 83,56 yang mana masih perlu ditingkatkan lagi upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan, baik itu melalui kebijakan, dan kegiatan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

2. Indeks Pembangunan Gender

Capaian Indikator Indeks Pembangunan Gender sampai dengan target RPJMD Tahun 2029 sebesar 98,83 yang mana sudah sesuai dengan yang diharapkan walaupun data Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025 masih mengacu dengan data tahun 2024 dikarenakan data 2025 belum dipublish yang rencananya akan dirilis pada bulan Maret 2026 melalui website BPS dan KemenPPA.

3. Indeks Perlindungan Anak

Capaian Indikator Indeks Perlindungan Anak sampai dengan target RPJMD Tahun 2029 sebesar 99,34 yang mana sudah sesuai dengan yang diharapkan walaupun data Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025 masih mengacu dengan data tahun 2024. Sama halnya dengan Indikator Pembangunan Gender, data IPA tahun 2025 belum dipublish yang rencananya akan dirilis pada bulan Desember 2026 melalui website Siga KemenPPA.

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran 2.3.1 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Budaya adalah:

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- a. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang.
- b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Alat Bantu
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - Pemberian Layanan Kedaruratan
 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - Pemberian Layanan Rujukan
- 3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
 - a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
 - b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- 4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Makanan
 - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
- 5. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
- 6. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
 - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
7. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
- a. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
8. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
- a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
9. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
- a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
 - b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten.

5. Indeks Pembangunan Pemuda:

a. Penjelasan:

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Kehadiran Website IPP Indonesia ini dapat menjadi rujukan bagi kebijakan dan strategi pembangunan pemuda di Indonesia. Selain itu website ini diharapkan dapat pula menjadi acuan dalam rangka koordinasi lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan, baik pada tingkat pusat maupun daerah sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2022, tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

b. Analisis Peningkatan/ Penurunan Kinerja:

Berdasarkan Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten (PDAK) Beltim 2025, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menunjukkan tren positif. IPP di Beltim meningkat dari 55,33 pada 2020 menjadi 58,17 pada 2023; Proyeksi IPP untuk 2024 diperkirakan 57,67; Kenaikan IPP ini mencerminkan bahwa pembangunan pemuda dalam aspek pendidikan, partisipasi sosial, kesehatan, dan kesejahteraan semakin diperhatikan oleh Pemkab Beltim dan pemangku kepentingan lokal.

Peran pemuda dalam pembangunan juga harus dilihat dalam kerangka sosial-ekonomi daerah. Salah satu tantangan yang dihadapi Beltim adalah kemiskinan. Berdasarkan data portal ekonomi Pemkab Beltim yang mengacu pada data BPS: Persentase penduduk miskin di Beltim tercatat di kisaran 6,69% pada data tahun 2025. Angka kemiskinan ini menjadi perhatian serius karena pemuda dari latar belakang kurang mampu bisa terhambat dalam mengakses pendidikan, pelatihan, dan peluang

wirausaha. Data demografis dan sosial lain dari analisis penduduk Beltim juga menunjukkan bahwa rata-rata ukuran keluarga di Beltim relatif kecil: dari profil kependudukan, terdapat 46.927 keluarga di Kabupaten Beltim dengan rata-rata 2,82 orang per keluarga. Rata-rata lama sekolah di Beltim juga menunjukkan tren naik. Dalam laporan sejak 2018 hingga 2022, angka rata-rata lama sekolah meningkat menjadi sekitar 8,33 tahun sebelum 2023.

Dari segi Pendidikan Pemuda:

Pendidikan Pemuda Persentase penduduk Beltim yang sudah menyelesaikan pendidikan tinggi pada akhir 2024 adalah 5,14% dari total penduduk; Rincian jenjang pendidikan di Beltim akhir 2024: * S1: Doc. : RSUD Muhammad Zein * * * 3,19% dari total penduduk; S2: sekitar 0,10%, S3: 0,003%; Lulusan SMA: 17,2%, SMP: 13,25%, Tamat SD: 25,4%; Penduduk yang belum tamat SD: 15,59%, dan yang tidak/belum sekolah: 23,42%. Data BPS Kabupaten Belitong Timur Dalam Angka 2023 juga menunjukkan distribusi Doc. : Prokom Beltim angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan: misalnya, dari penduduk berumur ≥ 15 tahun.

Partisipasi Kepemudaan dan Kepeloporan:

Salah satu aspek kuantitatif lain yang menunjukkan peran pemuda adalah persentase pemuda pelopor di Belitong Timur. Pemuda pelopor adalah mereka yang menunjukkan kecerdasan, kreativitas, kemandirian, dan kepedulian terhadap masyarakat, sehingga dianggap sebagai inspirator dan pelopor dalam perubahan sosial.

Interpretasi Data dalam Konteks Peran Pemuda:

Dengan melihat data kuantitatif di atas, semakin jelas betapa strategisnya peran pemuda dalam pembangunan Kabupaten Beltim:

1. Basis Demografi Kuat: Karena sebagian besar penduduk berada di usia produktif sekitar 70% dan pemuda muda 15–24 tahun mencakup segmen signifikan, maka program pemberdayaan pemuda dapat berdampak besar secara demografis;
2. Peningkatan IPP: Indeks Pembangunan Pemuda yang terus naik menandakan bahwa pemberdayaan pemuda melalui pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial semakin diperkuat. Ini sesuai dengan

- visi KNPI Beltim yang ingin menciptakan “agen transformasi” yang proaktif dan beretika;
3. Tantangan Pendidikan Tinggi: Dengan hanya sekitar 5,14% penduduk yang menempuh pendidikan tinggi, masih ada ruang luas untuk memperluas akses ke perguruan tinggi, beasiswa, atau program peningkatan kapasitas keilmuan lokal;
 4. Potensi Kolaborasi Ekonomi & Kepemudaan: Karena angka kemiskinan masih signifikan, pemuda yang terlatih (melalui pelatihan digital atau wirausaha) memiliki peluang besar untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan UMKM lokal, sehingga bisa membantu menekan kemiskinan;
 5. Potensi Kepeloporan: Meski data “Pemuda Pelopor” belum sangat rinci, keberadaan program penghargaan dan pengakuan terhadap pemuda kreatif dan inovatif sangat penting: memberi insentif untuk pemuda aktif berkontribusi secara sosial dan ekonomi.

Nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan, mencapai 56,33 pada tahun 2023, naik dari 48,67 pada 2015, dengan target 57,67 pada tahun 2024. IPP diukur berdasarkan 5 domain utama—pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, partisipasi, dan gender—dengan capaian antar provinsi bervariasi antara 53,33 hingga 74,83. Kepulauan Bangka Belitung: 53,67 poin.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan tren positif dengan target mencapai 55,53 poin pada 2024, naik dari 52,67 poin pada 2023. Pada 2025, Babel meraih penghargaan Wirasena karena berhasil menduduki peringkat 9 nasional dalam kenaikan IPP. Peningkatan ini didorong oleh penguatan 5 domain utama: pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, partisipasi/kepemimpinan, dan gender.

Sebagai pembandingan, Indeks Pembangunan Pemuda Kepulauan Bangka Belitung:

- **Pencapaian & Target:** Pada 2022, Babel masuk dalam 4 daerah dengan kenaikan IPP tertinggi di Indonesia (naik 4,50 poin). Target IPP 2024 dinaikkan sebesar 2,86 poin dari tahun sebelumnya.

- **Domain Pembangunan:** Fokus perbaikan meliputi peningkatan angka partisipasi sekolah, peningkatan kesempatan kerja, kesehatan, serta partisipasi aktif pemuda dalam organisasi.
- **Target Usia:** Pengukuran IPP difokuskan pada pemuda berusia 16-30 tahun.

c. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan) :

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terus berupaya meningkatkan sinergi lintas sektor untuk mencapai target IPP yang lebih tinggi, sejalan dengan visi menuju Indonesia Emas.

Penguatan Strategi , melalui KNPI Belitung Timur dan Pembangunan Berbasis Data.

- Mendorong pendidikan tinggi melalui beasiswa lokal, kemitraan dengan perguruan tinggi, dan program pelatihan lanjutan agar persentase pemuda berpendidikan tinggi meningkat;
- Mengembangkan program UMKM pemuda yang menasar pemuda dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah, memanfaatkan potensi mereka sebagai agen ekonomi lokal.
- Memperkuat forum kepeloporan dengan data, misalnya kompetisi pemuda berinovasi atau penghargaan “Pemuda Pelopor”, agar lebih banyak pemuda terlibat aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi;
- Monitoring IPP secara berkala, menggunakan data terbaru, agar pemerintah daerah dan KNPI dapat melakukan evaluasi efektivitas program pemberdayaan pemuda dan memastikan arah kebijakan tetap relevan dengan kebutuhan demografis dan sosial ekonomi.

Misi 3 : Mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sector pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan.

Tujuan 3.1 : meningkatnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

Tabel 3.2-35
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

Indikator		Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2024-2028	Persentase Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024(%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)			
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	-0,03	-3,05	100	3,08	4,30	139,61	139,61	4,36	98,62
2	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	Ribu Rupiah	82.608,71	83.940,00	100	83,940	82,608,71	98,41	98,41	96,750,00	85,39
3	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	Nilai	26,49	26,49	100	26,49	26,49	100	100	36,75	72,09
4	Ratio Gini	Nilai	0,251	0,225	100	0,225	0,251	89,64	89,64	0,192	69,27
Jumlah					100			106,91			81,34

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

a. Penjelasan:

Pertumbuhan ekonomi merupakan variable yang dominan menentukan besaran pada komponen pendapatan negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel asumsi dasar ekonomi makro yang secara positif berhubungan langsung dengan penerimaan dalam negeri baik itu

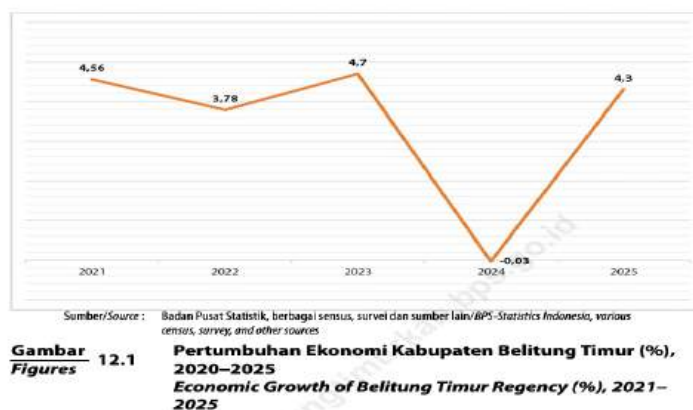
penerimaan pajak dalam negeri (Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Cukai dan Pajak lainnya) maupun penerimaan Negara Bukan Pajak (bagian laba BUMN). Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja:

Laju Pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan, cara mengukurnya dengan mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen, Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Setelah mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 0,03 persen, pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur, mengalami pertumbuhan sebesar 4,30 persen.

15 dari 17 kategori lapangan usaha tumbuh positif kecuali 2 sektor lainnya yang mengalami kontraksi yaitu konstruksi serta jasa keuangan dan asuransi.



Laju Pertumbuhan (c-to-c) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Pengeluaran (Persen)					
Komponen Pengeluaran	2025				
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
Konsumsi Akhir Rumah Tangga	1,31	2,31	2,83	3,10	3,10
Konsumsi Akhir Pemerintah	-6,10	-8,39	-7,47	-5,92	-5,92
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-2,58	-2,69	-1,75	-0,39	-0,39
Lainnya	-	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto	3,12	3,41	3,67	4,30	4,30

Keterangan Data :

PDRB Triwulanan Menurut Pengeluaran terdiri dari 4 Komponen, yaitu:

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT)

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP)

Investasi : PMTB

Lainnya : Net Ekspor, Perubahan Inventori, dan LNPRT

Catatan:

Tahun 2023: Angka sementara

Tahun 2024: Angka sangat sementara

Tahun 2025: Angka sangat sangat sementara

c. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan) :

Program-program/kegiatan pada sektor-sektor strategis dan potensial yang dapat mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan sosial akan tetap terus dimaksimalkan, khususnya industri pengolahan sebagai salah satu *leading sector* penggerak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung Timur, dengan upaya memberikan nilai tambah dari produk yang dihasilkan melalui diversifikasi produk ataupun meningkatkan mutu produk juga kemampuan produksi Industri Kecil dan Menengah. Selain itu juga meningkatkan dukungan Pemerintah Pusat/Daerah berupa pembinaan, penguatan dan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

2. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

a. Penjelasan:

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar

harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk di suatu wilayah yang dapat dibandingkan dengan wilayah lain. PDRB per kapita diperoleh dengan membagi PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang

penduduk pada tahun tersebut. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Belitong Timur atas dasar harga

berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 secara nominal terus mengalami kenaikan.

b. Analisis Peningkatan/ Penurunan Kinerja:

Pada Tahun 2025, penilaian capaian kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita masih menggunakan data Tahun 2024 karena data Tahun 2025 belum tersedia. Oleh sebab itu, nilai realisasi yang digunakan belum mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data tersebut, capaian kinerja PDRB per kapita berada pada tingkat yang mendekati target Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan per kapita masyarakat secara umum masih terjaga, meskipun belum dapat menggambarkan sepenuhnya perkembangan ekonomi pada Tahun 2025.

Evaluasi yang lebih akurat akan dilakukan setelah data resmi Tahun 2025 diterbitkan. Dengan demikian, capaian yang ditampilkan pada tahun pelaporan ini bersifat sementara dan akan disesuaikan pada laporan berikutnya sesuai dengan ketersediaan data.

c. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan) :

Peningkatan Kinerja PDRB per Kapita Kabupaten Belitung Timur diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat melalui penguatan aktivitas ekonomi daerah secara menyeluruh. Pemerintah daerah perlu terus mendorong pengembangan sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi besar, sekaligus menciptakan iklim usaha yang kondusif agar kegiatan ekonomi masyarakat dapat tumbuh lebih merata di seluruh wilayah.

Upaya tersebut perlu didukung dengan peningkatan kualitas pelaku usaha lokal, penguatan akses terhadap permodalan dan pasar, serta dukungan infrastruktur yang menunjang kelancaran kegiatan ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya terpusat pada sektor tertentu, tetapi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

3. Indonesia Blue Economy Index (IBEI)

a. Penjelasan:

Indonesia Blue Economy Index (IBEI) merupakan indikator komposit yang menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi kelautan dan pesisir berbasis prinsip keberlanjutan. Nilai indeks ini disusun berdasarkan berbagai komponen data sektoral yang memerlukan proses pengolahan dan validasi pada tingkat nasional, sehingga publikasi datanya bersifat periodik.

Pada Tahun 2024, *baseline* IBEI Kabupaten Belitung Timur ditetapkan sebesar 26,49, capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi kelautan, pelestarian lingkungan pesisir, serta pemberdayaan masyarakat pesisir telah berjalan sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.

Memasuki Tahun 2025, target IBEI ditetapkan sebesar 26,49. Namun demikian, hingga penyusunan laporan kinerja ini, data resmi IBEI Tahun 2025 belum dipublikasikan, sehingga pengukuran realisasi sementara masih menggunakan *baseline* yang tersedia, yaitu nilai IBEI Tahun 2024 sebesar 26,49. Penggunaan *baseline* dilakukan sebagai bentuk pendekatan administratif dalam pelaporan kinerja, mengingat karakteristik indikator yang bergantung pada rilis data nasional.

Berdasarkan data yang tersedia tersebut, secara angka capaian kinerja Tahun 2025 sementara tercatat telah mencapai target. Namun demikian, kondisi ini belum dapat menggambarkan kinerja riil Tahun 2025, melainkan masih merefleksikan capaian periode sebelumnya. Oleh karena itu, interpretasi capaian kinerja pada tahun berjalan akan disesuaikan kembali setelah data resmi IBEI Tahun 2025 dirilis.

b. Analisis Peningkatan/ Penurunan Kinerja:

Berdasarkan data yang tersedia, nilai *Indonesia Blue Economy Index* (IBEI) Kabupaten Belitong Timur pada Tahun 2024 tercatat sebesar 26,49 dan pada Tahun 2025 target ditetapkan sebesar 26,49, dengan realisasi sementara masih mengacu pada nilai Tahun 2024 karena data terbaru belum dipublikasikan.

Secara numerik, tidak terjadi perubahan nilai indeks antara Tahun 2024 dan data sementara Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi biru berada pada kategori stabil, tanpa peningkatan maupun penurunan yang signifikan.

Di sisi lain, potensi penurunan kinerja tetap perlu diantisipasi apabila terjadi degradasi lingkungan pesisir, praktik pemanfaatan sumber daya yang tidak berkelanjutan, atau menurunnya kesejahteraan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, meskipun capaian kinerja saat ini tergolong terjaga, upaya peningkatan kualitas pembangunan ekonomi biru tetap diperlukan agar nilai indeks ke depan tidak hanya stabil, tetapi menunjukkan tren peningkatan.

Dengan demikian, analisis kinerja IBEI menunjukkan bahwa kondisi saat ini bersifat stabil, namun memerlukan penguatan program dan kebijakan agar tercapai peningkatan kinerja yang lebih progresif pada

periode berikutnya, sejalan dengan prinsip pembangunan kelautan yang berkelanjutan.

c. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan) :

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja *Indonesia Blue Economy Index* (IBEI), Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menetapkan langkah-langkah strategis yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi kelautan, pelestarian lingkungan pesisir, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan tata kelola pembangunan kelautan berkelanjutan.

Upaya peningkatan kinerja diarahkan pada penguatan nilai tambah sektor kelautan, melalui pengembangan hilirisasi hasil perikanan, penyediaan sarana pengolahan dan penyimpanan hasil laut, serta fasilitasi pemasaran produk olahan berbasis sumber daya pesisir. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian daerah sekaligus memperbaiki tingkat pendapatan masyarakat pesisir.

Di sisi lingkungan, dilakukan penguatan perlindungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, meliputi rehabilitasi mangrove, perlindungan terumbu karang, pengendalian abrasi, serta pengurangan pencemaran perairan. Upaya tersebut merupakan langkah preventif dan korektif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi biru.

Pemerintah Daerah juga mendorong pengembangan ekonomi biru melalui penguatan ekowisata bahari berbasis masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip konservasi lingkungan. Upaya ini diarahkan agar pemanfaatan potensi pesisir dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Selain itu, peningkatan kapasitas masyarakat pesisir terus dilakukan melalui pelatihan usaha perikanan ramah lingkungan, pengolahan hasil laut, kewirausahaan, serta dukungan akses permodalan. Penguatan tata kelola dan pengawasan pemanfaatan ruang laut juga dilaksanakan melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan pelibatan masyarakat.

Sebagai pendukung, sistem data dan pemantauan sektor kelautan dan pesisir terus diperkuat guna meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja ekonomi biru pada periode berikutnya.

4. Rasio Gini

a. Penjelasan:

Rasio Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah. Nilai Rasio Gini berada pada rentang 0 sampai dengan 1, di mana nilai yang semakin mendekati 0 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin rendah, sedangkan nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.

Pada Tahun 2024, target Rasio Gini Kabupaten Belitong Timur ditetapkan sebesar 0,251, dengan realisasi sebesar 0,251, sehingga capaian kinerja menunjukkan kondisi distribusi pendapatan masyarakat yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam upaya pengurangan ketimpangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengukuran realisasi sementara Tahun 2025 masih menggunakan data Rasio Gini Tahun 2024 sebagai data terbaru yang tersedia. Pendekatan ini dilakukan secara administratif untuk menjaga kesinambungan pelaporan kinerja, dengan tetap memberikan penjelasan atas keterbatasan ketersediaan data.

Berdasarkan data yang tersedia tersebut, capaian kinerja Tahun 2025 secara angka masih merefleksikan kondisi Tahun 2024, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan dinamika ketimpangan pendapatan pada Tahun 2025.

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja:

Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Semakin rendah nilai Rasio Gini, semakin merata distribusi pendapatan, yang mencerminkan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan data yang tersedia, realisasi Rasio Gini Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 menjadi rujukan utama dalam pengukuran kinerja. Sementara itu, pada Tahun 2025 data resmi belum dipublikasikan, sehingga realisasi sementara masih mengacu pada nilai Tahun 2024. Dengan kondisi tersebut, secara numerik belum terlihat adanya perubahan nilai Rasio Gini, sehingga kinerja pada indikator ini dapat dikategorikan relatif stabil.

Stabilnya nilai Rasio Gini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dan perlindungan sosial masih mampu mempertahankan tingkat ketimpangan pada level sebelumnya. Namun demikian, kondisi ini juga mengindikasikan bahwa belum terjadi penurunan ketimpangan yang signifikan. Artinya, dampak program pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat masih perlu diperkuat agar dapat mendorong perbaikan distribusi pendapatan secara lebih nyata.

Potensi peningkatan ketimpangan tetap perlu diantisipasi, terutama apabila pertumbuhan ekonomi lebih terkonsentrasi pada kelompok tertentu, terjadi keterbatasan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap kesempatan usaha dan lapangan kerja, atau meningkatnya tekanan ekonomi akibat faktor eksternal. Oleh karena itu, meskipun kinerja indikator Rasio Gini saat ini tergolong terjaga, diperlukan langkah lanjutan yang lebih terarah untuk mendorong penurunan tingkat ketimpangan pendapatan.

c. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan) :

Dalam rangka mendorong penurunan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat sebagaimana tercermin dalam indikator Rasio Gini, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menetapkan langkah-langkah perbaikan kinerja yang diarahkan pada penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif, pemerataan kesempatan kerja, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, perikanan, dan usaha berbasis potensi lokal.

Dukungan diberikan dalam bentuk fasilitasi permodalan, peningkatan kapasitas usaha, serta perluasan akses pasar, sehingga masyarakat berpendapatan rendah dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatannya.

Di bidang sosial, dilakukan penguatan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan miskin, guna menjaga daya beli serta mencegah peningkatan ketimpangan akibat tekanan ekonomi. Program ini dilaksanakan secara terpadu dengan kebijakan pengurangan kemiskinan.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.36
Realisasi Akumulasi Tahun 2025 dibandingkan Target Akhir
RPJMD Tahun 2029

Sasaran 3.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita	Ribu Rupiah	82.608,71*	96.750	85,38*
2	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	Nilai	26,49*	36,75	72,08*
3	Rasio Gini	Nilai	0,251*	0,192	76,49*

*data tahun 2024

Sumber: BPS Kabupaten Belitong Timur, 2025

Berdasarkan realisasi indikator kinerja yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2029 pada Sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”, dapat disimpulkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi daerah menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai target jangka menengah secara optimal. Perlu disampaikan bahwa data indikator yang disajikan merupakan data realisasi Tahun 2024, yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025,

mengingat data resmi Tahun 2025 belum dirilis oleh instansi penyedia data terkait.

1. Pada indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, realisasi tercatat sebesar 82.608,71 ribu rupiah, atau mencapai 85,38% dari target akhir RPJMD Tahun 2029 sebesar 96.750 ribu rupiah. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan per kapita masyarakat telah berkembang dengan cukup baik, namun masih diperlukan upaya peningkatan aktivitas ekonomi dan nilai tambah agar target jangka menengah dapat tercapai.
2. Indikator Indonesia Blue Economy Index (IBEI) menunjukkan nilai sebesar 26,49, atau mencapai 72,08% dari target akhir RPJMD Tahun 2029 sebesar 36,75. Capaian ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip ekonomi biru telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan lebih lanjut agar kontribusi sektor kelautan dan pesisir terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat semakin optimal.
3. Pada indikator Rasio Gini, realisasi tercatat sebesar 0,251, sementara target akhir RPJMD Tahun 2029 ditetapkan sebesar 0,192. Dengan demikian, capaian kinerja Rasio Gini mencapai 76,49%. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penurunan ketimpangan pendapatan masih perlu terus diperkuat agar pemerataan hasil pembangunan dapat tercapai sesuai target jangka menengah daerah.

Secara keseluruhan, kinerja pembangunan ekonomi daerah menunjukkan arah yang positif, ditandai dengan capaian PDRB per kapita dan perkembangan ekonomi biru yang cukup baik. Namun demikian, diperlukan penguatan kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang lebih inklusif agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat ditingkatkan sekaligus dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sasaran 3.1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 3.2-37
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Indikator		Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2029	Persen tase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024(%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2025			
1	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Juta Rupiah	1.617560	1.617560	100	3.168.130	1.666.810	52,61	52,61	4.097.310	40,68
2	PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	Juta Rupiah	181.320	181,32	100	191.390	196.150	102,48	102,48	247.308	79,31
3	PDRB Industri Pengolahan	Juta Rupiah	1.066.580	1.066.580	100	1.146.850	1.107.420	96,56	96,56	1.398.690	79,175
4	Tingkat Inflasi	Persen	1,38	1,38	100	3±1	2,69	110,34	110,34	3±1	110,34
Jumlah					100			90,54			77,38

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan:

Adapun tujuan pembangunan daerah yang harus didukung oleh Dinas Perikanan dalam rangka memenuhi Misi ke-3 yaitu **“Menciptakan percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan”** dirumuskan ke dalam Tujuan ke-3 yaitu **“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan”** yang akan diwujudkan melalui Sasaran **“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi”** dengan Indikator Kinerja **“PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan”**.

a. Penjelasan:

Penghitungan statistik neraca nasional mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dikenal sebagai Sistem Neraca Nasional (SNN), SNN adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi, Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDRB dari tahun 2000 ke 2011, Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi PBB yang tertuang dalam Sistem Neraca Nasional 2008 (SNA 2008). Produk Domestik Regional Bruto pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu, Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran, Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya, PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya, Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha, PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Laju Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Laju Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Belitung Timur berfungsi untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan wilayah Kabupaten Belitung Timur. Laju Pertumbuhan PDRB sektor perikanan meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, budidaya, pengolahan dan pemasaran segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan baik di laut maupun di perairan umum dan budidaya (laut, tambak, keramba jaring apung dan kolam).

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Harga Konstan adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar. Dasar harga konstan menggunakan tahun 2011. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-t terhadap nilai pada tahun ke t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke t-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

b. Analisis Peningkatan/ Penurunan Kinerja:

Kenaikan PDRB ini mengindikasikan membaiknya kontribusi subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian daerah, yang didorong oleh peningkatan produksi, perbaikan produktivitas, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan sektor-sektor unggulan. Selain itu, stabilitas harga komoditas, peningkatan permintaan hasil pertanian dan perikanan, serta dukungan sarana dan prasarana produksi turut berkontribusi terhadap peningkatan nilai PDRB. Secara keseluruhan, pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ini mencerminkan ketahanan sektor primer dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur serta menjadi dasar yang penting bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

1. Dari sektor Perikanan telah melakukan berbagai kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut :

Produksi perikanan tangkap di tahun 2025 sebesar 41.861,552 ton. Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 618,543 Ton atau sebesar 1,5% dari tahun sebelumnya. Produksi perikanan tangkap dipengaruhi oleh perubahan cuaca/iklim yang sulit untuk diprediksi. Cuaca ekstrim ini menyebabkan berkurangnya jumlah trip nelayan yang berimbas kepada hasil tangkapan. Ukuran kapal yang digunakan relatif berukuran kecil dibawah 7 GT. Kegiatan penangkapan ikan masih belum menggunakan teknologi yang memadai. Selain itu kurangnya kuota subsidi BBM untuk keperluan Nelayan melaut.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah melaksanakan kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan produksi hasil tangkapan ikan nelayan, diantaranya adalah :

1. memberikan bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan berupa shelter nelayan,
2. bantuan kapal penangkap ikan,
3. alat penangkap ikan,
4. alat bantu penangkapan ikan, dan
5. bahan pembuatan kapal perikanan. Selain itu juga telah dilaksanakan pembinaan dan pendampingan kelompok nelayan.

Produksi Perikanan budidaya tahun 2025 sebesar 1.435,028 ton. Mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024, produksi perikanan budidaya tahun 2024 sebesar 2.628,18 ton. Data produksi perikanan budidaya sebagian besar disumbang oleh data produksi tambak udang. Tambak udang ini sebagian besar dikelola oleh perusahaan besar. Di tahun 2025 budidaya udang mengalami serangan penyakit hingga kasus Cecium 137 yang menyebabkan udang gagal ekspor sehingga banyak pembudidaya besar yang menurunkan jumlah produksinya bahkan ada yang berhenti produksi karena terkendala

pemasaran dan lainnya. Persaingan pasar juga menjadi permasalahan ikan dari luar Kabupaten yang masuk ke Kabupaten Belitung Timur.

Produksi perikanan tangkap di tahun 2025 sebesar 41.861,552 ton. Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 618,543 Ton atau sebesar 1,5% dari tahun sebelumnya. Produksi perikanan tangkap dipengaruhi oleh perubahan cuaca/iklim yang sulit untuk diprediksi. Cuaca ekstrim ini menyebabkan berkurangnya jumlah trip nelayan yang berimbas kepada hasil tangkapan. Ukuran kapal yang digunakan relatif berukuran kecil dibawah 7 GT. Kegiatan penangkapan ikan masih belum menggunakan teknologi yang memadai. Selain itu kurangnya kuota subsidi BBM untuk keperluan Nelayan melaut.

2. Dinas Pertanian dan Pangan telah melakukan :

- Melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas produksi, kualitas hasil pertanian, serta nilai tambah komoditas unggulan daerah. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, penguatan kelembagaan petani, peningkatan kompetensi sumber daya manusia pertanian, serta penerapan teknologi tepat guna.
- Selain itu, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur juga mendorong pengembangan hilirisasi produk pertanian, peningkatan akses pasar, serta penguatan kemitraan dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Langkah ini bertujuan untuk memperluas peluang usaha, meningkatkan daya saing produk, serta memperkuat rantai nilai komoditas pertanian.
- Secara berkelanjutan, upaya-upaya tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.
- Kenaikan PDRB ini mengindikasikan membaiknya kontribusi subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian daerah, yang didorong oleh peningkatan produksi,

perbaikan produktivitas, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan sektor-sektor unggulan. Selain itu, stabilitas harga komoditas, peningkatan permintaan hasil pertanian dan perikanan, serta dukungan sarana dan prasarana produksi turut berkontribusi terhadap peningkatan nilai PDRB. Secara keseluruhan, pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ini mencerminkan ketahanan sektor primer dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur serta menjadi dasar yang penting bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

c. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan) :

Peningkatan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur dapat diwujudkan melalui penguatan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan daerah secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong modernisasi usaha tani dan perikanan melalui penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas sarana dan prasarana produksi, serta penguatan kapasitas SDM pelaku usaha. Selain itu, pengembangan hilirisasi dan industri pengolahan berbasis komoditas lokal perlu diperluas guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Akses pembiayaan, pemasaran, dan kemitraan usaha juga diperkuat, termasuk melalui pengembangan UMKM dan koperasi sektor pertanian dan perikanan. Di sisi lain, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan serta adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi fokus untuk menjaga kesinambungan produksi. Sinergi lintas sektor dan dukungan kebijakan pemerintah daerah yang kondusif diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang produktif, sehingga kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Belitung Timur terus meningkat.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2-38
Realisasi Akumulasi Tahun 2024 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2029
Sasaran 3.1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2024	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi				
	- PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Juta Rupiah	52,61	4.097.310	40,68

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

Realisasi PDRB pertanian, Kehutanan dan perikanan pada tahun 2025 sebesar 1.666,81 juta rupiah. Nilai pada tahun 2024 belum mencapai target RPJMD 2029 dengan persentase capaian kinerja sebesar 39,48 persen.

Dampak PDRB pertanian, Kehutanan dan perikanan pada masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan antara lain:

- Sektor Perikanan memberikan peranan yang berarti terhadap lapangan kerja di Kabupaten Belitung Timur, dimana terjadi perluasan kesempatan kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan wilayah, menentukan kelayakan sektor perikanan untuk diprioritaskan dalam pembangunan daerah. Sektor perikanan dapat meningkatkan arus pendapatan daerah dengan menambah tingkat konsumsi masyarakat, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru.
- Pertumbuhan yang berkelanjutan dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan akan mempercepat pengembangan sektor unggulan lainnya, memperkuat ekonomi lokal, dan memperluas dampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi, adalah:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan Sub Kegiatan:

- 1) Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
- b. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Lain, dengan sub kegiatan:
 - 1) Sub kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/kota, dengan sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3. Program Penyuluhan Pertanian, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - 2) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian

4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 - Sub kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil.
 - c. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT.
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 1. Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
 2. Sub kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
 - b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan:
 1. Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 2. Sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
6. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota.
 - Sub kegiatan Kapal Pengawas Perikanan yan di rawat.

7. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dengan kegiatan:
- a. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil.
 - 1. Sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
 - 1. Sub kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
 - c. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

a. Penjelasan:

PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum adalah salah satu lapangan usaha yang mencerminkan aktivitas ekonomi sektor pariwisata dan jasa konsumsi. Indikator penyediaan akomodasi, makan dan minum digunakan untuk menggambarkan kinerja dan perkembangan sektor jasa pariwisata dan jasa konsumsi di suatu daerah, indikator ini juga dapat mencerminkan tingkat aktivitas usaha, hotel, penginapan, restoran dan rumah makan, permintaan masyarakat dan wisatawan, daya tarik pariwisata daerah dan kemampuan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja. Jika indikator ini meningkat, berarti aktivitas ekonomi pada sektor akomodasi, makan dan minum semakin berkembang, namun sebaliknya jika indikator menunjukkan angka penurunan berarti melemahnya permintaan atau aktivitas usaha di sektor ini.

b. Analisis Peningkatan /Penurunan kinerja:

Pada tahun 2024 PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha untuk kategori PRDB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum sebesar 316,5 milyar rupiah, sedangkan untuk tahun 2025 ini data resminya belum dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Belitung Timur, namun dari pengamatan dilapangan jika terjadi penurunan ataupun kenaikan tidak akan terlalu *signifikan* terjadi penurunan ataupun kenaikan dari tahun sebelumnya.

Kenaikan atau penurunan indikator PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan Minum dipengaruhi beberapa hal, diantaranya :

- a. Peningkatan kunjungan wisatawan yang terjadi karena adanya libur panjang, banyaknya event dan promosi pariwisata.

Dari data yang ada, pada tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Kabupaten Belitung Timur sejumlah 63.672 orang dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara hanya 27 orang, sedangkan pada tahun 2025 jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Kabupaten Belitung Timur sejumlah 81.217 orang dan kunjungan wisatawan mancanegara meningkat menjadi 133 orang. Terjadi presentase peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 27,71%, lebih lanjut hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2-39
Data Wisatawan Kabupaten Belitung Timur

No.	Jenis Wisatawan	Jumlah	
		2024	2025
1.	Wisatawan Domestik	63.672	81.217
2.	Wisatawan Mancanegara	27	133
JUMLAH		63.699	81.350

- a. Pertumbuhan usaha hotel, restoran dan kafe.

Khusus untuk usaha rumah makan/restoran di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025 mengalami penambahan jumlah yang cukup menggembirakan, pada tahun 2024 jumlah rumah makan/restoran sebanyak 122 buah, sedangkan pada tahun 2025 jumlah bertambah menjadi 229 buah, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.-40**Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Belitung Timur**

No.	Nama Kecamatan	Tahun	
		2024	2025
1.	Dendang	7	9
2.	Simpang Pesak	6	12
3.	Gantung	27	44
4.	Simpang Renggiang	7	10
5.	Manggar	49	110
6.	Damar	17	29
7.	Kelapa Kampit	9	15
JUMLAH		122	229

Selain hal tersebut, cukup banyaknya event sepanjang tahun 2025 memberikan dampak positif bagi pelaku penyedia makanan dan minuman, event seperti kegiatan Lomba Fashion Show Hari Jadi Belitung Timur ke 22 yang berlangsung di Situ Kulong Minyak pada tanggal 26 Januari 2025 dan kegiatan Pemilihan Bujang Dayang Belitung Timur Tahun 2025 yang dilaksanakan di pantai Nyiur Melambai pada tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan 6 Juli 2025 serta kegiatan bazar dan event olahraga yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025.

c. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan) :

Untuk lebih meningkatkan PDRB sektor akomodasi, makan minum dimasa selanjutnya, perlu langkah-langkah yang harus dilakukan diantaranya sebagai berikut :

1. Penguatan sektor Pariwisata, diantaranya dengan mengembangkan destinasi wisata unggulan dan desa wisata, menyelenggarakan event pariwisata dan budaya secara berkala dan meningkatkan promosi digital dan branding pariwisata daerah.
2. Peningkatan kualitas usaha akomodasi dan kuliner, diantaranya dengan pelatihan SDM perhotelan dan kuliner dengan mengedepankan prinsip *hospitality* dan *higienitas*, serta mendorong inovasi menu dan konsep usaha yang mengikuti tren pasar.
3. Dukungan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, salah satu caranya dengan mempermudah akses permodalan dan pembiayaan serta pendampingan usaha dan pemasaran digital.

4. Perbaikan Infrastruktur dan Aksesibilitas, mendorong peningkatan akses transportasi menuju ke destinasi wisata dan penyediaan fasilitas umum pendukung (amenitas) yang memadai.

Tabel 3.2-41**Realisasi Akumulasi Tahun 2025 dibandingkan Target Akhir****RPJMD Tahun 2029****Sasaran 3.1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi				
	- PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	Juta Rupiah	96,56	247.308	79,31

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

Realisasi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum pada tahun 2024 sebesar 316.500 juta rupiah, nilai pada tahun 2024 telah mencapai target RPJMD 2029 dengan persentase capaian 100 persen.

Adapun dampak PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan Minum pada masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi diantaranya :

1. Penciptaan lapangan kerja, ketika PDRB sektor ini meningkat, artinya aktivitas hotel, penginapan, restoran, kafe dan usaha kuliner lainnya semakin mejadi ramai sehingga membutuhkan tenaga kerja (karyawan hotel, pelayan dan koki).
2. Penguatan ekonomi lokal dan UMKM, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sangat erat dengan keberadaan UMKM sehingga produk lokal (kerajinan dan makanan khas daerah) lebih mudah terserap pasar yang pada gilirannya mampu meningkatkan UMKM menjadi naik kelas dan lebih berkelanjutan.

3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatnya PDRB penyediaan akomodasi makan minum memberikan tambahan PAD melalui pajak hotel dan restoran sehingga dapat menambah ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk membiayai program dan kegiatan lainnya.

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi adalah:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 1. Sub kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.
 2. Sub kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.
 3. Sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.
 - b. Kegiatan Penetapan tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/Kota.
 2. Sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kabupaten/Kota.
2. Program Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.
 1. Sub kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota.
 2. Sub kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri.

3. PDRB Industri Pengolahan

a. Penjelasan:

PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2011.

Produk Domestik Regional Bruto pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran, keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya.

Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut, PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha, PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; *Real Estate*; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan, Cara mengukurnya dengan mengurangi nilai PRDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen, Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Indikator PDRB Industri Pengolahan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, capaian tahun 2025 sebesar Rp.1.066.580,00. Adapun PDRB Sektor Industri Pengolahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2-42
PDRB Kabupaten Belitung Timur
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2025

Kategori/ Lapangan Usaha	PDRB ADHK (Juta Rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Industri Pengolahan	1.163.840	1.233.350	1.278.770	1.066.580	1.066.580*

Sumber : * Angka Sementara - Belitung Timur Dalam Angka Tahun 2025 – BPS.

b. Analisis Peningkatan /Kelemahan kinerja:

Kategori Industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian serta produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan.

PDRB Industri Pengolahan merupakan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor manufaktur di suatu wilayah (provinsi atau kabupaten/kota) dalam periode tertentu. Indikator ini mencerminkan kontribusi **sektor industri** terhadap total perekonomian daerah tersebut. Sektor ini mencakup kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi, baik secara mekanis, kimiawi,

maupun tangan. Data PDRB sektor ini sangat penting untuk mengukur tingkat industrialisasi suatu daerah dan efektivitas kebijakan ekonomi lokal.

PDRB Kabupaten Belitung Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) pada sektor industri pengolahan tahun 2024 mencapai Rp2,29 juta. Meskipun menjadi sektor penggerak, sektor ini tercatat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -16,60%, hal tersebut dikarenakan tutupnya smelter Timah di Belitung Timur akibat dari permasalahan tataniaga timah.

c. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan) :

Berdasarkan rilis BPS, Industri Pengolahan menjadi salah satu sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Triwulan I Tahun 2025 (t-on-t). Data rinci PDRB Kabupaten Belitung Timur tahun 2025, yang mencakup lapangan usaha industri pengolahan, dipublikasikan dalam "Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka 2025" yang dirilis pada Februari 2025.

Laju pertumbuhan Sektor industri pengolahan menunjukkan kontribusi signifikan, sejalan dengan posisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi. Industri pengolahan di Kabupaten Belitung Timuri erat kaitannya dengan pengolahan hasil tambang (seperti timah, pasir kuarsa) dan hasil pertanian/perkebunan.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2-43
Realisasi Akumulasi Tahun 2025 dibandingkan Target Akhir
RPJMD Tahun 2029
Sasaran 3.1.1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

No	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi				
	PDRB Industri Pengolahan	Juta Rupiah	1.146.850*	1.444.340	79,40

* Angka Sementara - Belitung Timur Dalam Angka Tahun 2025 – BPS.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

Capaian indikator tujuan **PDRB Industri Pengolahan** pada tahun 2025 sebesar Rp.1.146.850,00. Nilai pada tahun 2025 belum mencapai target RPJMD 2029 dengan persentase capaian kinerja sebesar 79,40 persen. Nilai ini juga masih menggunakan nilai capaian pada tahun 2024, dikarenakan BPS Kabupaten Belitung Timur baru akan merilis data Tahun 2025 pada tanggal 28 Februari 2026.

Berdasarkan data awal tahun 2025, industri pengolahan diproyeksikan tetap menjadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berdampak positif pada struktur PDRB Kabupaten Belitung Timur. Sektor ini, bersama dengan pertambangan dan pertanian, didorong untuk meningkatkan nilai tambah produk daerah.

Laju Pertumbuhan Industri pengolahan di tingkat Provinsi Bangka Belitung menunjukkan kinerja impresif sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi pada triwulan awal tahun 2025, berpotensi searah dengan pengembangan industri hilirisasi di Belitung Timur. Industri pengolahan di Belitung Timur difokuskan pada pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan produk tambang (seperti kaolin dan pasir kuarsa) untuk meningkatkan nilai tambah.

Dalam rangka meningkatkan PDRB Industri Pengolahan, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah berupaya meningkatkan PDRB sektor pengolahan, yaitu:

1. Melakukan Kegiatan Pemberdayaan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.



Foto Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Kemitraan dengan Pelaku Usaha Besar



Foto Penandatanganan Kesepakatan Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Besar Belitung Timur dengan UMKM

- Melakukan Kegiatan pengembangan industri kecil dan menengah dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi industri kecil menengah serta melalui kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan teknologi.



Foto Kegiatan KIK Meran Sosialisasi Perizinan dan Pendampingan Pembuatan NIB ke pelaku usaha di Desa Senyubuk Kec. Kelapa Kampit



Foto Kegiatan Pemantauan Kesesuaian Penerbitan Perizinan Tanda Daftar Gudang di PT Steelindo Wahana Perkasa

- Melakukan Pendampingan industri kecil dan menengah.



Foto Kegiatan Layanan Klinik LKPM di MPP Kab. Belitong Timur

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran **Meningkatnya pertumbuhan ekonomi**, pada **Urusan Pilihan Bidang Perindustrian** adalah:

- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dengan kegiatan :
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan :
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan perwilayahan Industri;
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri;

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat;
 - Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.
2. Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran **Meningkatnya pertumbuhan ekonomi**, pada **Urusan Pilihan Bidang Perdagangan** adalah:
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
 - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat.
 - b. Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan sub Kegiatan :
 - Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
 - c. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan sub Kegiatan Pengawasan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.
 - Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan, dan sub kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang;
- b. Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal.

4. Tingkat Inflasi

a. Penjelasan:

Tingkat inflasi adalah persentase kenaikan harga umum barang dan jasa secara terus-menerus dalam periode waktu tertentu, yang menunjukkan penurunan daya beli mata uang. Diukur menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) oleh BPS, inflasi mencerminkan kesehatan ekonomi dan memengaruhi biaya hidup serta pertumbuhan ekonomi.

b. Analisis Peningkatan/ Penurunan Kinerja:

- Pada Desember 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) di Kabupaten Belitung Timur sebesar 2,69 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,21.
- Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks pada beberapa kelompok pengeluaran, yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 11,41 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,20 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,75 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,77 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,70 persen; kelompok transportasi sebesar 0,26 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,24 persen; serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,14 persen.
- Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2025 secara umum menunjukkan adanya kenaikan secara year on year (y-on-y). Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kabupaten Belitung Timur, pada Desember 2025 terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,69 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,40 pada Desember 2024 menjadi 107,21 pada Desember 2025. Sementara tingkat inflasi month to month (m-to-m) sebesar 0,30 persen dan inflasi year to date

(y-to-d) atau kenaikan IHK Desember 2025 terhadap Desember 2024 sebesar 2,69 persen.

Tabel. 3.2-44
Inflasi year on year Kabupaten Belitung Timur
pada bulan Desember 2025



Grafik 3.2-3
Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kabupaten Belitung Timur 2025



c. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan) :

Dalam hal pengendalian Tingkat Inflasi, Pemerintah daerah melakukan langkah antisipasi melalui gerakan pasar murah, peningkatan inspeksi pasar, dan penguatan kemitraan logistik untuk menjaga stabilitas harga. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, yaitu dengan :

1. Melakukan penguatan koordinasi TPID,
2. Pemantauan harga dan pasokan secara rutin untuk menjaga stabilitas harga.
3. pelaksanaan operasi pasar, serta memastikan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok.

Sasaran 3.1.2 Meningkatnya pertumbuhan investasi

Tabel 3.2-45

Meningkatnya pertumbuhan investasi

Indikator		Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Akumu lasi Capaia n s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2029	Persen tase Capaia n Kinerja (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024(%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2025			
1	Nilai Investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Juta Rupiah	1.068.106	1.068.106,79	100	468.000	1.073.894,75	238,64	238,64	546.000	196,684
Jumlah					100			238,64			196,684

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

Nilai Investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)

a. Penjelasan:

Indikator Nilai Investasi Tahunan Berskala Nasional (PMA/PMDN) pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Belitung Timur periode 2025–2029 tidak mengalami perubahan. Perbedaan hanya terdapat pada narasi sasaran, di mana pada IKU periode 2021–2026 indikator Nilai Realisasi Investasi Tahunan Berskala Nasional (PMA/PMDN) digunakan untuk mencapai sasaran **Meningkatnya Investasi**, sedangkan pada IKU periode 2025–2029 digunakan untuk mencapai sasaran **Meningkatnya Pertumbuhan Investasi**. Oleh karena itu, indikator tersebut masih digunakan dalam Laporan Kinerja Kabupaten Belitung Timur.

Indikator Nilai Investasi Tahunan Berskala Nasional (PMA/PMDN) diambil berdasarkan Data Nilai Realisasi Investasi Tahunan yang menggambarkan jumlah investasi yang benar-benar direalisasikan oleh penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri dalam satu tahun berjalan. Nilai ini mencerminkan besaran investasi yang telah digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan usaha seperti pembangunan sarana produksi, pengadaan peralatan serta biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan

dalam pelaksanaan operasional usaha, sehingga menjadi indikator utama dalam menilai kinerja pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

Sumber data indikator ini berasal dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh pelaku usaha pemilik Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (PBBR) yang dikelola oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Pelaporan LKPM merupakan kewajiban bagi penanam modal PMA dan PMDN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan secara berkala setiap triwulan atau semester tergantung pada skala usaha. Pelaksanaan LKPM memiliki dasar hukum antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta peraturan pelaksana yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM nomor 5 tahun 2025 tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*), sehingga data realisasi investasi yang dihasilkan bersifat resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka meningkatkan nilai realisasi investasi daerah, DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025 berperan aktif melalui pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha agar memenuhi kewajiban pelaporan LKPM secara tepat waktu dan akurat melalui layanan Klinik LKPM, pelaksanaan pelayanan perizinan, serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Selain itu, DPMPTSP juga melakukan pemutakhiran data potensi investasi daerah, memfasilitasi kemitraan antara investor dan pelaku usaha besar, serta melaksanakan promosi investasi. Peran tersebut diharapkan dapat memperkuat iklim investasi daerah dan mendorong realisasi rencana investasi agar dapat tercatat secara optimal dalam nilai realisasi investasi Kabupaten Belitung Timur.

Untuk mengukur realisasi indikator Nilai Investasi Tahunan Berskala Nasional (PMA/PMDN) dipergunakan rumus :

Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) + Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**Data Realisasi tahun 2025 diperoleh:**

- Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 898.187,69 Juta rupiah
- Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 175.707,06 Juta rupiah

Perhitungan reallisasi indikator menjadi :

898.187,69 juta rupiah + 175.707,06 juta rupiah = 1.073.894,75 juta rupiah

Data Realisasi tahun 2024 diperoleh:

- Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 659.248,36 Juta rupiah
- Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 408.858,43 Juta rupiah

Perhitungan reallisasi indikator menjadi :

659.248,36 juta rupiah + 408.858,43 juta rupiah = 1.068.106,79 juta rupiah

Dari data tersebut perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Capaian kinerja tahun 2025 di hitung sebagai berikut : $1.073.894,75 / \text{Rp } 450.000,- \times 100\% = \mathbf{238,64\%}$
- Capaian kinerja tahun 2024 di hitung sebagai berikut : $1.068.107,- / \text{Rp } 472.466,- \times 100\% = \mathbf{226,07\%}$

b. Analisis kekurangan /Peningkatan Kinerja:

Terjadi sedikit peningkatan nilai realisasi investasi tahunan beskala nasional (PMA/PMDN) pada tahun 2025 dibanding tahun 2024 sebesar Rp 5.787.961.375,- atau 5.787,96 juta rupiah, meningkat sebesar 0,54 persen dengan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 238,64 persen dari target yang

ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Belitung Timur sebesar 450.000 juta rupiah.

Secara keseluruhan, nilai realisasi investasi tahunan beskala nasional (PMA/PMDN) tahun 2025 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2024. Total realisasi investasi pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp1.068.106.791.799, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi Rp1.073.894.753.174. Kenaikan ini menunjukkan bahwa iklim investasi daerah masih terjaga, meskipun pertumbuhan yang terjadi relatif terbatas.

Peningkatan realisasi investasi tahun 2025 tersebut terutama dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Meningkatnya realisasi investasi pada Sektor Perindustrian, yang melonjak dari Rp28.096.940.869 (2,63%) pada tahun 2024 menjadi Rp446.979.655.672 (41,62%) pada tahun 2025. Kenaikan signifikan ini dipicu oleh mulai terealisasinya investasi dari usaha baru di bidang industri pengolahan, khususnya pembangunan pabrik *plywood* dan veneer milik PT Babel Energi yang berlokasi di Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur. Selain itu, kegiatan pembelian dan pemeliharaan peralatan yang dilakukan oleh PT. Steelindo Wahana Perkasa (SWP) dan PT. Parit Sembada juga berperan dalam peningkatan realisasi investasi pada sektor industri.
2. Masih terjaganya kontribusi sektor-sektor utama, khususnya Sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan, yang meskipun mengalami penurunan dari Rp785.394.118.751 (73,53%) pada tahun 2024 menjadi Rp492.285.250.884 (45,84%) pada tahun 2025, tetap menjadi penyumbang terbesar realisasi investasi. Penurunan tersebut terjadi karena pada tahun 2024 realisasi investasi sektor ini didominasi oleh kegiatan *replanting* perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar, sedangkan pada tahun 2025 kegiatan *replanting* masih berlangsung namun tidak sebesar tahun sebelumnya.
3. Adanya peningkatan pada beberapa sektor pendukung, antara lain Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Konstruksi yang meningkat dari Rp5.195.801.500 (0,49%) menjadi Rp8.425.429.217 (0,78%), serta

Sektor Ketenagakerjaan dan Peternakan yang juga menunjukkan kenaikan meskipun kontribusinya masih relatif kecil.

Tabel 3.2-46
Data Realisasi Investasi Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2021-2025
Berdasarkan Sektor Usaha

SEKTOR	REALSASI INVESTASI				
	2021	2022	2023	2024	2025
Sektor Tanaman Pangan & Perkebunan	291.959.873.127	723.664.440.604	135.163.074.84 ₄	785.394.118.751	492.285.250.884
Sektor Peternakan	-	-	-	53.494.227	163.373.760
Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan	80.000.000	30.000.000	-	104.500.000	21.888.100
Sektor Perindustrian	98.173.437.920	452.835.989.733	84.033.205.620	28.096.940.869	446.979.655.672
Sektor Perdagangan	11.688.823.000	6.049.305.825	32.292.342.457	46.988.779.123	16.670.197.070
Sektor Kelautan dan Perikanan		31.825.753.040	58.012.090.476	75.834.629.842	72.819.304.270
Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	19.082.170.000	10.235.502.000	3.111.965.600
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral/ Pertambangan	51.319.875.000	151.201.759.778	264.857.872.21 ₈	83.955.457.530	23.204.822.885
Sektor Ketenaganukliran	-	-	-	-	
Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Konstruksi	19.244.234.000	3.143.700.000	11.618.495.982	5.195.801.500	8.425.429.217
Sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	-	3.547.813.000	6.181.810.000	21.055.819.500	3.384.723.466
Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	-
Sektor Pariwisata		712.000.000	4.898.500.000	4.399.590.582	2.551.050.000
Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi					1.483.092.250
Sektor Keagamaan	-	-	-	-	-
Sektor Pertahanan dan Keamanan	-	-	-	-	-
Sektor Ketenagakerjaan	-	-	-	300.000.000	575.000.000
Jasa Lainnya		490.000.000		6.492.157.875	2.219.000.000
Jumlah	472.466.243.047	1.373.500.761.9₈₀	616.139.561.59₇	1.068.106.791.79₉	1.073.894.753.1₇₄

Sumber : Satu Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2025 dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kab. Belitung Timur (2021-2024), diolah.



*Nilai dalam juta rupiah

Pada tahun 2025, realisasi investasi daerah masih didominasi oleh Sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan dengan nilai sebesar Rp492.285,25 atau 45,84%, meskipun nilainya menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp785.394,12 atau 73,53%. Tingginya realisasi investasi sektor perkebunan pada tahun 2024 tersebut terutama disebabkan oleh dominannya kegiatan *replanting* yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sementara pada tahun 2025, realisasi investasi sektor perkebunan juga masih didorong oleh kegiatan *replanting*, namun jumlah dan skala kegiatannya tidak sebesar tahun sebelumnya, sehingga nilai investasinya relatif menurun.

Sebaliknya, Sektor Perindustrian mengalami peningkatan realisasi investasi yang sangat signifikan pada tahun 2025, dari Rp28.096,94 (2,63%) pada tahun 2024 menjadi Rp446.979,66 (41,62%). Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh adanya usaha baru yang merealisasikan investasi pada tahun 2025 di bidang industri veneer, serta kegiatan penambahan peralatan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh perusahaan industri minyak mentah inti kelapa sawit (CPO) sehingga mendorong lonjakan nilai investasi sektor perindustrian secara keseluruhan.

Adapun Sektor Kelautan dan Perikanan relatif stabil dengan realisasi investasi sebesar Rp72.819,30 (6,78%) pada tahun 2025, sedikit menurun

dibandingkan tahun 2024. Sementara itu, Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral/Pertambangan mengalami penurunan cukup signifikan, dari Rp83.955,46 (7,86%) pada tahun 2024 menjadi Rp23.204,82 (2,16%) pada tahun 2025. Pada tahun 2025, Sektor Perdagangan juga mulai masuk dalam lima besar realisasi investasi dengan nilai Rp16.670,20 atau 1,55%, menggantikan sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran struktur dan sumber utama realisasi investasi dari tahun 2024 ke tahun 2025, dengan meningkatnya peran sektor perindustrian sebagai pendorong utama investasi daerah

Tabel 3.2.47
Data Realisasi Investasi Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2021-2025
Berdasarkan Status Penanam Modal

Status Penanam Modal	Nilai Realisasi Investasi				
	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Penanam Modal Asing (PMA)	382.132.256.047	257.653.529.555	46.108.428.183	659.248.359.275	898.187.687.968
Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)	90.333.987.000	1.115.847.232.425	570.031.133.414	408.858.432.524	175.707.065.206
Jumlah	472.466.243.047	1.373.500.761.980	616.139.561.597	1.068.106.791.799	1.073.894.753.174

Untuk perbandingan kinerja dengan standar nasional, indikator Nilai Investasi Tahunan Berskala Nasional (PMA/PMDN) data nasional untuk tahun 2025 merujuk pada indikator Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM yaitu Nilai Realisasi Penanaman Modal seluruh Indonesia diperoleh nilai **Rp 1.931,2 Triliun, atau tercapai 101,3 persen** dari target Presiden Rp 1.905,6 Triliun sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 nilai realisasi investasi diperoleh sebesar **Rp 10,33 Triliun atau tercapai 60,06 persen dari target yang ditetapkan oleh** Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM Rp 17,2 Triliun.

Kabupaten Belitung Timur menyumbang sebesar Rp 1.073.106,75 Juta atau 0,00056 persen dari nilai realisasi nasional atau 10,40 persen dari nilai realisasi investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025.

REALISASI PER KAB/KOTA TAHUN 2025					
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG					
Rp. (Juta)					
KABUPATEN / KOTA	Q1	Q2	Q3	Q4	2025
Kab. Bangka	1.058.325	2.090.465	788.837	225.079	4.162.706
Kota Pangkal Pinang	1.007.799	1.057.685	308.734	247.548	2.621.766
Kab. Belitung Timur	91.379	746.585	81.538	154.392	1.073.895
Kab. Belitung	56.687	501.768	61.761	109.547	729.762
Kab. Bangka Tengah	170.919	176.697	243.843	106.549	698.009
Kab. Bangka Barat	111.678	201.710	237.149	65.590	616.127
Kab. Bangka Selatan	80.854	148.178	140.882	57.336	427.250

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

c. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan) :

Dalam rangka meningkatkan Nilai Investasi PMA/PMDN pada tahun 2026, Pemerintah di Kabupaten Belitung Timur melakukan upaya:

1. Meningkatkan promosi potensi investasi daerah.

Melaksanakan promosi investasi yang lebih terarah, khususnya potensi unggulan daerah, untuk menarik minat investor PMA dan PMDN.

2. Memperkuat iklim penanaman modal.

Melakukan pemutakhiran data potensi investasi serta mendorong kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

3. Mengoptimalkan pelayanan dan fasilitasi perizinan berusaha.

Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui sosialisasi, koordinasi lintas instansi, serta layanan jemput bola perizinan bagi pelaku usaha, melalui inovasi "KIK MERAN".

4. Meningkatkan pendampingan dan pengawasan pelaporan LKPM.

Melakukan pendampingan, sosialisasi/pembinaan, serta pengawasan secara berkelanjutan dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban di bidang penanaman modal terutama dalam hal penyampaian laporan LKPM secara tepat waktu dan akurat.

5. Memfasilitasi penyelesaian hambatan investasi.

Menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya melalui kegiatan fasilitasi bersama perangkat daerah dan pihak terkait.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari periode RPJMD tahun 2025-2029. Pada RPJMD 2025-2029 target indikator Nilai Investasi tahunan berskala nasional (PMDN/PMA) ditetapkan sampai dengan tahun 2030 sehingga target capaian sampai dengan akhir periode RPJMD untuk indikator ini sampai dengan tahun 2030 diakumulasi sebesar Rp 3.050.000 juta.

Tabel 3.2-48
Realisasi Akumulasi Tahun 2025 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2029

Sasaran 3.1.2 Meningkatnya Pertumbuhan Investasi

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD s/d Tahun 2030	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Nilai Investasi tahunan berskala nasional (PMDN/PMA)	Juta rupiah	1.073.894,75	3.050.000	35,21

Berdasarkan tabel diatas capaian akumulasi realisasi nilai investasi tahunan berskala nasional (PMDN/PMA) tahun 2025 sebesar Rp 1.073.894,75 juta dibanding dengan rencana target realisasi sampai dengan tahun 2030 sebesar Rp 3.050.000 juta dicapai sebesar 35,21 persen. Tahun 2025 merupakan periode pertama di RPJMD tahun 2025-2029.

Pemerintah Kabupaten Belitong Timur terus berupaya untuk selalu meningkatkan indikator nilai investasi tahunan berskala nasional (PMDN/PMA) ini dengan menjalankan program dan kegiatan di tahun 2025 sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)

2. Program Promosi Penanaman Modal

- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

- Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
 - Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha (**Direfocusing**)
 - Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal

Berikut kegiatan yang mendukung sasaran meningkatnya realisasi Penanaman modal selama tahun 2025 yang memiliki manfaat langsung ke masyarakat:

1. Melakukan kegiatan Fasilitasi Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM. Pada kegiatan ini DPMPTSP berperan sebagai fasilitator Pelaku usaha besar dalam menjalin kemitraan dengan pelaku usaha kecil/UMKM. Pada tahun 2025 terdapat 4 pelaku usaha kecil/ UMKM yang menjalin kesepakatan kemitraan dengan 2 pelaku usaha besar diantaranya:
 - a. PT. Pratama Unggul Sejahtera sebagai pelaku usaha besar yang bergerak di bidang perkebunan menjalin kemitraan dengan tiga pelaku usaha kecil, yaitu Koperasi Barokah Mitra Mandiri Selinsing, Koperasi Tri Karya Makmur, dan Koperasi Pratama Buding Sejahtera, dengan pola kemitraan inti-plasma. Pola kemitraan ini merupakan kerja sama usaha antara perusahaan besar sebagai pihak inti dengan usaha kecil atau UMKM

sebagai pihak plasma, di mana perusahaan inti berperan dalam pembinaan dan penjaminan keberlangsungan usaha plasma melalui penyediaan akses permodalan, teknologi, sarana produksi, pembinaan manajemen, serta kepastian pemasaran, sedangkan pihak plasma bertindak sebagai pelaku produksi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

- b. PT. Berkah Akuakultur Bahari sebagai pelaku usaha besar yang bergerak dibidang usaha perikanan, menjalin kemitraan dengan Toko Irfan, dengan pola kemitraan Distribusi / rantai pasok, dimana Toko Irfan sebagai pemasok perlengkapan bumbu dapur untuk catering pegawai PT. Berkas Akuakultur Bahari.

**Kegiatan Fasilitasi Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN)
dengan UMKM**



Foto Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Kemitraan dengan Pelaku Usaha Besar



Foto Penandatanganan Kesepakatan Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Besar Belitung Timur dengan UMKM

2. Melakukan pelayanan perizinan kepada masyarakat melalui kegiatan KIK MERAN (Keliling Kampung Melayani Perizinan), yaitu layanan jemput bola yang memberikan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sosialisasi perizinan berusaha berbasis risiko kepada pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil di kecamatan dan desa. Kegiatan ini mempermudah masyarakat dalam memperoleh legalitas usaha, meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya perizinan, serta mendorong tumbuhnya usaha formal baru yang memiliki kepastian hukum. Legalitas usaha yang diperoleh melalui NIB menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk mengembangkan kegiatan usahanya dan merealisasikan rencana investasi, sehingga secara kumulatif berkontribusi terhadap peningkatan realisasi investasi daerah.

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal



Foto Kegiatan KIK Meran Sosialisasi Perizinan dan Pendampingan Pembuatan NIB ke pelaku usaha di Desa Senyubuk Kec. Kelapa Kampit



Foto Kegiatan Pemantauan Kesesuaian Penerbitan Perizinan Tanda Daftar Gudang di PT Steelindo Wahana Perkasa

3. Melakukan pengawasan penanaman modal melalui pengawasan lapangan untuk memastikan pelaksanaan investasi berjalan sesuai dengan perizinan, rencana usaha, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pengawasan lapangan, dapat mengidentifikasi lebih dini kendala yang dihadapi pelaku usaha, memberikan pembinaan dan pendampingan, serta mendorong kepatuhan dan keberlanjutan usaha.

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal



Foto Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ke Pelaku Usaha Sektor Perikanan

4. Melakukan layanan KLINIK LKPM bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan dalam pelaporan realisasi investasi

Kegiatan Layanan Klinik LKPM



Sasaran 3.1.3 Meningkatnya kesempatan kerja

Tabel 3.2-49
Meningkatnya kesempatan kerja

Indikator		Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024(%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)			
1	Tingkat Pengangguran terbuka	Persen	2.63	2.63	100	2.60	3.05	82,70	82,70	1.54	50,49
Jumlah					100			82,70			50,49

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

Tingkat Pengangguran terbuka

a. Penjelasan:

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja namun belum memperoleh pekerjaan. Penduduk yang termasuk dalam kategori penganggur adalah mereka yang tidak bekerja

dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan pada periode tertentu. TPT digunakan untuk mengukur kondisi dan dinamika pasar kerja serta efektivitas kebijakan pembangunan ketenagakerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting dan digunakan untuk menganalisa serta mengukur capaian hasil pembangunan. Semakin rendah nilai TPT menunjukkan semakin baik kinerja pembangunan ketenagakerjaan, sedangkan peningkatan TPT mengindikasikan masih adanya tantangan dalam penyerapan tenaga kerja dan kesesuaian antara ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Besaran tingkat pengangguran terbuka akan mengurangi kesejahteraan yang dilihat dari PDRB perkapita.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dihitung dengan membandingkan jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja pada suatu periode tertentu. Perhitungan ini dilakukan dengan membagi jumlah penduduk usia kerja yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja, kemudian dikalikan seratus persen. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan besarnya persentase pengangguran dalam angkatan kerja dan digunakan sebagai dasar untuk menilai kondisi pasar kerja serta efektivitas kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan.

b. Analisis Peningkatan /Penurunan Kinerja:

Pada tahun 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Belitung Timur tercatat sebesar 3.05 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 2.63 persen. Meskipun demikian, angka TPT tersebut masih berada di bawah tingkat pengangguran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Belitung Timur relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi.

Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Belitung Timur Menurut Jenis Kelamin, 2024–2025 dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 3.2-50
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Belitung Timur
Menurut Jenis Kelamin, 2024–2025

Indikator Ketenagakerjaan	2024			2025		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Penduduk Usia Kerja (jiwa)	53.624	50.087	103.711	54.280	50.756	105.036
Angkatan Kerja (jiwa)	46.535	26.642	73.177	47.214	25.361	72.575
Bekerja (jiwa)	45.277	25.977	71.254	45.934	24.429	70.363
Pengangguran (jiwa)	1.258	665	1.923	1.280	932	2.212
Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	7.089	23.445	30.534	7.066	25.395	32.461
TPAK (%)	86,78	53,19	70,56	86,98	49,97	69,10
TPT (%)	2,70	2,50	2,63	2,71	3,67	3,05

Sumber: BPS, Sakernas 2024–2025

Jumlah pengangguran pada tahun 2025 tercatat sebanyak 2.212 orang, yang terdiri dari 932 perempuan dan 1.280 laki-laki, sehingga pengangguran masih didominasi oleh angkatan kerja laki-laki. Peningkatan TPT ini dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan angkatan kerja yang belum sepenuhnya diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja baru, serta masih terbatasnya kesempatan kerja yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur terus mendorong pelaksanaan program peningkatan keterampilan, perluasan kesempatan kerja, serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif, khususnya untuk meningkatkan partisipasi dan penyerapan tenaga kerja perempuan, sehingga diharapkan dapat menekan tingkat pengangguran secara keseluruhan pada periode selanjutnya.

Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Jumlah Penduduk Bekerja dan Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan tahun 2025 dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 3.2-51
Jumlah Penduduk Bekerja dan Pengangguran
Menurut Tingkat Pendidikan, 2025

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran	Total
≤ SD	27.929	456	28.385
SMP Sederajat	12.669	140	12.809
SMA Sederajat	23.214	1.145	24.359
Perguruan Tinggi	6.551	471	7.022

Sumber: BPS, Sakernas 2025

Dalam tabel dijelaskan kondisi penduduk bekerja dan pengangguran di Kabupaten Belitong Timur tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan. Berdasarkan tabel tersebut, pengangguran didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, yaitu sebanyak 1.145 orang atau sekitar 51,76 persen dari total pengangguran, yang menunjukkan tingginya persaingan kerja pada kelompok pendidikan menengah atas. Pengangguran dengan pendidikan perguruan tinggi tercatat sebanyak 471 orang atau sekitar 21,29 persen, yang antara lain disebabkan oleh kecenderungan lulusan diploma dan sarjana memiliki kriteria serta preferensi tertentu dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga belum seluruhnya terserap oleh lapangan usaha yang tersedia. Selanjutnya, pengangguran dengan pendidikan setara SD dan di bawahnya, termasuk yang tidak lulus SD maupun yang tidak atau belum pernah bersekolah, berjumlah 456 orang atau sekitar 20,61 persen, sedangkan pengangguran lulusan SMP merupakan yang paling rendah, yaitu sebanyak 140 orang atau sekitar 6,33 persen.

Dari sisi penduduk yang bekerja, mayoritas masih didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SD ke bawah, yaitu sebanyak 27.929 orang atau sekitar 39,69 persen, yang mencerminkan bahwa struktur pasar kerja di daerah ini masih banyak menyerap tenaga kerja berpendidikan rendah. Penduduk bekerja lulusan SMA sederajat berjumlah 23.214 orang atau sekitar 32,99 persen, diikuti lulusan SMP sebanyak 12.669 orang atau sekitar 18,01 persen, sementara penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi relatif paling sedikit, yaitu 6.551 orang atau

sekitar 9,31 persen, yang mengindikasikan terbatasnya kesempatan kerja yang membutuhkan kualifikasi pendidikan tinggi.

Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Belitong Timur berdasarkan Jumlah dan Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2024–2025 dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 3.2-52
Jumlah dan Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2024–2025

c.

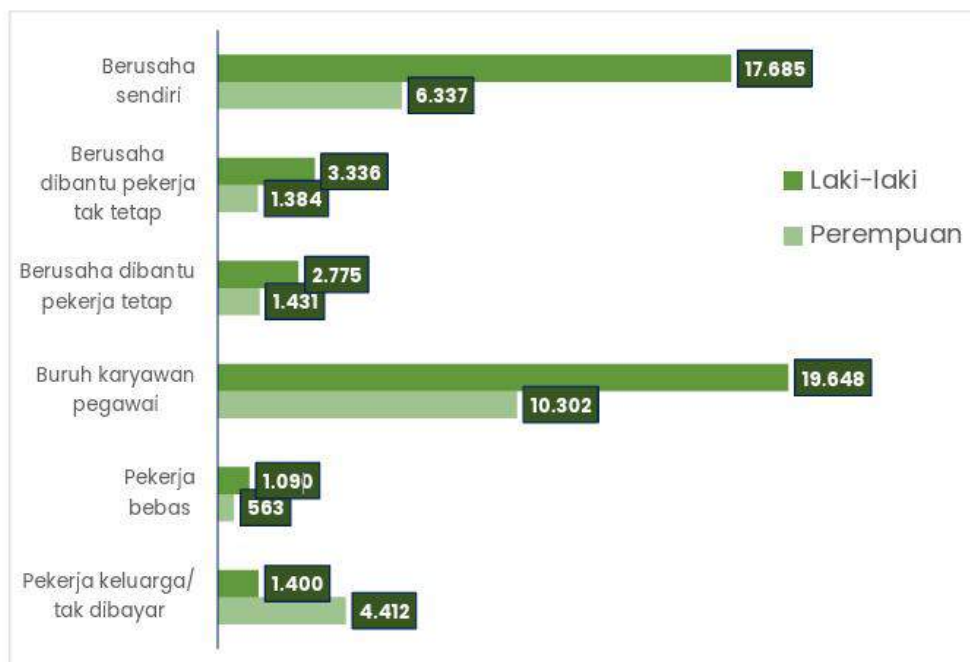
Lapangan Pekerjaan Utama	Satuan	2024			2025		
		Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
Pertanian	Jumlah	13.763	5.482	19.245	16.518	4.421	20.939
	Persen	30,4	21,1	27,01	35,96	18,1	29,76
Industri	Jumlah	20239	3663	23902	19027	4120	23147
	Persen	44,7	14,1	33,54	41,42	16,87	32,9
Jasa	Jumlah	11.275	16.832	28.107	10.389	15.888	26.277
	Persen	24,9	64,8	39,45	22,62	65,04	37,34
Total	Jumlah	45.277	25.977	71.254	45.934	24.429	70.363
	Persen	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Sakernas 2024–2025

Pada tahun 2025 penyerapan tenaga kerja terbanyak pada lapangan pekerjaan Jasa yaitu sebanyak 26.277 orang atau sekitar 37,34 persen, Terjadi penurunan dari tahun 2024 dimana jumlah tenaga kerjanya sebanyak 28.107 orang. Penyerapan tenaga kerja terbanyak pada lapangan usaha jasa dikarenakan penurunan aktivitas pertambangan dan penggalian sehingga masyarakat beralih ke lapangan usaha pertanian dan jasa . Penyerapan tenaga kerja terbanyak kedua di tahun 2025 adalah pada sektor Industri yaitu sebesar 32,90 persen atau sebanyak 23.147 orang yang terdiri dari 19.027 orang laki-laki dan 4.120 orang perempuan. Jika dipersentasekan berdasarkan jenis kelamin jumlah laki-laki usia 15 tahun keatas yang bekerja pada sektor industri sebesar 41,42 persen dan perempuan sebesar 16,87 persen. Selanjutnya, jumlah penduduk yang bekerja pada sektor Pertanian sebesar 20.939 orang yang terdiri dari 16.518 laki-laki dan 4.421 perempuan. Secara persentase jumlah penduduk laki-laki yang bekerja pada sektor Pertanian sebesar 35,96

persen dari keseluruhan penduduk laki-laki yang bekerja sedangkan perempuan sebesar 18,10 persen. Dari tiga lapangan usaha tersebut, penduduk laki-laki usia kerja sebagian besar bekerja pada lapangan pekerjaan Industri. Sementara penduduk perempuan usia kerja mayoritas bekerja di sektor Jasa.

Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2025



Sumber: BPS, Sakernas 2025

Dari gambar diatas diketahui bahwa selama tahun 2025 penduduk Kabupaten Belitong Timur baik laki-laki maupun perempuan paling banyak bekerja sebagai buruh, karyawan atau pegawai. Jika dilihat dari struktur penyerapan tenaga kerjanya, penduduk laki-laki yang bekerja sebagai buruh berjumlah 19.648 orang, berusaha sendiri 17.685 orang, berusaha dibantu pekerja tidak tetap 3.336 orang serta berusaha dibantu pekerja tetap sebesar 2.775 orang. Untuk penduduk perempuan yang bekerja sebagai buruh atau karyawan sebesar 10.302 orang, berusaha sendiri 6.337 orang serta pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga sebanyak 4.412 orang. Persentase penduduk perempuan yang bekerja sebagai pekerja keluarga sekitar 18,06 persen dari keseluruhan penduduk perempuan yang bekerja. Ketergantungan penduduk yang bekerja sebagai pekerja keluarga lebih banyak terjadi pada perempuan dibanding laki-

laki. Hal ini terkait dengan peran laki-laki sebagai kepala keluarga sehingga laki-laki perlu mendapatkan penghasilan dengan bekerja secara dibayar.

Tabel 3.2-53

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota di provinsi Kepulauan Bangka Belitung (persen), 2020-2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.05	1.54	50.49%

c. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan) :

Terjadi peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja belum sepenuhnya optimal, khususnya pada kelompok usia produktif. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan kemampuan pasar kerja dalam menyediakan kesempatan kerja. Selain itu, TPT perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki mencerminkan belum optimalnya akses dan kesempatan kerja yang setara bagi tenaga kerja perempuan.

Di sisi lain, pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah penduduk bekerja berimplikasi pada bertambahnya jumlah pengangguran. Penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), terutama pada perempuan, juga mengindikasikan masih terdapat hambatan dalam partisipasi kerja, baik yang bersifat struktural maupun sosial. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program ketenagakerjaan guna meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka secara berkelanjutan.

Sebagai upaya penanganan permasalahan ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah perlu memperkuat program

peningkatan kualitas tenaga kerja yang berorientasi pada pelatihan berbasis kompetensi dan kebutuhan pasar kerja, serta mendorong sertifikasi keahlian bagi pencari kerja guna meningkatkan daya saing dan peluang penempatan kerja. Selain itu, pengembangan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi, fasilitasi penempatan tenaga kerja, serta penguatan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi menjadi langkah strategis yang perlu didukung oleh peningkatan kualitas dan ketersediaan instruktur serta pemenuhan sarana dan prasarana pelatihan sesuai standar. Upaya tersebut dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi lintas lembaga dan kemitraan dengan sektor swasta agar sumber daya pendukung pelatihan dapat dimanfaatkan secara optimal, efektif, dan berkelanjutan. Kegiatan ini diarahkan pada penguatan sinergi dengan lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, asosiasi profesi, serta dunia usaha dan dunia industri dalam penyediaan instruktur praktisi, optimalisasi pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi yang selaras dengan standar kompetensi kerja dan kebutuhan pasar kerja, serta perluasan dukungan sarana dan prasarana melalui pemanfaatan fasilitas lintas lembaga dan kemitraan swasta. Dengan meningkatnya efektivitas koordinasi lintas lembaga dan peran aktif sektor swasta, diharapkan mutu dan relevansi pelatihan kerja dapat ditingkatkan secara signifikan sehingga peserta pelatihan lebih siap memasuki dan bersaing di dunia kerja.

Untuk tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Belitung Timur, pada bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja saat ini tengah menjalin kerja sama dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia, di mana ada 10 peserta yang sedang menjalani pemagangan. Selain itu, dilaksanakan pelatihan bahasa Jepang bagi 4 (empat) orang peserta. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Belitung Timur juga bekerja sama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Belitung dalam penyelenggaraan pelatihan Pengadministrasian Perkantoran dan Desain Grafis Muda. Selain itu, kedepannya perlu dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor melalui peningkatan intensitas komunikasi dan sinkronisasi dengan lembaga

pelatihan kerja, perangkat daerah terkait, serta sektor swasta. Upaya tersebut didukung dengan pemetaan ulang terhadap lembaga pelatihan kerja yang memiliki kesiapan sumber daya manusia, instruktur, serta sarana dan prasarana yang memadai, sehingga kerja sama yang dibangun dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitong Timur juga mendorong optimalisasi dukungan sarana dan prasarana melalui skema kolaborasi dan kemitraan dengan sektor swasta maupun lembaga vertikal guna meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan ketenagakerjaan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka secara berkelanjutan.

Pada Tahun 2025, Bidang Koperasi dan UKM melaksanakan Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro yang diikuti oleh 40 orang pelaku usaha yang berasal dari Kabupaten Belitong Timur. Setelah pelaksanaan pelatihan, tercatat sebanyak 7 (tujuh) pelaku usaha telah berhasil menjalin kemitraan, yang menunjukkan adanya tindak lanjut konkret dari kegiatan tersebut. Pelatihan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro ini diarahkan sebagai upaya pembinaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka mendorong pengembangan usaha melalui pemanfaatan produk-produk koperasi dan UKM, sekaligus mengoptimalkan potensi lokal yang tersedia di daerah.

Pada Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek, pembinaan hubungan industrial memiliki keterkaitan yang tidak langsung namun strategis terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan berperan dalam menciptakan stabilitas dan keberlanjutan usaha, mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja, serta meningkatkan iklim investasi dan produktivitas tenaga kerja. Kondisi tersebut secara kumulatif berkontribusi terhadap pengendalian bahkan penurunan TPT melalui terjaganya kesempatan kerja dan meningkatnya daya serap tenaga kerja.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2-54
Realisasi Akumulasi Tahun 2025 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2029

Sasaran 3.1.3: Meningkatnya Kesempatan Kerja

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.05	1.54	50.49%

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2025 sebesar **3.05 persen** dan target RPJMD tahun 2029 sebesar **1.54 persen**, capaian kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai **50.49 persen**. Perhitungan capaian ini menggunakan pendekatan indikator negatif, di mana semakin rendah nilai TPT menunjukkan kinerja yang semakin baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya penurunan TPT masih belum optimal dan memerlukan percepatan pelaksanaan program ketenagakerjaan. Kondisi ini dipengaruhi oleh terbatasnya penyerapan tenaga kerja baru serta belum sepenuhnya selarasnya kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja, serta kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pencapaian target penurunan TPT sesuai dengan RPJMD tahun 2029.

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran Sasaran 3.1.3:

Meningkatnya Kesempatan Kerja adalah:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan:

- a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Koordinasi Lintas lembaga dan Kerja Sama dengan sektor Swasta untuk Penyediaan instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
2. Program Hubungan Industrial, dengan kegiatan:
 - a. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Misi 4 : Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas dan memadai untuk pemerataan kesejahteraan.

Tujuan 4.1 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata.

Tabel 3.2-55

Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata

Indikator		Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target DDJMD Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)			
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Nilai	N/A	N/A	-	73,925	71,17	96,27	96,27	81,22	87,63
Jumlah								96,27			87,63

Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah

a. Penjelasan:

Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi dan kualitas infrastruktur wilayah, seperti jalan, jembatan, serta infrastruktur pendukung lainnya.

Indeks ini disusun dengan menggabungkan beberapa indikator utama, sehingga memberikan gambaran kondisi infrastruktur wilayah secara lebih menyeluruh.

Pengukuran indeks dilakukan dengan memperhatikan dua aspek utama, yaitu tingkat konektivitas antar wilayah serta indeks infrastruktur wilayah. Penggabungan kedua aspek tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya meningkatkan akses antar wilayah, tetapi juga memperhatikan kualitas dan fungsi infrastruktur yang tersedia.

Dengan pendekatan tersebut, Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah diharapkan dapat menjadi alat ukur yang representatif dalam menilai capaian pembangunan infrastruktur wilayah serta sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan pada periode selanjutnya.

Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) adalah indikator komposit yang mengukur ketersediaan, kualitas, dan sebaran infrastruktur fisik (jalan, air, energi, telekomunikasi) serta layanan dasar di suatu wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. IPI sering digunakan untuk memetakan kesenjangan pembangunan antardaerah, seperti membedakan wilayah maju dan tertinggal.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat masif, terutama melalui penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Hingga tahun 2024–2025, fokus utama pemerintah meliputi pemerataan konektivitas, ketahanan energi, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hingga laporan ini disampaikan, belum dilakukan perhitungan terkait dengan Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Belitung Timur.

Sasaran 4.1.1 Meningkatnya konektivitas antar wilayah

Tabel 3.2-56

Meningkatnya konektivitas antar wilayah

Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024(%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)			
1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Angka	63,10	63,10	100	75,83	74,8	98,6	98,6	80,67	92,73
Jumlah				100			98,6			92,73

Rasio Konektivitas Antar Wilayah

a. Penjelasan:

Dalam RPJMD tahun 2025 - 2029, Dinas Perhubungan tergabung dalam Misi Keempat yaitu Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas dan memadai untuk pemerataan kesejahteraan dengan sasaran Meningkatnya konektivitas antar wilayah. Rasio konektivitas antar wilayah merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keterhubungan antar kabupaten dan kota dalam suatu wilayah, baik dari sisi jaringan transportasi, infrastruktur pendukung, maupun aksesibilitas antar pusat kegiatan. Rasio ini mencerminkan kemampuan suatu kabupaten/kota dalam menjalin hubungan fungsional dengan wilayah sekitarnya guna mendukung pergerakan penduduk serta distribusi barang dan jasa.

Rasio konektivitas dihitung berdasarkan jumlah trayek dan lintasan yang ada di Kabupaten Belitung Timur dengan memperhitungkan bobot angkutan jalan dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Rasio Konektivitas Antar Wilayah = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$

IK1 (Angkutan Jalan) = $(\text{Jumlah trayek yg dilayani pada Kabupaten/Kota} \times$

bobot

trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten/Kota tersebut);

$IK2$ (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (Jumlah lintas penyeberangan

yang beroperasi pada Kabupaten/Kota tersebut x bobot lintas) dibagi (Jumlah

kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/Kota tersebut).

Bobot Trayek atau Lintas :

a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot =1;

b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0,8;

c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3x dalam seminggu), bobot = 0.5

Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :

1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30);
2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50);
3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70);
4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100).

Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$.

Keterangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan

lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan

SDP = 30,

bobot angkutan jalan = 70)

- a. Perhitungan IK1 (Angkutan Jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)

Hasil Perhitungan IK1 = $(\dots \times \dots) / \dots = \dots$

Hasil Perhitungan IK1 = $(19 \times 0,99) / 20 = 0,94$

- b. Perhitungan IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten/kota tersebut x bobot lintas) dibagi (Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)

Hasil Perhitungan IK2 = $(\dots \times \dots) / \dots = \dots$

Hasil Perhitungan IK2 = $(3 \times 0,5) / 5 = 0,30$

Hasil perhitungan rasio konektivitas Kabupaten/Kota

$(IK1 \dots \times 70) + (IK2 \dots \times 30) = \dots + \dots = \dots$

Hasil perhitungan rasio konektivitas Kabupaten Belitung Timur yaitu:

$(IK1 \ 0,94 \times 70) + (0,30 \times 30) = 65,8 + 9 = 74,8$

$IK1 = (19 \times 1) / 20 = 0,94$

$IK2 = (3 \times 0,5) / 5 = 0,30$

Tabel 3.2-57

Rekapitulasi Data Pelayanan Trayek yang terlayani

No	Layanan	Total Trayek	Rata – Rata Bobot Trayek	Keterangan
1	Jumlah Trayek Terlayani			
	a. Antar Kota dalam Kabupaten/Kota	5	1	Frekuensi lebih dari 5x dalam seminggu
	b. Antar Kota Antar Kabupaten/Kota	14	0,97	Frekuensi lebih dari 5x dalam seminggu & Frekuensi 3-4x dalam seminggu
	JUMLAH	19	0,99	
2	Jumlah Kebutuhan Trayek			
	a. Antar Kota Antar Kabupaten/Kota	5	1	Frekuensi lebih dari 5x dalam seminggu
	b. Antar Kota Antar Kabupaten/Kota	15	1	
	JUMLAH	20	1	

Tabel 3.2-58
Rekapitulasi Data Pelayanan Lintasan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

No	Layanan	Total Lintas	Rata – Rata Bobot Lintas	Keterangan
1	Jumlah Lintas Terlayani	3	0,5	frekuensi rendah (<3x dalam seminggu)
2	Jumlah Kebutuhan Lintas	5	0,5	

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja:

Rasio konektivitas antar wilayah mengalami naik turun setiap tahunnya. Ketersediaan jumlah angkutan umum baik darat maupun laut sering mengalami perubahan menyesuaikan dengan kebutuhan armada dan jumlah penumpang. Kurang optimalnya pelabuhan yang ada dikarenakan pendangkalan di sekitar wilayah perairan sungai Manggar sehingga kapal tidak bisa bersandar dan harus mengangkut penumpang di tengah laut juga menjadi kendala untuk kelancaran mobilitas di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

Pada tahun 2025 capaian indikator rasio konektivitas antar wilayah mengalami peningkatan yaitu sebesar 74,8 sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar 71,2. Peningkatan indikator rasio konektivitas antar wilayah ini berasal dari penambahan bus sekolah dan wilayah yang terlayani yaitu di Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Pesak dan Kecamatan Renggiang serta penambahan rute Kawasan Strategis Pariwisata Nasional oleh PT. Perum Damri dengan pemberian subsidi melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Berikut rincian data kebutuhan trayek angkutan darat dan trayek yang telah terlayani di Kabupaten Belitung Timur:

Tabel 3.2-59
RINCIAN DATA KEBUTUHAN TRAYEK :

No	Kode	Rute	Layanan	Frekuensi	Keterangan
1	49213	Manggar – Tanjung Pandan (via Renggiang)	AKDP	> 5x dalam seminggu	Tinggi
2	49213	Manggar – Bandara (Tanjung Pandan)	AKDP	> 5x dalam seminggu	Tinggi
3	49213	Manggar - Tanjung Pandan (via Dendang)	Perintis	> 5x dalam seminggu	Tinggi
4	49213	Manggar - Tanjung Pandan (via Kampit)	AKDP	> 5x dalam seminggu	Tinggi
5	49213	Manggar-Kampit-Tg.Tinggi-Tanjung Pandan	KSPN	> 5x dalam seminggu	Tinggi

No	Kode	Rute	Layanan	Frekuensi	Keterangan
6	49414	Damar – Manggar	Angdes	> 5x dalam seminggu	Tinggi
7	49414	Simpang Renggiang – Manggar	Angdes	> 5x dalam seminggu	Tinggi
8	49414	Kelubi – Manggar	Angdes	> 5x dalam seminggu	Tinggi
9	49414	Tanjung Kelumpang – Dendang	Angdes	> 5x dalam seminggu	Tinggi
10	49414	Dendang-Nyuruk	Angdes	> 5x dalam seminggu	Tinggi
11	49414	Simpang Pesak - Dendang	Angdes	> 5x dalam seminggu	Tinggi
12	49414	Lintang - Simpang Tiga	Angdes	> 5x dalam seminggu	Tinggi
13	49414	Liring - Simpang Tiga	Angdes	> 5x dalam seminggu	Tinggi
14	49414	Kecamatan Kelapa Kampit	Bus Sekolah	> 5x dalam seminggu	Tinggi
15	49414	Kecamatan Dendang	Bus Sekolah	> 5x dalam seminggu	Tinggi
16	49414	Kecamatan Manggar	Bus Sekolah	> 5x dalam seminggu	Tinggi
17	49414	Kecamatan Damar	Bus Sekolah	> 5x dalam seminggu	Tinggi
18	49414	Kecamatan Renggiang	Bus Sekolah	> 5x dalam seminggu	Tinggi
19	49414	Kecamatan Gantung	Bus Sekolah	> 5x dalam seminggu	Tinggi
20	49414	Kecamatan Simpang Pesak	Bus Sekolah	> 5x dalam seminggu	Tinggi

]

Tabel 3.2-60

RINCIAN DATA TRAYEK YANG DILAYANI

No	Kode	Rute	Layanan	Frekuensi	Ket.	Bobot
1	49213	Manggar – Tanjung Pandan (via Renggiang)	AKDP	7xseminggu	Tinggi	1
2	49213	Manggar – Bandara (Tanjung Pandan)	AKDP	7xseminggu	Tinggi	1
3	49213	Manggar - Tanjung Pandan (via Dendang)	PERINTIS	7xseminggu	Tinggi	1
4	49213	Manggar - Tanjung Pandan (via Kampit)	AKDP	7xseminggu	Tinggi	1
5	49213	Manggar-Kampit-Tg.Tinggi-Tanjung Pandan	KSPN	> 5x dalam seminggu	Tinggi	1
6	49414	Damar – Manggar	Angdes	6xseminggu	Tinggi	1
7	49414	Simpang Renggiang – Manggar	Angdes	6xseminggu	Tinggi	1
8	49414	Kelubi – Manggar	Angdes	3xseminggu	Sedang	0,8
9	49414	Tanjung Kelumpang – Dendang	Angdes	4xseminggu	Sedang	0,8

No	Kode	Rute	Layanan	Frekuensi	Ket.	Bobot
10	49414	Dendang-Nyuruk	Angdes	5xseminggu	Tinggi	1
11	49414	Simpang Pesak - Dendang	Angdes	5xseminggu	Tinggi	1
12	49414	Lintang - Simpang Tiga	Angdes	6xseminggu	Tinggi	1
	49414	Liring - Simpang Tiga	Angdes	6xseminggu	Tinggi	1
13						
14	49414	Kecamatan Kelapa Kampit	Bus Sekolah	5x dalam seminggu	Tinggi	1
15	49414	Kecamatan Dendang	Bus Sekolah	5x dalam seminggu	Tinggi	1
16	49414	Kecamatan Simpang Pesak	Bus Sekolah	5x dalam seminggu	Tinggi	1
17	49414	Kecamatan Damar	Bus Sekolah	5x dalam seminggu	Tinggi	1
18	49414	Kecamatan Gantung	Bus Sekolah	5x dalam seminggu	Tinggi	1
19	49414	Kecamatan Simpang Renggang	Bus Sekolah	5x dalam seminggu	Tinggi	1

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat trayek angkutan darat yang belum terlayani yaitu pada angkutan bus sekolah di Kecamatan Manggar, dan terdapat 2 (dua) trayek angkutan yang frekuensi pergerakannya hanya 3x dalam seminggu yaitu trayek Kelubi – Manggar, Tanjung Kelumpang – Dendang. Hal ini dikarenakan jumlah penumpang yang relatif sedikit dan kondisi kendaraan yang kurang memadai. Selain itu pada beberapa wilayah seperti pada kecamatan Kampit dan kecamatan Gantung dikelompokkan ke dalam trayek AKDP antar Kabupaten karena melewati rute tersebut.

Pada sektor transportasi laut, terdapat 5 lintasan yang ditetapkan berdasarkan letak geografis serta pulau – pulau berpenduduk yang ada di Kabupaten Belitung Timur seperti Pulau Buku Limau dan Pulau Long. Pada tahun 2025, wilayah perairan Belitung Timur telah melayani lintasan Manggar – Ketapang, Manggar – Sadai dengan menggunakan kapal Sabuk Nusantara, sedangkan untuk pulau – pulau berpenduduk menggunakan kapal penumpang dan barang dari Manggar – Buku Limau milik Pemerintah Daerah dan Swasta yang pengawasannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur. Kurang optimalnya pelabuhan yang ada dikarenakan pendangkalan di sekitar wilayah perairan sungai Manggar sehingga kapal tidak bisa bersandar dan harus mengangkut penumpang di tengah laut juga menjadi kendala untuk kelancaran mobilitas di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

Adapun rincian data kebutuhan dan data lintasan yang terlayani dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2-61
RINCIAN DATA KEBUTUHAN LINTASAN

No	Lintasan	Jalur	Frekuensi	Keterangan
1	Manggar – Ketapang	Tol Laut	< 3x seminggu	Rendah
2	Manggar – Sadai	Tol Laut	< 3x seminggu	Rendah
3	Manggar – Jakarta	Penyeberangan	< 3x seminggu	Rendah
4	Manggar – Buku Limau	Penyeberangan	< 3x seminggu	Rendah
5	Manggar – Pulau Long	Penyeberangan	< 3x seminggu	Rendah

Tabel 3.2-62
RINCIAN DATA LINTAS YANG DILAYANI

No	Lintasan	Jalur	Frekuensi	Keterangan	Bobot
1	Manggar – Ketapang	Tol Laut	< 3x seminggu	Rendah	0,5
2	Manggar – Sadai	Tol Laut	< 3x seminggu	Rendah	0,5
3	Manggar – Buku Limau	Penyeberangan	< 3x seminggu	Rendah	0,5

c. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan) :

Dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Belitung Timur, Dinas Perhubungan telah berupaya untuk melakukan pengendalian dan pengawasan serta sosialisasi ke para pemilik kendaraan untuk menambah armada angkutan umum serta penambahan bus sekolah di seluruh kecamatan di Kabupaten Belitung Timur. Dari 7 (tujuh) kecamatan yang ada, 6 (enam) kecamatan telah tersedia bus sekolah bagi para pelajar terdiri dari 5 (lima) bus sekolah milik Pemerintah Daerah di kecamatan Gantung, kecamatan Damar, Kecamatan Kampit, Kecamatan Simpang Pesak dan Kecamatan Dendang serta 1 (satu) milik perusahaan sawit yang melayani rute kecamatan Renggiang yang pengawasannya juga dilakukan oleh Dinas Perhubungan berkaitan dengan keselamatan.

Dinas Perhubungan juga melaksanakan kegiatan berupa pemberian subsidi bahan bakar minyak untuk bus sekolah yang diperuntukkan bagi siswa di Kabupaten Belitung Timur melalui kegiatan Penyediaan Angkutan Umum

untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang dan kegiatan pengawasan dan pengendalian angkutan umum. Peningkatan sarana dan prasarana terminal dan pelabuhan juga telah dilaksanakan untuk mendukung peningkatan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Belitung Timur dan terciptanya pelayanan transportasi yang aman, nyaman dan sehat. Selain itu, adanya kontribusi Pemerintah Pusat dan Provinsi Daerah untuk pemberian bantuan bus sekolah ke Pemerintah Daerah ataupun pembukaan rute baru melalui jalur perintis oleh PT. Perum Damri sehingga dapat meningkatkan konektivitas di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2-63
Realisasi Akumulasi Tahun 2025 dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2029

Sasaran 4.1.1 Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Renstra PD Tahun 2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Rasio konektivitas antar wilayah	Nilai	74,8	80,67	92,7

Berdasarkan tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa:

- 1) Persentase capaian Rasio konektivitas antar wilayah pada tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD adalah sebesar 92,7% atau kurang dari target yang ditetapkan dengan capaian rasio sebesar 74,8. Untuk mencapai target yang ditetapkan perlu adanya sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pihak swasta untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Peran tersebut dapat berupa bantuan bus sekolah ataupun pengadaan angkutan perintis oleh PT. Perum Damri. Selain itu, pengoptimalan pelabuhan juga dapat meningkatkan konektivitas yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

Sasaran 4.1.2 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah

Tabel 3.2-64

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah

Indikator		Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Akumulasi Capaian s/d	Rencana Sesuai dengan Target DD 1MD Tahun	Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024(%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2025			
1	Indeks Infrastruktur Wilayah	Nilai	73,53	73,53	100	72,02	67,55	93,79	93,79	81,77	82,61
Jumlah								93,79			82,61

*Data bersifat sementara

Indeks Infrastruktur Wilayah

a. Penjelasan:

Capaian kinerja Indeks Infrastruktur Wilayah pada Tahun 2025 mencapai nilai 67,55 dari target sebesar 72,02 atau sebesar 93,79%. Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 yang mencapai nilai 73,53, terdapat penurunan nilai indeks.

Namun demikian, perubahan nilai tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kondisi infrastruktur wilayah secara substantif. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan metode perhitungan indeks. Pada Tahun 2024, perhitungan Indeks Infrastruktur Wilayah masih menggunakan komponen yang relatif terbatas, yaitu Indeks Perumahan dan Permukiman, Indeks Pekerjaan Umum, serta *Level of Service*.

Sementara itu, pada Tahun 2025 perhitungan indeks telah menggunakan komponen yang lebih komprehensif dengan menambahkan beberapa indikator pendukung lainnya, seperti kinerja kesiapsiagaan bencana, bangunan fasilitas umum serta pelayanan pemadam kebakaran. Penambahan komponen ini bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi infrastruktur wilayah yang lebih lengkap dan akurat.

Adanya penyesuaian metode pengukuran mengakibatkan capaian Tahun 2025 tidak dapat diperbandingkan secara langsung dengan capaian Tahun

2024. Oleh karena itu, hasil pengukuran Tahun 2025 digunakan sebagai baseline dalam pelaksanaan evaluasi kinerja pada periode berikutnya.

b. Analisis kekurangan /Kelemahan:

Perhitungan Indeks Infrastruktur Wilayah pada Tahun 2025 menggunakan metode pengukuran yang telah disesuaikan dengan penambahan beberapa komponen indikator dibandingkan dengan metode sebelumnya. Perubahan metode tersebut menyebabkan hasil pengukuran belum dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian pada tahun sebelumnya sehingga analisis tren peningkatan atau penurunan kinerja belum dapat dilakukan secara optimal.

Selain itu, perhitungan indeks melibatkan berbagai indikator yang bersumber dari beberapa perangkat daerah, sehingga membutuhkan ketersediaan data yang lengkap, akurat, dan konsisten. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam pemenuhan serta pemutakhiran data pada beberapa indikator yang menjadi komponen perhitungan indeks. Penambahan indikator pendukung juga menjadikan proses pengumpulan data dan pengukuran kinerja lebih kompleks, sehingga diperlukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif antar perangkat daerah yang terkait dengan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur wilayah.

c. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan) :

Sebagai tindak lanjut dari hasil capaian tersebut, diperlukan penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam rangka pemenuhan serta pemutakhiran data yang menjadi komponen perhitungan Indeks Infrastruktur Wilayah. Upaya peningkatan kualitas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, seperti jalan, drainase, jaringan pengairan, fasilitas umum, serta pengelolaan persampahan juga perlu terus dilakukan secara berkelanjutan.

Misi 5 : Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan Berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Tujuan 5.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Tabel 3.2-65

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator		Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Akumulasi Capaian s/d 2024	Rencana Sesuai dengan Target 2025	Persentase Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024(%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)			
1	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	N/A	N/A	N/A	17,67	N/A (Data belum tersedia)	N/A	N/A	20,55	N/A
Jumlah											

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

a. Analisis Pencapaian Kinerja

Pada Tahun 2022 telah dilakukan pengukuran Indeks Gas Rumah Kaca oleh Bidang Tata Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023. Namun demikian, pada tahun-tahun berikutnya kegiatan pengukuran tersebut belum kembali dilaksanakan. Sejak awal Tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup kembali melakukan pengukuran melalui pemanfaatan Aplikasi SIGN-SMART, yang hingga saat ini masih dalam tahap pendalaman pemahaman sistem serta proses pengumpulan dan verifikasi data pendukung yang diperlukan.

b. Analisis Faktor Pendukun/Penghambat

- ❖ Dalam pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data emisi Gas Rumah Kaca, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Data sektoral relatif sulit diperoleh, khususnya terkait data limbah cair dan limbah padat yang masuk ke badan sungai. Kondisi ini diperparah dengan adanya aktivitas pertambangan ilegal di beberapa titik sungai di Kabupaten Belitong Timur

yang tidak memiliki izin lingkungan, dengan lokasi yang bersifat sporadis serta berpindah-pindah sehingga sulit teridentifikasi dan terpantau secara akurat.

- ❖ Selain itu, tidak seluruh data sektoral mendapatkan respons dari lembaga terkait, dan sebagian data yang dibutuhkan juga tidak tersedia secara terbuka pada laman resmi instansi yang bersangkutan. Keterbatasan akses terhadap data emisi dari perusahaan atau sektor tertentu, termasuk perusahaan pertambangan, turut menjadi hambatan dalam proses pelacakan dan perhitungan emisi, terlebih sebagian perusahaan tersebut saat ini tidak beroperasi sehingga data aktual produksi dan emisi sulit diperoleh.
- ❖ Di sisi lain, sektor kehutanan merupakan salah satu penyumbang emisi sekaligus sektor yang berperan dalam penyerapan karbon melalui perubahan tutupan lahan, penyerapan CO₂, dan produksi oksigen. Namun demikian, kewenangan pengelolaan kehutanan tidak berada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, sehingga koordinasi lintas sektor menjadi sangat penting. Kondisi ini diperkuat dengan laju penanaman kembali (reboisasi) di kawasan hutan dan non-hutan yang relatif lebih lambat dibandingkan laju deforestasi, sehingga berdampak pada belum optimalnya peningkatan kapasitas penyerapan karbon di wilayah tersebut.

c. Strategi Pencapaian Kinerja

- ❖ Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akurasi data, diperlukan percepatan sinkronisasi data antar lembaga sektoral, khususnya terhadap data terbaru yang relevan, serta penyediaan akses informasi secara terbuka melalui pembaruan data pada laman resmi masing-masing instansi. Langkah ini diharapkan dapat mendukung transparansi dan kemudahan dalam proses pengumpulan serta verifikasi data.
- Selain itu, diperlukan penunjukan tim khusus yang memiliki latar belakang dan kompetensi yang sesuai, serta pelaksanaan pelatihan teknis terkait penggunaan aplikasi yang digunakan dalam pengukuran dan pelaporan,

guna memastikan proses penginputan, pengolahan, dan analisis data dapat dilakukan secara optimal dan akurat.

Sasaran 5.1.1 Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Tabel 3.2-66

Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Indikator		Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun	Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2025			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	67,76	67,76	100	76,34	76,27	99,91	99,91	77,02	99,02
2	Indeks Risiko Bencana	Angka	152,06	152,06	100	152,06	112,36	135,33	135,33	145,38	122,67
Jumlah					100			117,62			110,84

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

a. Penjelasan:

Pada tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan mengeluarkan peraturan baru tentang tata cara serta indikator dalam penyusunan dan perhitungan nilai IKLH yaitu permen LHK Nomor 27 Tahun 2021. Dalam peraturan tersebut terdapat perubahan bobot persentase dalam perhitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dari 30% menjadi 37,6% , bobot Indeks Kualitas Udara (IKU) dari 30% menjadi 40,5% dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang semula 40% menjadi 21,9%. Indikator Sasaran Indeks Kualitas Air , Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan merupakan nilai parameter kunci yang digunakan untuk

Penghitungan IKLH Kabupaten dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\text{IKLH Kabupaten} = (\text{IKA} \times 0,376) + (\text{IKU} \times 0,405) + (\text{IKL} \times 0,219)$$

Setelah mendapatkan nilai dari masing-masing parameter kunci penyusun IKLH, selanjutnya dilakukan pembobotan setiap parameter untuk menghasilkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Tabel berikut ini merupakan hasil penghitungan IKLH Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2025 menggunakan **Sistem Indeks Lingkungan Hidup (SITALA)**.

b. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja:

Indeks kualitas lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 8,51 di bandingkan tahun 2024 terutama pada Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lahan yang meningkat . Setelah didapatkan nilai IKLH, kemudian di klasifikasikan berdasarkan rentang nilai IKLH seperti di tunjukkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.2-67

Rentang nilai IKLH

Kategori IKLH	Angka Rentang
Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
Baik	$70 \leq x < 90$
Sedang	$50 \leq x < 70$
Kurang	$25 \leq x < 50$
Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Dari hasil penghitungan dan pembobotan yang dilakukan dari setiap indikator kualitas lingkungan hidup yaitu, kualitas air, kualitas udara, dan kualitas lahan, didapatkan nilai Indeks kualitas lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Belitung Timur adalah 76,27. Berdasarkan nilai IKLH tersebut, maka kelas kualitas lingkungan hidup Kabupaten Belitung timur termasuk kategori “Baik”.

c. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan) :

1. Kegiatan pertambangan timah menjadi salah satu sumber pencemaran lingkungan khususnya untuk kualitas air dan lahan, untuk mengurangi

dampak negatif terhadap lingkungan diperlukan beberapa tindakan preventif terhadap kegiatan yg memicu pencemaran antara lain :

2. Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan lintas sektoral dalam berbagai tingkatan pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten.
3. Melakukan pemulihan kondisi ekosistem kawasan hutan konservasi yang telah rusak melalui rehabilitasi hutan dan melakukan dan pengawasan (monitoring dan evaluasi) jalannya kegiatan reklamasi lahan bekas pertambangan timah rakyat.
4. Lakukan pemantauan lebih selektif pada air sungai. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan pemantauan lebih periodik.
5. Kualitas udara di Kabupaten Belitong Timur perlu dipertahankan dan dilakukan pengendalian. Pengendalian udara yang dapat dilakukan antara lain :
 - Penghijauan di area yang menghasikan banyak pencemar udara dan mengembangkan ruang terbuka hijau.
 - Penerapan aturan mengenai sumber emisi bergerak karena sesuai dengan hasil pemantauan, sumber pencemar yang paling berpengaruh di Kabupaten Belitong Timur adalah hasil transportasi dan di wilayah perkotaan
6. Mengendalikan aktivitas pembangunan dan memultifungsikan ruang terbuka hijau yang dapat berfungsi secara produktif dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.
7. IKLH perlu dikembangkan sebagai salah satu alat pendukung pembuatan kebijakan khususnya pada tingkatan kabupaten yang dimulai dari kegiatan pengumpulan data melalui kegiatan pemantauan, sehingga dapat ditelusuri setiap angka indikatifnya dan dapat ditemukan sumber permasalahannya.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.68

Realisasi Akumulasi Tahun 2025 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2029

Sasaran 5.1.1 Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

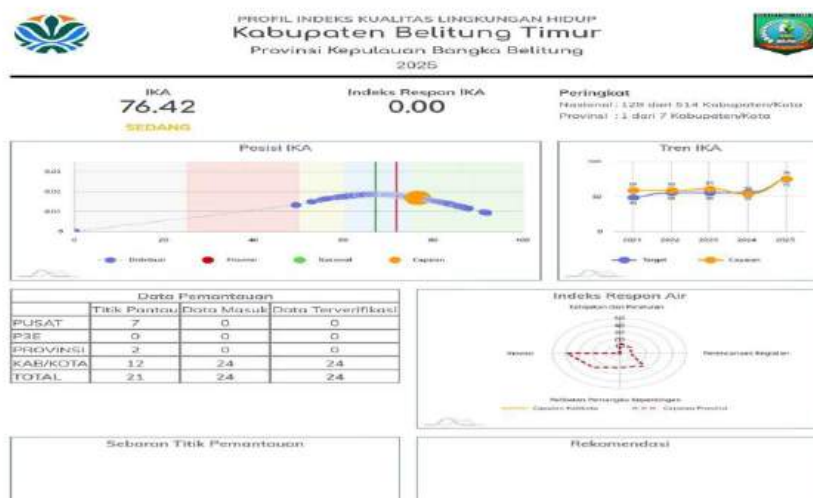
No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	76,27	77,02	99,03

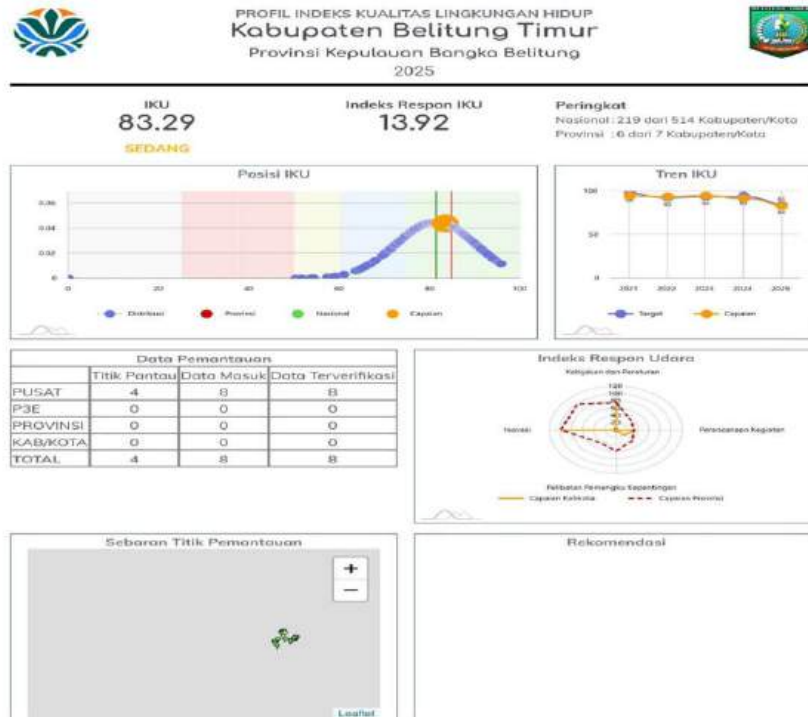
Berdasarkan tabel diatas bisa disimpulkan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sampai dengan Tahun 2025 jika dibandingkan target akhir Renstra Tahun 2025-2029 pada Tahun 2029 hampir mencapai target yang direncanakan.

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran 5.1.1 Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah:

- 1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - a) Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
- 2 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - b) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - c) Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) **(Refocusing)**
 - a) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota **(Refocusing)**
- 4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
 - a) Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
- 5 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- a) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 6 Program Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH (**Refocusing**)
 - a) Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH (**Refocusing**)
- 7 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - a) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
- 8 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - a) Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 9 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - a) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
- 10 Program Pengelolaan Persampahan
 - a) Kegiatan Pengelolaan Sampah





2. Indeks Risiko Bencana

a. Penjelasan:

Indeks Risiko Bencana merupakan suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap Kabupaten/Kota di Indonesia.

Tingkat resiko Bencana adalah perbandingan antara Tingkat Kerugian dengan kapasitas Daerah untuk memperkecil Tingkat Kerugian dan Tingkat ancaman akibat bencana, Sedangkan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan.

Untuk Nilai Indeks risiko bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur di ukur melalui beberapa indikator yg terdapat pada Kapasitas Daerah yang disebut dengan Indeks Ketahanan Daerah yang di laksanakan penilaian oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Aplikasi InaRisk. Indikator indeks ketahanan daerah 7(Tujuh)Prioritas diantaranya:

- Prioritas 1 Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
- Prioritas 2 Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
- Prioritas 3 Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
- Prioritas 4 Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
- Prioritas 5 Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
- Prioritas 6 Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
- Prioritas 7 Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

selain itu Penilaian Indeks Risiko Bencana juga sangat dipengaruhi oleh Tingkat ancaman, kerentanan dan Paparan. Dengan perhitungan sebagai berikut : penghitungan capaian kinerja di gunakan formulasi :

Persentase Capaian Kinerja :	$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100$
---------------------------------	---

Sedangkan untuk capaian kenaikan kinerja dari tahun sebelumnya sebagai berikut:

Persentase Capaian kenaikan Kinerja IRB :	$\frac{\text{IRB } t-1 - \text{IRB } t}{\text{IRB } t-1} \times 100$
--	--

Ket : IRB t-1 = Nilai IRB tahun sebelumnya

IRB t = Nilai IRB Tahun berjalan

b. Analisis Peningkatan/ Penurunan Kinerja:

Kepulauan Bangka Belitung termasuk bagian tengah dari “Tin Mayor South East Asian Tin Belt” dengan tipe granit main range yang mempunyai ciri-ciri mega kristal (terutama K Feldspar) dan terjadi mineralisasi timah beserta mineral ikutannya. Topografi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan hanya sebagian kecil yang bergunung, Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 mdpl. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki Iklim Tropis yang dipengaruhi angin musim yang mengalami bulan basah dan kering (RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 - 2022). Curah hujan rata-rata tahunan sebesar 397 - 580 mm/tahun. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) tahun 2024, bencana yang paling banyak terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah banjir, cuaca ekstrem, dan kebakaran hutan dan lahan. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2024 pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kelas risiko sedang dengan nilai 143,42. Capaian Kinerja Tahun 2025 telah berhasil melampaui target yang ditetapkan. Untuk tahun 2025 indikator sasaran Indeks risiko bencana (IRB) mengalami penurunan dari target 152,06 realisasi 112,36 dengan realisasi kinerja tercapai sebesar 135,33%, karena menurunnya nilai IRB maka Capaian Kinerja semakin baik. Jika dihitung kenaikan capaian kinerja naik sebesar 26,11, dari nilai IRB Tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan untuk penilaian Indeks Risiko bencana tidak hanya berdasarkan pada kemampuan/kapasitas daerah saja tapi dipengaruhi juga oleh Tingkat ancaman, kerentanan dan Paparan dari kejadian Bencana, dapat dilihat dari total kejadian bencana selama tahun 2025 daerah kabupaten Belitung Timur secara umum mengalami penurunan kejadian bencana dibanding dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Data Kejadian Bencana Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

NO	BULAN	JUMLAH KEJADIAN/BENCANA	JENIS KEJADIAN/BENCANA			KECAMATAN												TERDAMPAK		KORBAN JIWA					RUMAH		LAHAN		FASUM		KETERANGAN					
			HIDROMETEOROLOGI	KARHUTUBUNLA	KEJADIAN LAINNYA													KK	JW	PG	MD	HL	LR	LS	LB	TD	RR	RS	RB	Ha		TD	RR	RS	RB	
1	JANUARI	11	6	0	5	2	3	2	1	1	1	1	1																							
2	FEBRUARI	9	0	2	0	7	1	6		1				1																						
3	MARET	7	3	0	0	4	1	3	2		1																									
4	APRIL	6	2	0	1	3	1	1	2	1																										
5	MEI	7	2	0	0	5	1	4						1	1																					
6	JUNI	11	3	2	0	6	3	1	6	1																										
7	JULI	21	5	12	0	4	5	4	3	2				1																						
8	AGUSTUS	18	0	15	1	2	3		5	1				6	1	1																				
9	SEPTEMBER	21	4	6	0	11	3	3	8	3	1																									
10	OKTOBER	19	11	1	0	7	5	1	5	1				1	1																					
11	NOVEMBER	9	4	1	0	4	1	1	2					3		1																				
12	DESEMBER	13	7	0	0	6	5		6					1																						
TOTAL			152	47	39	2	64	27	14	1	48	6	11	0	6	6	1	0	3	5	11	1	5	2	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0

Data Kejadian Bencana Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024

NO	BULAN	JUMLAH KEJADIAN/BENCANA	JENIS KEJADIAN/BENCANA			KECAMATAN																TERDAMPAK		KORBAN JIWA					RUMAH			LAHAN		FASUM				KETERANGAN
			HIDROMETEOROLOGI	KARHUTUBUNLA	KEJADIAN LAINNYA	MANGGAR	GANTUNG	K. KAMPIT	DAMAR	SP. PESAK	SP. RENGANG	DENDANG	KK	JW	PG	MD	HL	LR	LS	LB	TD	RR	RS	RB	Ha	TD	RR	RS	RB									
H	K	KL	H	K	KL	H	K	KL	H	K	KL	H	K	KL	H	K	KL	H	K	KL	H	K	KL	H	K	KL	H	K	KL									
1	JANUARI	23	13	0	2	8	10	7	2	1	1	1	94	260	8	0	0	0	0	0	92	0	4	3	0	2	1	0	0	0								
2	FEBRUARI	13	4	1	1	7	2	4	2	1	1	1	2	5	4	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0.12	1	0	0	0	0								
3	MARET	12	2	2	0	8	1	5	2				3	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2.1	0	0	0	0	0								
4	APRIL	1	0	0	0	1		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
5	MEI	14	9	1	0	4	8	3	1		1	1	5	14	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1.5	0	0	0	0	0								
6	JUNI	5	1	0	1	3		2	1				1	6	6	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0								
7	JULI	17	0	12	1	4	11	1	4			1	2	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	7.97	0	0	0	0	0								
8	AGUSTUS	29	0	28	0	1	12	1	10		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.8	0	0	0	0	0								
9	SEPTEMBER	39	8	26	0	5	3	10	4	12		1	5	9	0	0	0	0	0	0	4	3	1	0	33.22	0	0	0	0	0								
10	OKTOBER	12	1	6	0	5	4	4	1		1	1	3	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	18.7	0	0	0	0	0								
11	NOVEMBER	5	2	1	0	2	1	1	1		1	1	2	9	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0.35	0	0	0	0	0								
12	DESEMBER	18	16	0	0	2	14	3	1		1	1	56	170	0	0	0	0	0	0	54	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0							
TOTAL			188	56	77	5	50	39	39	1	39	6	26	2	5	2	3	0	1	7	8	1	3	0	1	2	1	0	1	0	0							

Dari setiap kejadian bencana ini Badan penanggulangan bencana daerah telah melakukan penanganan sebagaimana berikut :

Tabel 3.2-69

Daftar Penanganan Bencana

Kejadian Bencana	Penanganan Kejadian Bencana
Hidrometereologi (Banjir, Banjir Genangan, Angin Kencang, Pohon	Monitoring perkembangan cuaca
	Pemantauan area rawan bencana hidrometereologi
	Himbawan kepada Masyarakat/perangkat desa untuk meningkatkan kewaspadaan

Tumbang, Angin Putting Beliung, Pasang Laut (ROB), Sabaran Petir	Kaji cepat lapangan kebutuhan tanggap darurat bencana
	penyelamatan dan evakuasi korban bencana
	Perlindungan kelompok rentan ketempat aman
	Pemenuhan kebutuhan dasar (Logistik)
Kebakaran Hutan/Kebun dan Lahan (KARHUTBUNLA)	Koordinasi dengan instansi terkait
	Sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan tentang pencegahan karhutla
	Deteksi dini atau pemantauan wilayah hotspot/titik api yang cukup tinggi
	penyelamatan dan evakuasi masyarakat yng berada diarea kebakaran serta Pemadaman Api
Kejadian Lainnya (Evakuasi Hewan Liar, Orang Hilang/tersesat)	penyelamatan dan evakuasi korban
	koordinasi Instansi/terkait

Sedangkan untuk kemampuan/Kapasitas Daerah dimana dalam hal ini adalah indeks ketahanan daerah untuk Tahun 2025 sebesar 0,48, tidak mengalami kenaikan dan masih mampu bertahan di Katagori “Sedang” seperti pada tahun 2024, dengan kondisi perbandingan nilai dari 7 indikator sebagai berikut:

Tabel 3.2-70

7 Indikator Risiko Bencana Daerah

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS Tahun 2024	INDEKS KAPASITAS DAERAH 2024	INDEKS PRIORITAS Tahun 2025	INDEKS KAPASITAS DAERAH 2025	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.70	0.48	0.72	0.48	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0.33		0.33		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.67		0.74		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.96		0.96		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.51		0.51		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan	0.31		0.30		

	Penanganan Darurat Bencana				
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.35		0.35	

Berdasarkan perbandingan tersebut, terlihat bahwa capaian nilai pada indikator berhasil dipertahankan secara konsisten dibanding tahun sebelumnya, dengan nilai pada 7 indikator inilah salah satu yang berkontribusi untuk nilai Indeks Risiko Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur. Pada tahun 2025 Indeks Risiko Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan yg cukup tinggi dibanding dengan kabupaten/kota seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2-71

**Tabel Perbandingan Indeks Risiko Bencana
Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Kabupaten/Kota	IRB 2024	IRB 2025
Bangka	145.25	100.03
Belitung	143.71	98.97
Bangka Barat	145.28	96.66
Bangka Tengah	134.61	140.12
Bangka Selatan	179.68	159.49
Belitung Timur	152.06	112.36
Kota Pangkal Pinang	103.33	84.26

Secara umum pada Tahun 2025 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan nilai Indeks Risiko Bencana dimana ini artinya terjadinya kenaikan capaian kinerja yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan adanya perubahan formulasi perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB), ada beberapa penyepakatan metodologi perhitungan indeks risiko bencana oleh BNPB, yaitu :

1. Bahaya IRB selanjutnya sejumlah 11 jenis bahaya, bertambah sebanyak 2 bahaya dari IRB periode sebelumnya (2013-2024) penambahan ada pada bahaya banjir bandang dan likuefaksi.
2. Baseline data bahaya dan pada IRB menggunakan hasil Kajian Risiko Bencana Tahun 2021

3. Data Kerentanan menggunakan data hasil proyeksi kerentanan tahun 2025-2045
4. Data Kapasitas tetap menggunakan indeks ketahanan daerah (IKD) 71% indikator yang dihitung setiap tahun.
5. Bobot perkomponen IRB adalah bahaya 40%, kerentanan 30% dan kapasitas 30%; komponen bahaya bersifat statis (dalam periode RPJMN 2025-2029) serta komponen kerentanan dan kapasitas bersifat dinamis (sebagaimana dalam point 2.3 dan 4).
6. Nilai IRB Provinsi merupakan nilai rata-rata dari IRB kabupaten/kota di wilayahnya

c. Solusi (Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan) :

Guna peningkatan pencapaian target kinerja serta penurunan nilai Indeks Risiko Bencana Dimana ini berbanding terbalik dengan kenaikan Indeks Ketahanan Daerah ditahun mendatang, maka perlu dilakukan perbaikan di beberapa Langkah sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya Tahapan Upaya Penanggulangan Bencana seperti tabel berikut:

Tabel 3.2-72

Daftar Tahaan Upaya Penanggulangan Bencana

Pra Bencana	Tanggap Darurat	Pasca Bencana
<u>Saat tidak ada bencana:</u> Menyelenggarakan Sosialisasi, diantaranya: Sosialisasi Satuan Pendidikan Aman Bencana <u>Saat ada potensi akan terjadi bencana:</u> Siap siaga sarpras & aparatur Mitigasi	- Melakukan kerja cepat tentang lokasi, kerusakan, sumber daya dan kebutuhan - Penyebaran informasi, lokasi bencana, lokasi evakuasi dan informasi lainnya - Pengarahan personal dan peralatan	- Melakukan kerja penanganan pasca bencana - Melakukan Rehabilitasi / Rekontruksi, berupa pemberian bantuan - Melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan bencana

Peringatan Dini (cuaca dan tinggi gelombang)	• Pendataan korban • Pendirian posko • Fungsi komando penyelamatan dan evakuasi	
--	---	--

- 2) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan jumlah dan kualitas yang memadai.
- 3) Tersedianya Pegawai Tim Reaksi Cepat baik secara kualitas dan kuantitas
- 4) Pembuatan dokumen KRB dapat terealisasi pada tahun 2025 namun belum divaliasi oleh BNPB sehingga belum dapat ditetapkan
- 5) Penguatan Regulasi Rencana Penanggulangan Bencana yang sistematis dan terstruktur (Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, Rencana Kontijensi, Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana)

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RENSTRA adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2-73
Analisis Capaian Indikator Sasaran

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian Kinerja (%) / nilai
1	Indeks resiko bencana	Angka	112,36	145,38	

Berdasarkan table di atas, disimpulkan bahwa : Realisasi akumulasi capaian sasaran Indeks resiko bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur sampai dengan Tahun 2025 sebesar 112.36 telah berhasil melampaui target akhir Renstra Tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 150.39. dengan ini persentase capaian kinerja

sebesar 133,85%, Dimana penurunan nilai Indeks Risiko Bencana merupakan Kenaikan Capaian Kinerja. Indikator ini menunjukkan akselerasi kinerja yang sangat positif karena target jangka menengah telah tercapai lebih cepat.

Adapun program yang mendukung kegiatan indeks Bencana Daerah, diantaranya:

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana).
- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota.

Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota.
- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota.
- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota.
- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota.
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota.
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.

Kegiatan: Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

3.3 Akuntabilitas Keuangan dan Anggaran Tahun 2025.

PENGUKURAN KINERJA DAN ANGGARAN

Kabupaten : Belitung Timur
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja 2025	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Persentase	Efektif /Efesien
1.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	1	Nilai SAKIP	Nilai	70,01 (BB)	68,95	68,95	Rp 1.313.877.900	Rp 1.159.015.709	88,21	Efektif
		2	Indek SPBE	Nilai	3,5	4,16	118,86	Rp 2.399.354.950	Rp 2.307.488.299	96,17	Efisien
		3	Indeks Profesioanl ASN	Nilai	80	81,56	101,95	Rp 6.653.244.830	Rp 6.371.285.587	95,76	Efisien
		4	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,05	4,51	111,36	Rp 59.037.300	Rp 39.180.776	66,37	Efektif
		5	Maturitas SPIP	Level	3	2.468	79,61	Rp 936.976.000	Rp 787.405.666	84,04	Efektif
1.1.2	Meningkatnya Kualitas Keuangan Daerah	6	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100	Rp 97.009.596.150	Rp 94.348.958.753	85,74	Efisien
		7	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	73,98	71,49	100				Efisien
2.1.1	Meningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	8	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,79	11,78	99,92	Rp 41.179.324.139	Rp 37.929.184.263	92,11	Efisien
		9	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,13	9,03	98,90				Efisien



		10	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	85	27,7	20	Rp 739.689.000	Rp 672.367.844	90,90	Efisien
2.1.2	Meningkatnya Pemerataan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi	11	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,04	74,12	101,48	Rp 50.062.607.851	Rp 44.698.637.113	89,29	Efektif
		12	Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	16,34	16,34	100				Efektif
		13	Prevalensi Ketidacukupan Kosumsi Pangan (Prevalance of Undernourishment)	Persen	10,32	9,37	91,59	Rp 190.052.400	Rp 154.331.785	81,20	Efektif
2.1.3	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Budaya	14	Angka Kemiskinan	Angka	6,20	6,69	92,10	Rp 548.505.000	Rp 501.241.009	91,38	Efisien
		15	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	59,68	60,74	102,47	Rp 866.191.700	Rp 759.366.494	87,67	Efektif
		16	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	87,83	87,69	99,84	Rp 306.043.900	Rp 259.942.357	84,94	Efektif
		17	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	68,86	72,57	105,93	Rp 309.175.800	Rp 252.435.672	81,65	Efektif
		18	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	54,34	58,17	103,87	Rp 827.261.100	Rp 806.817.435	97,53	Efisien
3.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	19	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Juta Rupiah	3.168.130	1.666,81	52,61	Rp 2.037.492.400	Rp 1.760.791.426	86,42	Efektif
		20	PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	Juta Rupiah	191,390	196,15	102,48	Rp 1.251.546.000	Rp 1.051.109.410	83,98	Efektif
		21	PDRB Industri Pengolahan	Juta Rupiah	1.146.850	1.107.42	96,56	Rp 5.683.887.246	Rp 5.172.911.109	91,01	Efisien
		22	Tingkat Inflasi	Persen	3 +1	2,69	110,43	Rp 827.261.100	Rp 806.817.435	97,53	Efisien
3.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	23	Nilai Investasi Tahunan	Juta Rupiah	450,000	1.073.894,75	238,68	Rp 142.802.100	Rp 136.823.960	95,81	Efisien

			berskala (PMA/PMDN)								
3.1.3	Meningkatnya Kesempatan Kerja	24	Tingkat Pengganguran Terbuka	Persen	2,60	3,05	82,70	Rp 6.197.237.336	Rp 5.596.741.787	90,31	Efisien
4.1.1	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah	25	Rasio Konektivitas antar Wilayah	Angka	75,83	74,8	98,64	Rp 6.961.673.600	Rp 6.691.289.815	96,12	Efisien
4.1.2	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	26	Indeks Infrastruktur Wilayah	Nilai	72,02	67,55	93,79	Rp 15.877.469.227	Rp 14.684.517.623	92,49	Efisien
5.1.1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,64	76,27	99,91	Rp 3.103.059.850	Rp 2.774.485.338	89,41	Efisien
		28	Indeks Resiko Bencana	Angka	152,06	112,36	135,33	Rp 1.762.410.400	Rp 1.699.141.906	96,41	Efisien



3.4 Penghargaan Yang diterima Kabupaten Belitong Timur Pada Tahun 2023 s.d 2025

Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara yang berkontribusi dalam penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Belitong Timur pada tingkat nasional Tahun 2023 s.d 2025

NO	NAMA PENGHARGAAN	DISERAHKAN OLEH	TANGGAL PENYERAHAN	LEMBAGA PEMBERI PENGHARGAAN	TAHUN PEMBERIAN PENGHARGAAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 Ombudsman RI	Ombudsman Republik Indonesia	04 Desember 2023	Ombudsman Republik Indonesia	2023	Bagian Organisasi
2	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024 dengan nilai 82,58 kategori A	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)	05 Desember 2025	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)	2025	
3	Indeks Reformasi Hukum	Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia	27 November 2023	Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia	2023	Bagian Hukum
4	Kabupaten Peduli HAM	Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia	15 November 2023	Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia		
5	Kabupaten Peduli HAM Tahun 2023 Evaluasi Tahun 2024	Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia	14 November 2024	Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia	2024	



6	Nilai AA (Istimewa) Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024	Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia	14 November 2024	Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia		
7	Piagam Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia	Kementrian Hak Asasi Manusia	10 Desember 2024	Kementrian Hak Asasi Manusia		
8	BKN Award 2023: Special mention - komitmen peningkatan pelayanan kepegawaian dan kasn atas keberhasilan menerapkan sistem dalam manajemen asn dg predikat baik Tahun 2023	Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara	01 Desember 2023	Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara	2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9	Pengendali Seleksi yang Cepat, Akuntabel, dan Transparan pada Pengadaan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Tahun 2024 Menggunakan CAT Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Negara_Palembang	23 Desember 2024	Badan Kepegawaian Negara_Palembang	2024	
10	Peringkat 3 Kategori Pengelolaan Kompetensi pada Penghargaan Anugerah Manajemen ASN 2024	Badan Kepegawaian Negara	11 November 2024	Badan Kepegawaian Negara		
11	Penghargaan Pengawasann Kearsipan tingkat Nasional Tahun 2023	Arsip Nasional Republik Indonesia	02 Mei 2023	Arsip Nasional Republik Indonesia	2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



12	Penghargaan Pengawasann Kearsipan tingkat Nasional Tahun 2024	Arsip Nasional Republik Indonesia	06 Mei 2024	Arsip Nasional Republik Indonesia	2024	
13	Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia	01 Maret 2023	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia	2023	Dinas Kesehatan
14	Sertifikat Kabupaten/Kota Bebas Frambusia	kementerian Kesehatan Republik Indonesia	01 Maret 2023	kementerian Kesehatan Republik Indonesia		
15	Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2022	Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	31 Januari 2023	Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia		
16	Penghargaan Swasti Saba Padapa	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	13 November 2023	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia		
17	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023	Ombudsman Republik Indonesia	04 Desember 2023	Ombudsman Republik Indonesia		
18	Pencapaian Reakreditasi Paripurna Puskesmas Simpang Pesak	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	29 November 2023	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	2023	PKM Simpang Pesak



19	Pencapaian Reakreditasi Paripurna Puskesmas Renggiang	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	29 November 2023	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	2023	PKM Renggiang
20	Pencapaian Reakreditasi Puskesmas Kelapa Kampit	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	27 November 2023	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	2023	PKM Kelapa Kampit
21	Pencapaian Reakreditasi Paripurna Puskesmas Gantung	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	07 November 2023	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	2023	PKM Gantung
22	Pencapaian Reakreditasi Paripurna Puskesmas Mengkubang	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	30 Oktober 2023	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	2023	PKM Mengkubang
23	Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Skor 3,00 dan Status Kinerja Sedang	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	29 April 2023	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	2023	Bagian Tapem
24	Pendampingan Program Kampung Iklim dengan Kategori Madya Desa Limbongan Kecamatan Gantung Kabupaten Belitong Timur	Kementerian Lingkungan Dan Kehutanan		Kementerian Lingkungan Dan Kehutanan	2023	Kecamatan Gantung
25	Pendampingan Program Kampung Iklim dengan Kategori Madya Desa Jangkang Kecamatan Dendang Kabupaten Belitong Timur	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2023	Kecamatan Dendang
26	Juara III Bersama (Beregu Bulu Tangkis) Kejuaraan Antar Kampung Kemenpora Republik Indonesia	Kemenpora Republik Indonesia	01 September 2023	Kemenpora Republik Indonesia	2023	Kecamatan Simpang Pesak



27	Sertifikat Warisan Budaya Takbenda Indonesia	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	25 Oktober 2023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	2023	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
28	Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya Tahun 2023	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	01 Juli 2023	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	2023	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
29	Penganugrahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik)	Ombudsman Republik Indonesia		Ombudsman Republik Indonesia	2024	
30	Kabupaten Layak Anak Peringkat MADYA Tahun 2025	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	23 Juli 2025	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	2025	
31	Penilaian Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)		Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	2024	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
32	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	21 Oktober 2024	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	2024	Inspektorat Kabupaten Belitong Timur



33	Ucapan Terima kasih dan Apresiasi atas Kepatuhan Penyampaian LHKAN Tahun 2025	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi RI		Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi RI	2025	
34	Pendampingan Program Kampung Iklim (Proklam) untuk Desa Simpang Tiga, Desa Mempaya dna Desa Lintang untuk Kategori Madya	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	02 Desember 2024	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2024	Dinas Lingkungan Hidup
35	Predikat Kualitas Tertinggi (Zona Hijau) dengan nilai 93,76 Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024	Ombudsman Republik Indonesia		Ombudsman Republik Indonesia	2024	Dinas Pendidikan
36	Penghargaan sebagai Daerah Pelopor kategori berkembang oleh Direktur Jendral PAUDDIKDASMEN atas Komitmennya dalam mengimplementasikan Transformasi Digital untuk pembelajaran secara Inovatif, efektif dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya.	Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi		Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi		
37	Predikat "DEDIKASI UNTUK NEGERI" dalam Penyerahan Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan kepada 54 Paud/Kelompok Bermain di 7 Kecamatan se-Babupaten	Bank Indonesia		Bank Indonesia		



	Belitung Timur.					
38	OSN Tingkat Nasional 2025 a.n Chedva kahfizayyan Juara 3 dari SDN 1 Gantung	BPTI		BPTI	2025	
39	Piagam Penghargaan Lomba Desa Tingkat Regional 1	Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia		Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia	2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
40	Piagam Penghargaan Non Litigation Peacemaker (NL.P)	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	08 Oktober 2024	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia		
41	Piagam Penghargaan Lomba Desa Wisata Nusantara 2024	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia		Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia		
42	Kategori Inovasi Teknologi Tepat Guna Lomba Teknologi Tepat Guna Nusantara XXV Tingkat Nasional Tahun 2024	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia		Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia		
43	Indeks Integritas Pendidikan Tertinggi se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dengan nilai 72,50	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI	24 April 2025	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI	2025	



BELITUNG TIMUR

NYAMAN DAN BERKEMAJUAN

BerAKHLAK  **bangga**
melayani
bangsa





ASN
BerAKHLAK

bangga
melayani
bangsa

BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kabupaten Belitung Timur bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Kinerja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang BAIK dan signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 berjumlah 11 (sebelas) sasaran dengan 28 (dua puluh delapan) indikator sasaran.

Berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) Tujuan 11 (sebelas) Sasaran, dan 8 (delapan) Indikator Tujuan, serta 28 (dua puluh delapan) Indikator Sasaran yang diperjanjikan di tahun 2025 yang mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, maka dapat disimpulkan:

a) 22 (dua puluh dua) indikator sasaran dengan kinerja pencapaian Sangat Tinggi

- b) 3 (tiga) indikator sasaran dengan kinerja pencapaian Tinggi
- c) 1(satu) indikator sasaran dengan kinerja pencapaian Rendah
- d) 1 (satu) indikator sasaran dengan kinerja pencapaian Sangat Rendah
- e) 1 (satu) indikator sasaran dengan kinerja pencapaian tidak ada data/tidak dilakukan perhitungan.

Tabel berikut menyajikan data capaian kinerja sasaran di tahun 2025 :

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Sasaran tahun 2025

No	Sasaran	Capaian Kinerja
1	[1.1.1]Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	102,05
2	[1.1.2]Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	85,74
3	[2.1.1] Meningkatkan kualitas layanan pendidikan	74,78
4	[2.1.2] Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi	97,69
5	[2.1.3] Meningkatkan kesejahteraan sosial dan budaya	100,80
6	[3.1.1] Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	90,49
7	[3.1.2] Meningkatkan pertumbuhan investasi	238,64
8	[3.1.3] Meningkatkan kesempatan kerja	82,70
9	[4.1.1] Meningkatkan konektivitas antar wilayah	98,64
10	[4.1.2] Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah	93,79
11	[5.1.1] Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	117,62

Dari tabel diatas dapat dilihat sejumlah 7 (tujuh) sasaran dengan capaian Sangat Tinggi, atau baru 63 % dari total jumlah sasaran yang ada. Namun demikian masih terdapat 1 (satu) sasaran yang tidak ada data atau tudak bisa dilakukan perhitungan tahun 2025, yaitu Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah.

Terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian Rendah yaitu: PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian Sangat Rendah yaitu : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitong Timur terus berupaya melakukan langkah-langkah:

1. untuk meningkatkan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan:

Dinas Pertanian dan Pangan telah melakukan :

- a. Melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas produksi, kualitas hasil pertanian, serta nilai tambah komoditas unggulan daerah. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, penguatan kelembagaan petani, peningkatan kompetensi sumber daya manusia pertanian, serta penerapan teknologi tepat guna.
- b. Selain itu, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur juga mendorong pengembangan hilirisasi produk pertanian, peningkatan akses pasar, serta penguatan kemitraan dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Langkah ini bertujuan untuk memperluas peluang usaha, meningkatkan daya saing produk, serta memperkuat rantai nilai komoditas pertanian.
- c. Secara berkelanjutan, upaya-upaya tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.
- d. Kenaikan PDRB ini mengindikasikan membaiknya kontribusi subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian daerah, yang didorong oleh peningkatan produksi, perbaikan produktivitas, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan sektor-sektor unggulan. Selain itu, stabilitas harga komoditas, peningkatan permintaan hasil pertanian dan perikanan, serta dukungan sarana dan prasarana produksi turut berkontribusi terhadap peningkatan nilai PDRB. Secara keseluruhan, pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ini mencerminkan ketahanan sektor primer dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur serta menjadi dasar yang penting bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Melalui Perangkat Daerah teknis yang membidangi Perikanan, telah melakukan:

- a. Sektor Perikanan memberikan peranan yang berarti terhadap lapangan kerja di Kabupaten Belitung Timur, dimana terjadi perluasan kesempatan kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan wilayah, menentukan kelayakan sektor perikanan untuk diprioritaskan dalam pembangunan daerah. Sektor perikanan dapat meningkatkan arus pendapatan daerah dengan menambah tingkat konsumsi masyarakat, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru.
 - c. Pertumbuhan yang berkelanjutan dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan akan mempercepat pengembangan sektor unggulan lainnya, memperkuat ekonomi lokal, dan memperluas dampak positif pada kesejahteraan masyarakat.
2. untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat:
- a. Melakukan pembinaan rutin ke perpustakaan binaan.
 - b. Mendorong perpustakaan binaan untuk melakukan kerjasama.
 - c. Monitoring laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan.
 - d. Melakukan sosialisasi terkait instrument perpustakaan yang perlu dicapai.
 - e. Mendorong pihak sekolah/desa untuk membantu pengembangan perpustakaan.
 - f. Meningkatkan minat baca masyarakat melalui kegiatan-kegiatan literasi.



PENGUKURAN KINERJA DAN ANGGARAN

Kabupaten : Belitung
 : Timur
 Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja 2025	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Persentase	Efektif /Efesien
1.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	1	Nilai SAKIP	Nilai	70,01 (BB)	68,95	68,95	Rp 1.313.877.900	Rp 1.159.015.709	88,21	Efektif
		2	Indek SPBE	Nilai	3,5	4,16	118,86	Rp 2.399.354.950	Rp 2.307.488.299	96,17	Efesien
		3	Indeks Profesioanl ASN	Nilai	80	81,56	101,95	Rp 6.653.244.830	Rp 6.371.285.587	95,76	Efesien
		4	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,05	4,51	111,36	Rp 59.037.300	Rp 39.180.776	66,37	Efektif
		5	Maturitas SPIP	Level	3	2.468	79,61	Rp 936.976.000	Rp 787.405.666	84,04	Efektif
1.1.2	Meningkatnya Kualitas Keuangan Daerah	6	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100	Rp 97.009.596.150	Rp 94.348.958.753	97,26	Efesien
		7	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	73,98	7,99	100				Efesien
2.1.1	Meningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	8	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,79	11,78	99,92	Rp 41.179.324.139	Rp 37.929.184.263	92,11	Efesien
		9	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,13	9,03	98,90				Efesien
		10	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	85	27,7	20	Rp 739.689.000	Rp 672.367.844	90,90	Efesien

2.1.2	Meningkatnya Pemerataan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi	11	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,04	74,12	101,48	Rp 50.062.607.851	Rp 44.698.637.113	89,29	Efektif
		12	Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	16,34	16,34	100				Efektif
		13	Prevalensi Ketidacukupan Kosumsi Pangan (Prevalance of Undernourishment)	Persen	10,32	9,37	91,59	Rp 190.052.400	Rp 154.331.785	81,20	Efektif
2.1.3	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Budaya	14	Angka Kemiskinan	Angka	6,20	6,69	92,10	Rp 548.505.000	Rp 501.241.009	91,38	Efisien
		15	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	59,68	N/A	N/A	Rp 866.191.700	Rp 759.366.494	87,67	Efektif
		16	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	87,83	87,69	99,84	Rp 306.043.900	Rp 259.942.357	84,94	Efektif
		17	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	68,86	72,57	105,93	Rp 309.175.800	Rp 252.435.672	81,65	Efektif
		18	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	54,34	58,17	103,87	Rp 827.261.100	Rp 806.817.435	97,53	Efisien
3.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	19	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Juta Rupiah	3.168.130	1.666,81	52,61	Rp 2.037.492.400	Rp 1.760.791.426	86,42	Efektif
		20	PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	Juta Rupiah	191,390	196,15	102,48	Rp 1.251.546.000	Rp 1.051.109.410	83,98	Efektif
		21	PDRB Industri Pengolaan	Juta Rupiah	1.146.850	1.107.42	96,56	Rp 5.683.887.246	Rp 5.172.911.109	91,01	Efisien
		22	Tingkat Inflasi	Persen	3 +1	2,69	110,43	Rp 827.261.100	Rp 806.817.435	97,53	Efisien
3.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	23	Nilai Investasi Tahunan berskala (PMA/PMDN)	Juta Rupiah	450,000	1.073.894.75	238,68	Rp 142.802.100	Rp 136.823.960	95,81	Efisien
3.1.3	Meningkatnya Kesempatan Kerja	24	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,60	3,05	82,70	Rp 6.197.237.336	Rp 5.596.741.787	90,31	Efisien
4.1.1	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah	25	Rasio Konektivitas antar Wilayah	Angka	75,83	74,80	98,64	Rp 6.961.673.600	Rp 6.691.289.815	96,12	Efisien

4.1.2	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	26	Indeks Infrastruktur Wilayah	Nilai	72,02	67,55	93,79	Rp 15.877.469.227	Rp 14.684.517.623	92,49	Efesien
5.1.1	0	27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,64	76,27	99,91	Rp 3.103.059.850	Rp 2.774.485.338	89,41	Efesien
		28	Indeks Resiko Bencana	Angka	152,06	112,36	135,33	Rp 1.762.410.400	Rp 1.699.141.906	96,41	Efesien

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. BURHANUDIN, S.H.

Jabatan : Bupati Belitung Timur

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Manggar, 15 Januari 2025

Bupati Belitung Timur,



Drs. BURHANUDIN, S.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	
Misi 1 : Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Pemerintah kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik				
1.1	Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	63,00	Nilai
1.1.1	Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan	92,00	Persen
		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (ST)	Status
1.1.2	Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70,00	Nilai
1.1.3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	BB	Nilai
1.2	Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien	Indeks Pelayanan Publik	3,80	Nilai Indeks
1.2.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	94,50	Nilai Kepatuhan
1.2.2	Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,60	Angka Indeks
1.3	Terwujudnya kelembagaan dan manajemen sumber daya aparatur yang efisien	Indeks Merit System	163	Nilai 100-400
1.3.1	Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintah daerah	Indeks Kelembagaan	78,00	Persen
1.3.2	Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur	Indeks Profesionalisme ASN	72,00	Skor 1-100
Misi 2 : Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja				
2.1	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,60	Persen
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,35	Persen
2.1.1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	2,90	Persen
		Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun	0,14	Persen
2.1.2	Meningkatnya investasi	Nilai Investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	402,814	Juta Rupiah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	
2.2	Meningkatnya perekonomian lokal	<i>Laju Pertumbuhan Ekonomi</i>	4,50	<i>Persen</i>
		<i>PDRB per kapita</i>	68,29	<i>Juta Rupiah</i>
2.2.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	3,70	Persen
		Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	5,00	Persen
		Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	11,90	Persen
2.2.2	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,00	Nilai 1-5
Misi 3 : Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Timurm melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan				
3.1	Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat	<i>Indeks Pembangunan Manusia</i>	73,33	<i>Nilai Indeks</i>
3.1.1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	11,70	Tahun
		Rata-Rata Lama Sekolah	8,95	Tahun
3.1.2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Kabupaten Sehat	Wistara	Predikat
3.2	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana	<i>Indeks infrastruktur wilayah</i>	95,00	<i>Nilai 1-100</i>
		<i>Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup</i>	0,40	<i>Nilai</i>
3.2.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	98,78	Persen
		Indeks infrastruktur pekerjaan umum	74,02	Nilai
		Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman	76,52	Nilai
3.2.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,40	Nilai 1-100
		Indeks Risiko Bencana	168,40	Angka
3.3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	<i>Angka kemiskinan</i>	5,88	<i>Persen</i>
		<i>Indeks Gini</i>	0,260	<i>Nilai</i>
3.3.1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,48	Angka
		Indeks Keparahan Kemiskinan	0,13	Angka

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	
3.3.2	Terwujudnya Pemerataan Perlindungan dan jaminan sosial	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	97,50	Persen
		Proporsi peserta program jaminan sosial bidang Ketenagakerjaan	85,00	Persen
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100	Persen

No.	Program	Anggaran
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 1.000.656.300
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rp. 21.719.198.100
3	Program Hubungan Industrial	Rp. 209.613.300
4	Program Kawasan Permukiman	Rp. 343.757.600
5	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 1.738.822.400
6	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.007.829.600
7	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 137.299.550
8	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 635.966.200
9	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 48.279.100
10	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 49.944.000
11	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Rp. 5.440.800
12	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 1.168.327.600
13	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 362.502.700
14	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 829.526.800
16	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 545.847.500
17	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 417.767.200
18	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 2.679.590.750
19	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 814.172.400

No.	Program	Anggaran	
20	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp.	32.460.700
21	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	348.383.800
22	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp.	52.893.400
23	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp.	803.367.400
24	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.	1.315.147.600
25	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp.	197.687.000
27	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.	144.162.700
28	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	48.173.784.211
29	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp.	10.150.987.600
30	Program Penanganan Bencana	Rp.	711.294.900
31	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp.	19.821.000
32	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.	4.185.000
33	Program Penanggulangan Bencana	Rp.	2.407.710.800
34	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp.	383.312.500
35	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp.	639.873.000
36	Program Penatagunaan Tanah	Rp.	249.110.000
37	Program Pencatatan Sipil	Rp.	177.934.700
38	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp.	349.149.100
39	Program Pendaftaran Penduduk	Rp.	64.353.300
40	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp.	139.209.000
42	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp.	1.068.338.500
44	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Rp.	49.999.600
45	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.	37.032.100
46	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp.	65.323.000
47	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp.	133.312.000

No.	Program	Anggaran
48	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Rp. 105.028.900
49	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 2.832.597.250
50	Program Pengelolaan Arsip	Rp. 219.160.700
51	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 699.835.300
52	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 4.184.237.000
53	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 8.146.781.000
54	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 2.594.207.600
55	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 11.345.100
56	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 29.029.000
57	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp. 581.958.200
58	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp. 85.904.000
59	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 99.605.282.950
60	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 702.253.600
61	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 2.033.778.800
62	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 41.713.403.836
63	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 1.710.584.000
64	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.468.334.900
65	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp. 118.801.500
66	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 2.808.291.500
68	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 14.050.000
69	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 13.539.305.076
71	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 5.737.500
72	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Rp. 65.054.000
74	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 72.538.000
75	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 955.721.100
76	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 6.581.861.240
77	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 866.888.100
78	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 274.392.700
79	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 628.691.800
81	Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 134.402.800

No.	Program	Anggaran
82	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 429.128.200
83	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 1.283.079.000
84	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rp. 424.738.000
85	Program Pengembangan Umkm	Rp. 426.127.100
86	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 26.119.800
87	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 49.511.800
88	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 3.711.200
89	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 402.179.750
90	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 119.247.800
91	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.185.906.300
92	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 528.332.000
93	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 122.519.100
94	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 929.158.300
95	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.565.211.300
97	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 1.988.139.900
98	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 434.746.000
99	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 1.330.942.300
100	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 2.149.029.475
101	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 2.123.927.103
102	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 53.039.600
103	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 338.988.100
104	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 1.632.181.600

No.	Program	Anggaran
105	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 9.437.672.728
106	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 1.533.347.400
107	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 614.038.039.062
108	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 250.911.000
109	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 1.522.788.000
110	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 9.475.717.020
111	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 7.703.059.500
112	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 178.925.100
113	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 2.464.924.100
114	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.529.322.100
115	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 230.122.300
116	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp. 341.434.900
117	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 123.901.000
118	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 200.000.000
119	Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 851.961.400
120	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp. 1.182.694.000
121	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp. 487.034.800
122	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 199.559.500
123	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 32.999.900
124	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 581.687.700
126	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 400.924.000
127	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp. 175.614.700
128	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Rp. 232.330.600
129	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 290.194.000
130	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 298.589.200
131	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 3.584.228.300
132	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp. 974.892.900

No.	Program	Anggaran
133	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 189.149.500
134	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 320.246.000
135	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp. 10.992.300
136	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp. 131.672.900
137	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp. 164.497.600

Manggar, 15 Januari 2025

Bupati Belitung Timur,



Drs. BURHANUDIN, S.H.

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kamarudin Muten

Jabatan : Bupati Belitung Timur

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Manggar, 29 Oktober 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

A blue ink signature of Kamarudin Muten is written over the official seal of the Bupati Belitung Timur. The signature is stylized and extends to the right.

KAMARUDIN MUTEN

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Misi 3 : Mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan , pariwisata, perikanan, kelautan, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan				
3.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	3,05	Persen
		Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	83.940,00	Ribu Rupiah
		Indonesia <i>Blue Economy Index</i> (IBEI)	26,49	Nilai
		Rasio Gini	0,225	Nilai
3.1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.168.130	Juta Rupiah
		PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	191.390	Juta Rupiah
		PDRB Industri Pengolahan	1.146.850	Juta Rupiah
		Tingkat Inflasi	3±1	Persen
3.1.2	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	450.000	Juta Rupiah
3.1.3	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	2.60	Persen
Misi 4 : Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas dan memadai untuk pemerataan kesejahteraan				
4.1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	73,925	Nilai
4.1.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	75,83	Angka
4.1.2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Indeks Infrastruktur Wilayah	72,02	Nilai
Misi 5 : Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan				
5.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Penurunan Intensitas Emisi GRK	17,67	Persen
5.1.1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,34	Nilai
		Indeks Risiko Bencana	152,06	Angka

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Misi 1 : Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif.				
1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	82,58	Nilai
1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	Nilai SAKIP	70,01 (BB)	Nilai
		Indeks SPBE	3,5	Nilai
		Indeks Profesionalisme ASN	80	Nilai
		Indeks Pelayanan Publik	4,05	Nilai
		Maturitas SPIP	3	Level
1.1.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WTP	Predikat
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	83,71	Nilai
Misi 2 : Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas produktif, berakhlak, berbudaya, dan bahagia.				
2.1	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	73,98	Nilai
2.1.1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	11,79	Tahun
		Rata-Rata Lama Sekolah	9,13	Tahun
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	85	Angka
2.1.2	Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi	Usia Harapan Hidup	73,04	Tahun
		Prevalensi Stunting pada Balita	16,34	Persen
		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	10,32	Persen
2.1.3	Meningkatnya kesejahteraan sosial dan budaya	Angka Kemiskinan	6,2	Angka
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	59,68	Nilai
		Indeks Pembangunan Gender	87,83	Nilai
		Indeks Perlindungan Anak	68,86	Nilai
		Indeks Pembangunan Pemuda	54,34	Nilai

No.	Program		Anggaran
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.	840.000.000,00
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp.	12.043.474.100,00
3.	Program Hubungan Industrial	Rp.	371.040.000,00
4.	Program Kawasan Permukiman	Rp.	253.441.600,00
5.	Program Kepegawaian Daerah	Rp.	920.774.600,00
6.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	217.469.000,00
7.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	33.537.300,00
8.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	159.150.000,00
9.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp.	42.857.100,00
10.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp.	49.944.000,00
11.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp.	53.939.800,00
12.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp.	670.540.600,00
13.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.	166.065.500,00
14.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.	755.000.000,00
15.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.	226.999.900,00
16.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp.	330.647.200,00
17.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	425.548.800,00
18.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp.	71.100.000,00
19.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp.	32.460.700,00
20.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	52.985.000,00
21.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp.	13.312.000,00
22.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp.	130.895.400,00
23.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.	1.188.788.000,00
24.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp.	739.689.000,00
25.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.	46.227.000,00
26.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	50.162.776.951,00

No.	Program		Anggaran
27.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp.	9.637.854.100,00
28.	Program Penanganan Bencana	Rp.	132.525.000,00
29.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp.	14.136.800,00
30.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.	2.250.000,00
31.	Program Penanggulangan Bencana	Rp.	1.762.410.400,00
32.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp.	478.262.500,00
33.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp.	522.373.000,00
34.	Program Penatagunaan Tanah	Rp.	866.190.000,00
35.	Program Pencatatan Sipil	Rp.	20.880.500,00
36.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp.	126.432.500,00
37.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp.	15.360.900,00
38.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp.	89.209.000,00
39.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.	569.629.400,00
40.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.	14.577.100,00
41.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp.	68.556.800,00
42.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp.	36.040.000,00
43.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.	1.927.390.650,00
44.	Program Pengelolaan Arsip	Rp.	79.537.900,00
45.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.	389.691.800,00
46.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp.	5.148.338.000,00
47.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.	1.902.616.200,00
48.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.	16.807.500,00
49.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.	285.697.300,00
50.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	95.652.773.350,00
51.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp.	433.327.200,00
52.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.	1.356.822.800,00
53.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp.	40.931.145.939,00
54.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp.	980.346.200,00

No.	Program		Anggaran
55.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp.	2.039.609.200,00
56.	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp.	118.801.500,00
57.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp.	2.158.541.700,00
58.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp.	1.048.604.400,00
59.	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Rp.	65.054.000,00
60.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp.	19.841.000,00
61.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp.	523.064.000,00
62.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp.	6.136.143.440,00
63.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp.	816.261.100,00
64.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp.	232.717.700,00
65.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp.	697.446.200,00
66.	Program Pengembangan Kurikulum	Rp.	93.915.200,00
67.	Program Pengembangan Perumahan	Rp.	351.872.600,00
68.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp.	112.443.700,00
69.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp.	8.863.200,00
70.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp.	49.511.800,00
71.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp.	262.226.200,00
72.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.	38.979.000,00
73.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.	647.959.950,00
74.	Program Pengendalian Penduduk	Rp.	175.417.000,00
75.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp.	38.838.100,00
76.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp.	579.051.400,00
77.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp.	985.145.300,00
78.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp.	581.005.400,00
79.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp.	107.358.800,00

No.	Program		Anggaran
80.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	905.230.500,00
81.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp.	1.786.503.700,00
82.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp.	1.885.784.503,00
83.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.	48.725.600,00
84.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp.	189.002.400,00
85.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp.	1.366.011.900,00
86.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp.	1.570.937.170,00
87.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	894.723.900,00
88.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	571.833.173.506,00
89.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.	400.924.000,00
90.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.	1.152.120.400,00
91.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp.	5.426.464.227,00
92.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp.	6.528.346.400,00
93.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	121.423.000,00
94.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.	500.656.300,00
95.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.	748.840.000,00
96.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp.	92.601.000,00
97.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp.	93.666.000,00
98.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	29.564.900,00
99.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp.	172.710.000,00
100.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp.	596.640.700,00
101.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	68.735.100,00
102.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp.	64.259.500,00
103.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	305.889.100,00

No.	Program		Anggaran
104.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	109.471.500,00
105.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp.	113.925.400,00
106.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp.	309.175.800,00
107.	Program Perlindungan Perempuan	Rp.	196.514.200,00
108.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp.	3.400.050.800,00
109.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp.	188.136.000,00
110.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp.	41.125.000,00
111.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	235.408.500,00
112.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp.	10.992.300,00
113.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.	55.239.000,00
114.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.	65.582.600,00

Manggar, Oktober 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SASARAN

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

Kode Sasaran	Sasaran	no	Indikator		Program dan Kegiatan	Input (Rp)			
						Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%
1.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	1	Nilai SAKIP			17.864.690.480,00	11.362.490.980,00	10.664.376.037,00	93,86
						2.065.171.500,00	1.313.877.900,00	1.159.015.709,00	88,21
					1 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	305.919.100,00	305.889.100,00	293.621.236,00	95,99
					- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	299.007.400,00	299.007.400,00	287.000.458,00	95,98
					- Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	6.911.700,00	6.881.700,00	6.620.778,00	96,21
					- Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	188.250.500,00	217.469.000,00	191.839.293,00	88,21
					- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	83.952.700,00	113.171.200,00	101.900.363,00	90,04
					- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	62.767.400,00	62.767.400,00	55.073.275,00	87,74

					-	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	41.530.400,00	41.530.400,00	34.865.655,00	83,95
				3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		1.529.322.100,00	748.840.000,00	637.035.000,00	85,07
					-	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.154.804.100,00	649.770.000,00	577.790.000,00	88,92
					-	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	65.840.000,00	23.760.000,00	22.950.000,00	96,59
					-	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	234.870.000,00	154.800.000,00	145.410.000,00	93,93
					-	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	206.850.000,00	123.360.000,00	102.330.000,00	82,95
					-	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	191.450.000,00	189.450.000,00	178.980.000,00	94,47
						Sub Kegiatan Pengawasan Desa	187.140.000,00	98.000.000,00	91.930.000,00	93,81
						Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	268.654.100,00	60.400.000,00	36.190.000,00	59,92
					-	Kegiatan Penyelenggaraan	374.518.000,00	99.070.000,00	59.245.000,00	59,80

							Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					
						-	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	225.008.000,00	16.200.000,00	11.685.000,00	72,13	
						-	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	149.510.000,00	82.870.000,00	47.560.000,00	57,39	
					4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.679.800,00	41.679.800,00	36.520.180,00	87,62		
					-	Sub Kegiatan Peningkatan dan Reformasi Birokrasi	41.679.800,00	41.679.800,00	36.520.180,00	87,62		
		2	Indek SPBE					3.986.112.650,00	2.399.354.950,00	2.307.488.299,00	96,17	
							5	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.832.597.250,00	1.927.390.650,00	1.905.740.519,00	98,88
							-	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27.363.650,00	27.363.650,00	25.564.410,00	93,42
							-	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.805.233.600,00	1.900.027.000,00	1.880.176.109,00	98,96
							6	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	581.958.200,00	285.697.300,00	272.526.280,00	95,39
-	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik						581.958.200,00	285.697.300,00	272.526.280,00	95,39		

						Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
				7		PROGRAM PENYELENGGARANN STATISTIK SEKTORAL	341.434.900,00	93.666.000,00	85.745.300,00	91,54
					-	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	341.434.900,00	93.666.000,00	85.745.300,00	91,54
				8		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	230.122.300,00	92.601.000,00	43.476.200,00	46,95
					-	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	230.122.300,00	93.666.000,00	43.476.200,00	46,42
		3	Indeks Profesioanl ASN				9.250.154.030,00	6.653.244.830,00	6.371.285.587,00	95,76
				9		PROGRAM KEPEGAWAIAN PEMERINTAH	1.738.822.400,00	920.774.600,00	836.648.097,00	90,86
					-	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	262.636.100,00	104.390.800,00	97.977.090,00	93,86
						Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	9.979.200,00	3.126.000,00	3.094.050,00	98,98
						Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	197.267.300,00	86.543.800,00	80.717.040,00	93,27

						Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	15.000.000,00	1.221.000,00	666.000,00	54,55
						Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	40.389.600,00	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00
					-	Mutasi dan Promosi ASN	485.403.700,00	364.542.200,00	299.790.034,00	82,24
						Pengelolaan Mutasi ASN	23.331.500,00	23.231.500,00	15.935.990,00	68,60
						Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	106.573.700,00	22.764.700,00	16.326.315,00	71,72
						Pengelolaan Promosi ASN	355.498.500,00	318.546.000,00	267.527.729,00	83,98
					-	Pengembangan Kompetensi ASN	909.558.600,00	451.841.600,00	438.880.973,00	97,13
						Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	71.940.500,00	57.515.600,00	50.501.953,00	87,81
						Pengelolaan Assessment Center	277.144.100,00	0,00	0,00	0,00
						Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	560.474.000,00	394.326.000,00	388.379.020,00	98,49
					-	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	81.224.000,00	0,00	0,00	0,00
						Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	81.224.000,00	0,00	0,00	0,00
				10	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		1.283.079.000,00	112.443.700,00	112.417.350,00	99,98
					-	Pengembangan Kompetensi Teknis	40.223.000,00	0,00	0,00	0,00

						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	40.223.000,00	0,00	0,00	0,00
					-	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.242.856.000,00	112.443.700,00	112.417.350,00	99,98
						Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	50.213.500,00	0,00	0,00	0,00
						Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	237.579.700,00	112.443.700,00	112.417.350,00	99,98
						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	955.062.800,00	0,00	0,00	0,00
				11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.228.252.630,00	5.620.026.530,00	5.422.220.140,00	96,48

					-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.622.635.730,00	4.564.895.730,00	4.419.959.026,00	96,82
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.622.635.730,00	4.564.895.730,00	4.419.959.026,00	96,82
					-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.100.000,00	5.500.000,00	1.280.000,00	23,27
						Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	42.100.000,00	5.500.000,00	1.280.000,00	23,27
					-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	546.859.800,00	164.121.800,00	154.907.447,00	94,39
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.981.800,00	13.489.600,00	12.608.490,00	93,47
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.990.000,00	23.719.100,00	18.320.390,00	77,24
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.986.800,00	22.913.100,00	21.480.840,00	93,75
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.901.200,00	4.000.000,00	2.498.600,00	62,47
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000,00	100.000.000,00	99.999.127,00	100,00
					-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.985.200,00	0,00	0,00	0,00

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.985.200,00	-	-	0,00
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	702.001.900,00	722.999.000,00	700.460.067,00	96,88
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.200.000,00	1.700.000,00	1.200.000,00	70,59
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	189.840.000,00	188.040.000,00	166.681.742,00	88,64
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	509.961.900,00	533.259.000,00	532.578.325,00	99,87
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.670.000,00	162.510.000,00	145.613.600,00	89,60
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.250.000,00	40.250.000,00	33.733.810,00	83,81
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.660.000,00	72.710.000,00	67.248.110,00	92,49
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.760.000,00	49.550.000,00	44.631.680,00	90,07

4	Indeks Pelayanan Publik		12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	59.037.300,00	59.037.300,00	39.180.776,00	66,37
			-	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	59.037.300,00	59.037.300,00	39.180.776,00	66,37
5	Maturitas SPIP				2.504.215.000,00	936.976.000,00	787.405.666,00	84,04
			13	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.529.322.100,00	748.840.000,00	637.035.000,00	85,07
			-	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.154.804.100,00	649.770.000,00	577.790.000,00	88,92
			-	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	65.840.000,00	23.760.000,00	22.950.000,00	96,59
			-	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	234.870.000,00	154.800.000,00	145.410.000,00	93,93
			-	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	206.850.000,00	123.360.000,00	102.330.000,00	82,95
			-	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	191.450.000,00	189.450.000,00	178.980.000,00	94,47
				Sub Kegiatan Pengawasan Desa	187.140.000,00	98.000.000,00	91.930.000,00	93,81
				Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	268.654.100,00	60.400.000,00	36.190.000,00	59,92

						-	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	374.518.000,00	99.070.000,00	59.245.000,00	59,80
						-	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	225.008.000,00	16.200.000,00	11.685.000,00	72,13
						-	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	149.510.000,00	82.870.000,00	47.560.000,00	57,39
					14	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		974.892.900,00	188.136.000,00	150.370.666,00	79,93
						-	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	215.479.000,00	33.450.000,00	17.834.240,00	53,32
						-	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	215.479.000,00	33.450.000,00	17.834.240,00	53,32
						-	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	759.413.900,00	154.686.000,00	132.536.426,00	85,68
						-	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	206.379.200,00	44.356.000,00	35.335.776,00	79,66
						-	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	553.034.700,00	110.330.000,00	97.200.650,00	88,10

1.1.2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	6	Opini BPK				101.195.425.550,00	97.009.596.150,00	94.348.958.753,04	97,26	
					15	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		99.361.260.650,00	95.652.773.350,00	93.423.159.187,04	97,67
						1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	685.932.800,00	346.361.000,00	264.087.517,00	76,25
						-	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	48.952.600,00	26.797.600,00	19.038.399,00	71,05
						-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	47.563.900,00	23.792.000,00	18.520.750,00	77,84
						-	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	121.473.400,00	65.585.500,00	50.648.790,00	77,23
		7	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		-	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	156.298.400,00	75.302.300,00	57.836.451,00	76,81	
					-	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	103.323.400,00	51.273.600,00	46.491.983,00	90,67	
					-	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	96.388.700,00	46.296.100,00	17.040.014,00	36,81	
					-	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi	111.932.400,00	57.313.900,00	54.511.130,00	95,11	

	serta Kebijakan Bidang Anggaran				
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	514.555.400,00	246.913.000,00	195.556.718,00	79,20
-	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	246.074.000,00	104.484.500,00	89.048.403,00	85,23
-	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	29.594.000,00	18.416.800,00	17.781.090,00	96,55
-	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	111.252.100,00	56.297.700,00	33.679.374,00	59,82
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	101.127.700,00	55.372.700,00	43.306.896,00	78,21
-	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	26.507.600,00	12.341.300,00	11.740.955,00	95,14

						3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	303.436.500,00	132.178.600,00	110.810.581,00	83,83
						-	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	38.151.800,00	20.202.600,00	16.038.450,00	79,39
						-	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	95.572.200,00	31.901.400,00	28.351.500,00	88,87
						-	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	66.562.900,00	24.942.100,00	22.448.231,00	90,00
						-	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	76.703.100,00	50.271.000,00	39.472.400,00	78,52

						Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	26.446.500,00	4.861.500,00	4.500.000,00	
					4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	97.857.335.950,00	94.927.320.750,00	92.852.704.371,04	97,81
					-	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	90.031.919.200,00	87.501.904.000,00	86.593.152.190,00	0,00
						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.000.000.000,00	600.000.000,00	587.088.502,00	97,85
					-	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	6.825.416.750,00	6.825.416.750,00	5.672.463.679,04	83,11
				16	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		699.835.300,00	389.691.800,00	325.677.097,00	83,57
					1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	699.835.300,00	389.691.800,00	325.677.097,00	83,57
					-	Penyusunan Standar Harga	97.148.000,00	77.072.000,00	62.655.500,00	81,29
					-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	59.015.200,00	27.317.000,00	27.252.000,00	99,76
					-	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	67.741.500,00	36.717.500,00	27.666.302,00	75,35
					-	Penatausahaan Barang Milik Daerah	228.514.600,00	132.946.100,00	117.922.074,00	88,70

		Inventarisasi Barang Milik Daerah	222.889.300,00	114.639.200,00	89.181.221,00	77,79
	-	Pengamanan Barang Milik Daerah	24.526.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
17	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		1.834.164.900,00	1.356.822.800,00	925.799.566,00	68,23
	1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.834.164.900,00	1.356.822.800,00	925.799.566,00	68,23
	-	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	331.000.000,00	136.550.800,00	40.483.877,00	0,00
	-	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	68.699.000,00	44.667.600,00	20.003.949,00	44,78
	-	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	274.757.500,00	206.864.100,00	134.526.024,00	65,03
	-	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	80.860.000,00	66.013.000,00	12.164.090,00	18,43
	-	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	402.776.000,00	235.325.800,00	104.167.280,00	44,27
	-	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	26.558.900,00	18.702.700,00	16.680.580,00	89,19
	-	Penagihan Pajak Daerah	58.880.800,00	45.048.400,00	40.812.890,00	90,60

						-	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	590.632.700,00	603.650.400,00	556.960.876,00	92,27
2.1.1	Meningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	8	Harapan Lama Sekolah					42.249.756.636,00	41.919.013.139,00	38.601.552.106,88	92,09
								42.052.069.636,00	41.179.324.139,00	37.929.184.262,88	92,11
		9	Rata-rata Lama Sekolah	18	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		41.713.403.836,00	40.931.145.939,00	37.724.146.806,88	92,16	
					Pengelolaan Pendidikan SD		23.626.601.400,00	22.901.664.443,00	20.877.300.657,79	91,16	
					-	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	240.000.000,00	240.000.000,00	173.300.000,00	72,21	
					-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	474.460.000,00	474.460.000,00	473.300.300,00	99,76	
					-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	439.000.000,00	439.000.000,00	420.935.600,00	95,89	
					-	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	168.000.000,00	168.000.000,00	167.610.600,00	99,77	
						-	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	734.900.000,00	734.900.000,00	730.323.950,00	99,38
						-	Pengadaan Mebel Sekolah	408.950.000,00	408.950.000,00	404.951.310,00	99,02
				-	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	336.024.000,00	336.024.000,00	320.346.000,00	95,33		
				-	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Peserta Didik	1.000.914.300,00	1.000.914.300,00	0,00	0,00		

					-	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	643.106.200,00	518.106.200,00	451.078.045,00	87,06
					-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	505.400,00	52.678.200,00	52.500.000,00	99,66
					-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	91.204.200,00	91.204.200,00	85.562.520,00	93,81
					-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	49.999.600,00	49.999.600,00	0,00	0,00
					-	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15.626.600.000,00	14.891.372.243,00	14.615.332.284,79	98,15
					-	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	29.992.300,00	29.992.300,00	25.901.450,00	86,36
					-	Pembinan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	28.620.000,00	28.620.000,00	20.100.000,00	70,23
					-	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	26.539.200,00	0,00	0,00	#DIV/0!
					-	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	36.095.200,00	0,00	0,00	#DIV/0!
					-	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	29.834.700,00	29.834.700,00	20.230.633,00	67,81

						Layanan di Bidang Pendidik				
					-	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	28.986.300,00	28.986.300,00	28.213.133,00	97,33
					-	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.692.000,00	20.692.000,00	15.911.190,00	76,90
					-	Pemberian Layanan Pendamping bagi Satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	23.072.600,00	9.200.000,00	0,00	0,00
					-	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	191.545.600,00	191.545.600,00	187.046.908,00	97,65
					-	Pembangunan Ruang Kelas Baru	904.000.000,00	1.063.625.000,00	771.660.400,00	72,55
					-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	402.000.000,00	402.000.000,00	399.150.500,00	99,29
					-	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	44.559.800,00	44.559.800,00	37.584.360,00	84,35
					-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.647.000.000,00	1.647.000.000,00	1.476.261.474,00	89,63
						Pengelolaan Pendidikan SMP	9.971.072.300,00	9.822.305.960,00	8.986.314.890,09	90,63

					-	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	149.328.000,00	149.328.000,00	148.999.179,00	91,63
					-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	400.718.000,00	650.718.000,00	574.126.972,00	92,63
					-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	97.714.000,00	155.714.000,00	155.200.055,00	93,63
					-	Pengadaan Mebel Sekolah	110.426.200,00	110.426.200,00	107.800.980,00	94,63
					-	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	180.542.900,00	180.542.900,00	177.848.640,00	95,63
					-	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Peserta Didik	594.193.000,00	590.711.600,00	0,00	96,63
					-	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	615.297.700,00	465.297.700,00	437.591.071,00	97,63
					-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMP	502.400,00	502.400,00	0,00	98,63
					-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SMP	87.941.000,00	87.941.000,00	83.776.001,00	99,63
					-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	19.999.500,00	19.999.500,00	5.198.400,00	100,63
					-	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7.235.000.000,00	6.952.355.060,00	6.885.953.589,09	101,63
					-	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS	19.992.600,00	19.992.600,00	17.206.650,00	102,63

	Sekolah Menengah Pertama				
-	Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	27.478.500,00	27.478.500,00	20.692.500,00	103,63
-	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	27.601.600,00	27.601.600,00	24.172.820,00	104,63
-	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	27.113.000,00	27.113.000,00	18.091.992,00	105,63
-	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidik	24.992.800,00	5.852.800,00	5.084.110,00	106,63
-	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	19.999.400,00	19.999.400,00	13.316.156,00	107,63
-	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.992.600,00	14.992.600,00	5.936.500,00	108,63
-	Pemberian Layanan Pendamping bagi Satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	30.745.200,00	30.745.200,00	25.160.000,00	109,63
-	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	109.994.000,00	109.994.000,00	105.798.560,00	110,63

					-	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.500.000,00	0,00	0,00	111,63
					-	Pengadaan Perlengkapan Belajar Peserta Didik	174.999.900,00	174.999.900,00	174.360.715,00	112,63
						Pengelolaan PAUD	7.045.375.800,00	7.089.652.600,00	6.812.435.195,00	113,63
					-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.201.744.000,00	1.201.744.000,00	1.132.332.935,00	94,22
					-	Pengadaan Mebel PAUD	68.907.000,00	68.907.000,00	67.932.000,00	98,59
					-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	541.969.000,00	541.969.000,00	477.644.100,00	88,13
					-	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	450.000.000,00	356.400.000,00	310.400.000,00	87,09
					-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.519.440.000,00	1.801.440.000,00	1.735.209.000,00	96,32
					-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	64.276.000,00	64.276.000,00	61.566.000,00	95,78
					-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	218.197.000,00	138.791.000,00	133.621.200,00	96,28
					-	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.058.240.000,00	2.058.240.000,00	2.052.881.100,00	99,74
					-	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	14.505.200,00	0,00	0,00	#DIV/0!

						-	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	17.664.200,00	0,00	0,00	#DIV/0!
						-	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidik	15.335.600,00	15.335.600,00	14.960.360,00	97,55
						-	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	16.070.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
						-	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	127.210.000,00	127.210.000,00	124.874.000,00	98,16
						-	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	16.477.800,00	0,00	0,00	#DIV/0!
						-	Pembangunan Ruang Kelas Baru	600.360.000,00	600.360.000,00	591.478.000,00	98,52
						-	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	50.130.000,00	50.130.000,00	46.342.500,00	92,44
						-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	64.850.000,00	64.850.000,00	63.194.000,00	97,45
							Pengelolaan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	1.070.354.336,00	1.117.522.936,00	1.048.096.064,00	93,79
						-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	505.400,00	505.400,00	0,00	0,00
						-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	19.729.900,00	19.729.900,00	18.288.850,00	92,70

					Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
					-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	17.211.600,00	17.211.600,00	15.049.180,00	87,44
					-	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	552.200.000,00	602.200.000,00	600.457.620,00	99,71
					-	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidik	19.816.500,00	19.816.500,00	15.533.950,00	78,39
					-	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	99.995.600,00	99.995.600,00	96.678.114,00	96,68
					-	Pengadaan perlengkapan sekolah	40.136.536,00	39.805.136,00	38.800.050,00	97,47
					-	Pembangunan Ruang Kelas Baru	241.724.000,00	241.724.000,00	201.248.000,00	83,26
					-	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	29.859.200,00	29.859.200,00	25.774.200,00	86,32
					-	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi peserta didik	49.175.600,00	46.675.600,00	36.266.100,00	77,70
				19	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		134.402.800,00	93.915.200,00	81.747.116,00	87,04
						Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	85.652.800,00	65.253.000,00	54.953.286,00	84,22

						-	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	20.399.800,00	20.399.800,00	14.878.698,00	72,94
						-	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	44.853.200,00	44.853.200,00	40.074.588,00	89,35
						-	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	20.399.800,00	0,00	0,00	#DIV/0!
							Penetapan Kurikulum Muatan Lokal PAUD & PNF	48.750.000,00	28.662.200,00	26.793.830,00	93,48
						-	Penyusunan Silabus Mulok PAUD & PNF	28.662.200,00	28.662.200,00	26.793.830,00	93,48
						-	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal PAUD dan Pendidikan Kesetaraan/Nonformal	20.087.800,00	0,00	0,00	#DIV/0!
					20	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA & SASTRA		65.054.000,00	65.054.000,00	63.803.740,00	98,08
							Pembinaan, Pengembangan Bahasa & Sastra yang Penuurannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	65.054.000,00	65.054.000,00	63.803.740,00	98,08
						-	Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah	30.072.400,00	30.072.400,00	29.044.000,00	96,58

					Kewenangan Kabupaten/Kota				
				-	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	34.981.600,00	34.981.600,00	34.759.740,00	99,37
			21	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		139.209.000,00	89.209.000,00	59.486.600,00	66,68
					Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	139.209.000,00	89.209.000,00	59.486.600,00	66,68
				-	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	79.549.000,00	54.549.000,00	40.136.600,00	73,58
				-	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	59.660.000,00	34.660.000,00	19.350.000,00	55,83
10	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat					197.687.000,00	739.689.000,00	672.367.844,00	90,90
			22	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		197.687.000,00	739.689.000,00	672.367.844,00	90,90

					-	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	171.182.200,00	139.158.000,00	120.464.644,00	86,57
					-	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.504.800,00	600.531.000,00	551.903.200,00	91,90
2.1.2	Meningkatkan Pemertaan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi	11	Usia Harapan Hidup				46.370.339.411,00	50.252.660.251,00	44.852.968.898,16	92,90
							46.032.181.411,00	50.062.607.851,00	44.698.637.113,08	89,29
		12	Prevalensi Stunting pada Balita	23	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		45.694.023.411,00	49.872.555.451,00	44.544.305.328,00	89,32
					-	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.962.817.201,00	21.226.147.741,00	18.128.045.050,00	85,40
					-	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.702.016.210,00	28.617.217.710,00	26.387.116.278,00	92,21
					-	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	9.550.000,00	9.550.000,00	9.540.000,00	99,90
					-	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.640.000,00	19.640.000,00	19.604.000,00	99,82

24	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		905.230.500,00	905.230.500,00	802.728.597,00	88,68
	-	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	176.770.900,00	176.770.900,00	158.677.050,00	89,76
	-	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	728.459.600,00	728.459.600,00	644.051.547,00	88,41
25	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		10.992.300,00	10.992.300,00	10.877.000,00	98,95
	-	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4.993.200,00	4.993.200,00	4.884.400,00	97,82
	-	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	5.999.100,00	5.999.100,00	5.992.600,00	99,89
26	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		330.647.200,00	330.647.200,00	274.513.791,00	83,02

				-	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.827.800,00	23.827.800,00	23.779.775,00	99,80
				-	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68.903.400,00	68.903.400,00	51.992.466,00	75,46
				-	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	237.916.000,00	237.916.000,00	198.741.550,00	83,53
		13	Prevalensi Ketidacukupan Kosumsi Pangan (Prevalance of Undernourishment)			338.158.000,00	190.052.400,00	154.331.785,08	81,20
				27	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHAN PANGAN MASYARAKAT	185.025.000,00	107.358.800,00	82.365.605,08	76,72
				-	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	85.191.200,00	72.238.600,00	67.235.866,00	93,07
				-	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	49.990.600,00	44.521.600,00	41.177.296,00	92,49

						-	Sub Kegiatan Penyediaan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah Kabupaten/Kota	25.247.600,00	20.519.000,00	19.654.270,00	95,79
						-	Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	9.953.000,00	7.198.000,00	6.404.300,00	88,97
						-	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	89.860.200,00	30.172.200,00	10.969.439,08	36,36
						-	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	89.860.200,00	30.172.200,00	10.969.439,08	36,36
						-	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	9.973.600,00	4.948.000,00	4.160.300,00	84,08
						-	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita per Tahun	9.973.600,00	4.948.000,00	4.160.300,00	84,08
					28	PROGRAM PENANGANAN KEWAWANAN PANGAN		19.821.000,00	14.136.800,00	13.328.530,00	94,28
						-	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	9.953.000,00	7.632.600,00	7.521.410,00	98,54

					-	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	9.953.000,00	7.632.600,00	7.521.410,00	98,54
					-	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	9.868.000,00	6.504.200,00	5.807.120,00	89,28
					-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	9.868.000,00	6.504.200,00	5.807.120,00	89,28
				29	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		133.312.000,00	68.556.800,00	58.637.650,00	85,53
					-	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	133.312.000,00	68.556.800,00	58.637.650,00	85,53
					-	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	133.312.000,00	68.556.800,00	58.637.650,00	85,53
2.1.3	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Budaya	14	Angka Kemiskinan				4.508.671.000,00	2.857.177.500,00	2.579.802.967,00	90,29
							2.021.328.000,00	548.505.000,00	501.241.009,00	91,38
				30	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		814.172.400,00	71.100.000,00	68.000.000,00	95,64

-	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.200.000,00	2.100.000,00	2.040.000,00	97,14
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4.200.000,00	2.100.000,00	2.040.000,00	97,14
-	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	809.972.400,00	69.000.000,00	65.960.000,00	95,59
-	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	765.000.000,00	69.000.000,00	65.960.000,00	95,59
-	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	26.972.400,00	-	-	-
-	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	18.000.000,00	-	-	-
31	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	320.246.000,00	235.408.500,00	203.088.550,00	86,27
-	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	269.717.600,00	200.984.500,00	198.269.710,00	98,65
-	Penyediaan Permakanan	72.046.000,00	71.630.000,00	71.288.230,00	99,52

					-	Penyediaan Sandang	58.311.100,00	49.488.000,00	48.817.800,00	98,65
					-	Penyediaan Alat Bantu	55.080.200,00	55.080.200,00	53.382.120,00	96,92
					-	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	39.910.100,00	-	-	-
					-	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	44.370.200,00	24.786.300,00	24.781.560,00	99,98
				-	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		50.528.400,00	34.424.000,00	4.818.840,00	14,00
				-	-	Pemberian Layanan Kedaruratan	10.394.400,00	10.290.000,00	-	-
					-	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	20.000.000,00	10.000.000,00	1.739.200,00	17,39
					-	Pemberian Layanan Rujukan	20.134.000,00	14.134.000,00	3.079.640,00	21,79
				32	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		175.614.700,00	109.471.500,00	105.397.459,00	96,28
				-	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		26.946.200,00	-	-	-
				-	-	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	26.946.200,00	-	-	-

				-	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	148.668.500,00	109.471.500,00	105.397.459,00	96,28
				-	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.996.800,00	-	-	-
				-	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	142.671.700,00	109.471.500,00	105.397.459,00	96,28
			33	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		711.294.900,00	132.525.000,00	124.755.000,00	94,14
			-	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		69.445.900,00	-	-	0,00
			-	Penyediaan Makanan	69.445.900,00	-	-	-	0,00
			-	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		641.849.000,00	132.525.000,00	124.755.000,00	94,14
			-	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	641.849.000,00	132.525.000,00	124.755.000,00	124.755.000,00	94,14
15	Indeks Pembangunan Kebudayaan					797.437.300,00	866.191.700,00	759.366.494,00	87,67
		34	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		628.691.800,00	697.446.200,00	606.588.064,00	86,97	
		-	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	353.836.800,00	353.836.800,00	282.532.704,00	79,85		
		-	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		253.664.000,00	253.664.000,00	245.996.400,00	96,98	

					-	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	21.191.000,00	89.945.400,00	78.058.960,00	86,78
				35	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		49.944.000,00	49.944.000,00	40.948.350,00	81,99
					-	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	49.944.000,00	49.944.000,00	40.948.350,00	81,99
				36	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		118.801.500,00	118.801.500,00	111.830.080,00	94,13
					-	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	118.801.500,00	118.801.500,00	111.830.080,00	94,13
		16	Indeks Pembangunan Gender				532.823.600,00	306.043.900,00	259.942.357,00	84,94
				37	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		37.032.100,00	14.577.100,00	14.566.700,00	99,93
				-	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		37.032.100,00	14.577.100,00	14.566.700,00	99,93
					-	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	37.032.100,00	14.577.100,00	14.566.700,00	99,93
				38	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		298.589.200,00	196.514.200,00	154.875.407,00	78,81
				-	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		84.615.200,00	60.032.000,00	59.733.187,00	99,50
					-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap	84.615.200,00	60.032.000,00	59.733.187,00	99,50

		Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
-	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		169.774.000,00	136.482.200,00	95.142.220,00	69,71
	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	169.774.000,00	136.482.200,00	95.142.220,00	69,71
-	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		44.200.000,00	-	-	-
	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	44.200.000,00	-	-	-
39	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		53.039.600,00	48.725.600,00	48.655.400,00	99,86
-	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		53.039.600,00	48.725.600,00	48.655.400,00	99,86
	-	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan	53.039.600,00	48.725.600,00	48.655.400,00	99,86

					Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
			40		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	144.162.700,00	46.227.000,00	41.844.850,00	90,52
			-		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	144.162.700,00	46.227.000,00	41.844.850,00	90,52
			-		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	144.162.700,00	46.227.000,00	41.844.850,00	90,52
17	Indeks Perlindungan Anak					290.194.000,00	309.175.800,00	252.435.672,00	81,65
			41		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	290.194.000,00	309.175.800,00	252.435.672,00	81,65
			-		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	69.968.000,00	69.968.000,00	69.746.596,00	82,65
			-		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	69.968.000,00	69.968.000,00	69.746.596,00	83,65
			-		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	131.826.000,00	150.807.800,00	124.194.820,00	84,65
			-		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	131.826.000,00	150.807.800,00	124.194.820,00	85,65

					-	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88.400.000,00	88.400.000,00	58.494.256,00	86,65			
					-	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	88.400.000,00	88.400.000,00	58.494.256,00	87,65			
					18	Indeks Pembangunan Pemuda				866.888.100,00	827.261.100,00	806.817.435,00	88,65
					42			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAANrogram Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	866.888.100,00	827.261.100,00	806.817.435,00	88,65	
							-	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Kader Kabupaten/Kota	407.481.200,00	392.176.200,00	374.789.625,00	89,65	
							-	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	459.406.900,00	435.084.900,00	432.027.810,00	99,30	
					3.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi						33.737.588.268,00	9.800.186.746,00
19	PDRB Sektor Pertanian,						20.769.575.234,00	2.037.492.400,00	1.760.791.426,00	86,42			
		43	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.502.866.900,00	1.152.120.400,00		930.917.370,00	80,80					

		Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah kabupaten/ Kota				
	-	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	322.036.800,00	262.226.200,00	225.645.880,00	86,05
46	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA BENCANA PERTANIAN		49.511.800,00	49.511.800,00	44.189.950,00	89,25
	-	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	49.511.800,00	49.511.800,00	44.189.950,00	89,25
	-	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	49.511.800,00	49.511.800,00	44.189.950,00	89,25
47	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		744.509.400,00	172.710.000,00	168.630.000,00	97,64
	-	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	744.509.400,00	172.710.000,00	168.630.000,00	97,64
	-	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	152.944.700,00	6.300.000,00	6.020.000,00	95,56
	-	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas	591.564.700,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00

		Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				
	-	Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	-	164.160.000,00	160.360.000,00	97,69
48	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		2.468.334.900,00	2.039.609.200,00	1.962.455.217,00	96,22
	-	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2.104.928.400,00	1.979.242.700,00	1.902.742.097,00	96,13
	-	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	347.521.000,00	53.985.000,00	53.512.700,00	99,13
	-	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.885.500,00	6.381.500,00	6.200.420,00	97,16
49	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		1.680.115.200,00	980.346.200,00	945.648.370,00	96,46
	-	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	178.281.300,00	29.280.200,00	29.136.690,00	99,51

				-	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.501.833.900,00	951.066.000,00	916.511.680,00	96,37
			50	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		105.028.900,00	36.040.000,00	1.250.000,00	3,47
				-	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	105.028.900,00	36.040.000,00	1.250.000,00	3,47
			51	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		929.158.300,00	579.051.400,00	552.572.840,00	95,43
				-	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	253.143.500,00	9.196.000,00	8.688.750,00	94,48
				-	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	117.752.800,00	31.260.300,00	30.033.900,00	96,08
				-	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	558.262.000,00	538.595.100,00	513.850.190,00	95,41
20	PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum					3.581.205.500,00	1.251.546.000,00	1.051.109.410,00	83,98
			52	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		1.988.139.900,00	581.005.400,00	449.400.210,00	77,35

			-	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	633.939.100,00	0,00	0,00	0,00
			-	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.250.224.100,00	522.705.800,00	404.945.640,00	77,47
			-	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	103.976.700,00	58.299.600,00	44.454.570,00	76,25
		53	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		1.168.327.600,00	670.540.600,00	601.709.200,00	89,73
			-	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.168.327.600,00	670.540.600,00	601.709.200,00	89,73
		54	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		424.738.000,00	0,00	0,00	0,00
			-	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	274.954.000,00	0,00	0,00	0,00
			-	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	149.784.000,00	0,00	0,00	0,00
21	PDRB Industri Pengolaan				8.519.919.434,00	5.683.887.246,00	5.172.911.109,00	91,01
		55	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		1.533.347.400,00	894.723.900,00	837.086.541,00	93,56

				-	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.533.347.400,00	894.723.900,00	837.086.541,00	93,56
				-	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.533.347.400,00	894.723.900,00	837.086.541,00	93,56
				56	PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	131.672.900,00	55.239.000,00	49.193.500,00	89,06
				-	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	30.860.000,00	0,00	0,00	0,00
				-	Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	30.860.000,00	0,00	0,00	0,00
				-	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	90.849.000,00	55.239.000,00	49.193.500,00	89,06
				-	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	37.700.000,00	30.200.000,00	29.496.000,00	97,67
				-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	53.149.000,00	25.039.000,00	19.697.500,00	78,67

				-	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.963.900,00	0,00	0,00	0,00
				-	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	9.963.900,00	0,00	0,00	0,00
				57	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	164.497.600,00	65.582.600,00	52.444.185,00	79,97
				-	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	164.497.600,00	65.582.600,00	52.444.185,00	79,97
				-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	147.055.000,00	61.380.500,00	48.257.360,00	78,62
				-	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	17.442.600,00	4.202.100,00	4.186.825,00	99,64
				58	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	487.034.800,00	68.735.100,00	47.712.044,00	69,41
				-	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	487.034.800,00	68.735.100,00	47.712.044,00	69,41
				-	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00
				-	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	49.004.100,00	13.927.600,00	13.689.800,00	98,29

						Pembangunan Sumber Daya Industri					
					-	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.508.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	414.222.100,00	54.807.500,00	34.022.244,00	62,08	
					-	Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	16.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		3.711.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		3.711.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	3.711.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					60	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PROGRAM PENGELOLAAN SITEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	14.050.000,00	0,00	0,00	0,00
						Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	14.050.000,00	0,00	0,00	0,00
					-	Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	14.050.000,00	0,00	0,00	0,00
					61	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.185.605.534,00	4.599.606.646,00	4.186.474.839,00	91,02
					-	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	-	-	0,00
					-	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	-	-	0,00
					-	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.415.596.134,00	3.689.799.746,00	3.326.722.727,00	90,16
					-	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.415.596.134,00	3.689.799.746,00	3.326.722.727,00	90,16
					-	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.500.000,00	-	-	0,00
					-	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37.500.000,00	-	-	0,00
					-	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	653.171.700,00	212.216.900,00	201.167.502,00	94,79

					-	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.028.500,00	4.670.200,00	4.539.900,00	97,21
					-	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.515.500,00	52.439.100,00	49.194.090,00	93,81
					-	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.648.700,00	18.074.300,00	17.001.720,00	94,07
					-	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.840.200,00	37.255.200,00	35.263.795,00	94,65
					-	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	47.670.800,00	24.778.100,00	20.767.028,00	83,81
					-	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	54.468.000,00	-	-	0,00
					-	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	75.000.000,00	74.400.969,00	99,20
				-	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		82.433.500,00	-	-	0,00
					-	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya	82.433.500,00	-	-	0,00
				-	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		655.921.200,00	479.355.000,00	444.385.727,00	92,70

					-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
					-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.400.000,00	100.200.000,00	72.370.727,00	72,23
					-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	526.921.200,00	377.155.000,00	370.015.000,00	98,11
				-	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		335.983.000,00	218.235.000,00	214.198.883,00	98,15
					-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	226.275.000,00	200.695.000,00	197.924.883,00	98,62
					-	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	77.248.000,00	8.770.000,00	8.137.000,00	92,78
					-	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.460.000,00	8.770.000,00	8.137.000,00	92,78
		22	Tingkat Inflasi				866.888.100,00	827.261.100,00	806.817.435,00	97,53
				62	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAAN		866.888.100,00	827.261.100,00	806.817.435,00	93,07
					-	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	407.481.200,00	392.176.200,00	374.789.625,00	91,98

						dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Kader Kabupaten/Kota				
					-	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	459.406.900,00	435.084.900,00	432.027.810,00	94,04
3.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	23	Nilai Investasi Tahunan berskala (PMA/PMDN)				429.214.400,00	142.802.100,00	136.823.960,00	95,81
				63	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		72.538.000,00	19.841.000,00	19.222.000,00	96,88
					-	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	18.797.000,00	7.225.000,00	7.225.000,00	100,00
						Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	18.797.000,00	7.225.000,00	7.225.000,00	100,00
					-	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	53.741.000,00	12.616.000,00	11.997.000,00	95,09
						Sub Kegiatan Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	53.741.000,00	12.616.000,00	11.997.000,00	95,09
				64	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		189.149.500,00	41.125.000,00	41.125.000,00	100,00

						-	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	189.149.500,00	41.125.000,00	41.125.000,00	100,00
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	189.149.500,00	41.125.000,00	41.125.000,00	100,00
					65	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		48.279.100,00	42.857.100,00	38.438.080,00	89,69
							-Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	48.279.100,00	42.857.100,00	38.438.080,00	89,69
							Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	30.041.600,00	24.619.600,00	22.120.330,00	89,85
							Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	18.237.500,00	18.237.500,00	16.317.750,00	89,47
					66	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		119.247.800,00	38.979.000,00	38.038.880,00	97,59

						-	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	119.247.800,00	38.979.000,00	38.038.880,00	97,59
							Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	24.637.200,00	7.104.000,00	6.163.880,00	86,77
							Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	52.310.600,00	0,00	0,00	#DIV/0!
							Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	42.300.000,00	31.875.000,00	31.875.000,00	100,00
3.1.3	Meningkatnya Kesempatan Kerja	24	Tingkat Pengganguran Terbuka					8.416.566.344,00	6.197.237.336,00	5.596.741.787,00	90,31
					67	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		32.999.900,00	0,00	0,00	0.00%
						-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	32.999.900,00	0,00	0,00	0.00%
					68	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		606.840.200,00	159.150.000,00	141.781.420,00	89.09%

	-	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	606.840.200,00	159.150.000,00	141.781.420,00	89.09%
69	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		209.613.300,00	371.040.000,00	224.458.000,00	60.49%
	-	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.091.100,00	0,00	0,00	0.00%
	-	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	183.522.200,00	371.040.000,00	224.458.000,00	60.49%
70	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		65.323.000,00	0,00	0,00	0.00%
	-	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	65.323.000,00	0,00	0,00	0.00%

71	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		32.460.700,00	32.460.700,00	29.458.440,00	90.75%
	-	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	32.460.700,00	32.460.700,00	29.458.440,00	90.75%
72	PROGRAM PENGEMBANG AN UMKM		426.127.100,00	0,00	0,00	0.00%
	-	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	426.127.100,00	0,00	0,00	0.00%
73	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7.043.202.144,00	5.634.586.636,00	5.201.043.927,00	92.31%
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.684.700,00	2.284.600,00	1.998.180,00	87.46%
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.217.007.344,00	4.577.013.536,00	4.227.954.673,00	92.37%
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.000.000,00	0,00	0,00	0.00%

					-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	602.849.700,00	175.094.600,00	160.107.047,00	91.44%
					-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0.00%
					-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	792.742.400,00	755.493.900,00	687.612.557,00	91.01%
					-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	399.918.000,00	124.700.000,00	123.371.470,00	98.93%
4.1.1	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah	25	Rasio Konektivitas antar Wilayah				6.961.673.600,00	6.961.673.600,00	6.691.289.815,00	96,12
				74	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		6.528.346.400,00	6.528.346.400,00	6.279.806.588,00	96,19
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					
					-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.700.853.000,00	1.700.853.000,00	1.665.212.500,00	97,90
					-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3.805.552.200,00	3.805.552.200,00	3.683.816.872,00	96,80
					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					
					-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal	86.707.400,00	86.707.400,00	85.501.896,00	98,61

	Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)				
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	17.151.900,00	17.151.900,00	13.502.070,00	78,72
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	107.154.000,00	107.154.000,00	89.732.300,00	83,74
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					
-	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	24.133.000,00	24.133.000,00	16.602.000,00	68,79

-	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	78.375.000,00	78.375.000,00	72.478.000,00	92,48
-	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	187.838.000,00	187.838.000,00	167.443.500,00	89,14
-	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	38.968.900,00	38.968.900,00	26.529.000,00	68,08
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	416.892.800,00	416.892.800,00	403.836.250,00	96,87

	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	10.688.000,00	10.688.000,00	9.774.320,00	91,45
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam	6.937.800,00	6.937.800,00	5.988.480,00	86,32

[illegible]

						Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				
						Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				
					-	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	16.750.000,00	16.750.000,00	7.130.307,00	42,57
					-	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau	316.577.200,00	316.577.200,00	305.683.355,00	96,56
4.1.2	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	26	Indeks Infrastruktur Wilayah				23.800.933.920,00	15.877.469.227,00	14.684.517.623,00	92,49
				76	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		2.594.207.600,00	1.902.616.200,00	1.677.841.342,00	88,19
				-	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		2.594.207.600,00	1.902.616.200,00	1.677.841.342,00	88,19
				77	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		-	-	-	#DIV/0!
				-	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air		0,00	0,00	-	#DIV/0!

		Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				
78	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		8.146.781.000,00	5.148.338.000,00	5.139.166.281,00	99,82
	-	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.146.781.000	5.148.338.000	5.139.166.281,00	99,82
79	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		9.475.717.020,00	5.426.464.227,00	4.926.180.000,00	51,99
	-	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	9.475.717.020,00	5.426.464.227,00	4.926.180.000,00	90,78
80	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		-	-	-	#DIV/0!
	-	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	-	0,00	#DIV/0!
81	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		3.584.228.300,00	3.400.050.800,00	2.941.330.000,00	86,51%
	-	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan	3.584.228.300,00	3.400.050.800,00	2.941.330.000,00	86,51%

						Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				
5.1.1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				6.335.458.825,00	4.865.470.250,00	4.473.627.244,00	91,95
							4.658.759.525,00	3.103.059.850,00	2.774.485.338,00	89,41
				82	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		199.559.500,00	64.259.500,00	51.610.777,00	80,32
				-	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		199.559.500,00	64.259.500,00	51.610.777,00	80,32
				-	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		199.559.500,00	64.259.500,00	51.610.777,00	80,32
				83	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		985.910.825,00	627.992.950,00	575.432.843,00	91,63
				-	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		985.910.825,00	627.992.950,00	575.432.843,00	91,63
				-	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		190.310.900,00	57.058.000,00	49.874.000,00	87,41
				-	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas		49.999.975,00	0,00	0,00	0,00

					Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				
				-	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	745.599.950,00	570.934.950,00	525.558.843,00	92,05
				Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		49.999.875,00	7.208.000,00	6.035.000,00	83,73
				-	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	49.999.875,00	7.208.000,00	6.035.000,00	83,73
				Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		149.995.600,00	12.759.000,00	5.200.000,00	40,76
				-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	149.995.600,00	12.759.000,00	5.200.000,00	40,76
			84	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		85.904.000,00	0,00	0,00	0,00
				Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		85.904.000,00	0,00	0,00	0,00
				-	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	85.904.000,00	0,00	0,00	0,00
			85	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN		26.119.800,00	8.863.200,00	8.391.027,00	94,67

					LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
					Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	26.119.800,00	8.863.200,00	8.391.027,00	94,67	
					- Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	26.119.800,00	8.863.200,00	8.391.027,00	94,67	
				86	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	52.893.400,00	13.312.000,00	13.175.700,00	98,98	
					Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	52.893.400,00	13.312.000,00	13.175.700,00	98,98	
					- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	26.497.600,00	0,00	0,00	0,00	
					- Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	26.395.800,00	13.312.000,00	13.175.700,00	98,98	

87	PROGRAM PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		49.999.600,00	0,00	0,00	0,00
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH		49.999.600,00	0,00	0,00	0,00
	-	Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	49.999.600,00	1,00	0,00	0,00
88	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		323.376.800,00	189.002.400,00	177.084.221,00	93,69
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		323.376.800,00	189.002.400,00	177.084.221,00	93,69
	-	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	173.391.100,00	189.002.400,00	177.084.221,00	93,69
	-	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	99.992.100,00	0 (Refocusing)	0,00	-
	-	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan	49.993.600,00	0 (Refocusing)	0,00	-

		Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat /komunitas /kelompok masyarakat				
	89	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	122.519.100,00	38.838.100,00	20.000.000,00	51,50
	-	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	122.519.100,00	38.838.100,00	35.963.800,00	92,60
	-	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha /Dunia Pendidikan /Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	122.519.100,00	38.838.100,00	35.963.800,00	92,60
	90	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	4.185.000,00	2.250.000,00	0,00	-
	-	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	4.185.000,00	2.250.000,00	0,00	-
	-	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	4.185.000,00	2.250.000,00	0,00	-

			91	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.808.291.500,00	2.158.541.700,00	1.928.790.770,00	89,36
				Kegiatan Pengelolaan Sampah	2.808.291.500,00	2.158.541.700,00	1.928.790.770,00	89,36
			-	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6.000.000,00	5.994.300,00	1.072.260,00	17,89
			-	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	82.809.200,00	2.160.000,00	2.040.000,00	94,44
			-	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	50.000.000,00	0 (Refocusing)	-	-
			-	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2.669.482.300,00	2.150.387.400,00	1.925.678.510,00	89,55
28	Indeks Resiko Bencana				1.676.699.300,00	1.762.410.400,00	1.699.141.906,00	96,41

92	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		1.676.699.300,00	1.762.410.400,00	1.699.141.906,00	96,41
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		351.328.800,00	424.816.500,00	406.948.562,00	95,79
	-	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	24.828.800,00	24.828.800,00	24.386.040,00	98,22
	-	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	326.500.000,00	399.987.700,00	382.562.522,00	95,64
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		1.174.253.500,00	1.186.476.900,00	1.142.044.444,00	96,26
	-	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	49.130.900,00	49.130.900,00	47.641.827,00	96,97
	-	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	152.627.700,00	152.627.700,00	126.607.617,00	82,95
	-	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	19.388.700,00	19.388.700,00	18.386.400,00	94,83

					-	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	79.516.000,00	79.516.000,00	77.055.200,00	96,91
					-	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	863.431.200,00	875.654.600,00	862.388.900,00	98,49
					-	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	10.159.000,00	10.159.000,00	9.964.500,00	98,09
						Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	151.117.000,00	151.117.000,00	150.148.900,00	99,36
					-	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	35.496.600,00	35.496.600,00	35.379.000,00	99,67
					-	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	115.620.400,00	115.620.400,00	114.769.900,00	99,26
Total anggaran belanja pada sasaran RPJMD							291.870.318.434,00	247.245.777.279,00	231.422.288.571,08	93,60

